

EKONOMI PEMBANGUNAN

TEORI DAN PRAKTIK DALAM MENGATASI
KETIMPANGAN EKONOMI GLOBAL



Ardiyanto Maksimilianus Gai, S.T., M.Si.
Dr. Yunada Arpan, S.E., M.M.
Ir. Titik Poerwati, M.T.
Monsar Marito Sir. S.T., M.E.

BUKU REFERENSI

EKONOMI

PEMBANGUNAN

**TEORI DAN PRAKTIK DALAM MENGATASI
KETIMPANGAN EKONOMI GLOBAL**

Ardiyanto Maksimilianus Gai, S.T., M.Si.

Dr. Yunada Arpan, S.E., M.M.

Ir. Titik Poerwati, M.T.

Monsar Marito Sir. S.T., M.E.



EKONOMI PEMBANGUNAN

TEORI DAN PRAKTIK DALAM MENGATASI KETIMPANGAN EKONOMI GLOBAL

Ditulis oleh:

Ardiyanto Maksimilianus Gai, S.T., M.Si.

Dr. Yunada Arpan, S.E., M.M.

Ir. Titik Poerwati, M.T.

Monsar Marito Sir. S.T., M.E.

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.



ISBN: 978-623-8649-40-2

IV + 187 hlm; 18,2 x 25,7 cm.

Cetakan I, Mei 2024

Desain Cover dan Tata Letak:

Melvin Mirsal

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

PT Media Penerbit Indonesia

Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata

Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20231

Telp: 081362150605

Email: ptmediapenerbitindonesia@gmail.com

Web: <https://mediapenerbitindonesia.com>

Anggota IKAPI No.088/SUT/2024

KATA PENGANTAR

Pembangunan ekonomi merupakan suatu perjalanan panjang yang melibatkan berbagai aspek, dari kebijakan makroekonomi hingga implementasi program-program di lapangan. Dalam konteks global yang semakin terhubung, ketimpangan ekonomi menjadi tantangan serius yang memerlukan pemahaman mendalam, refleksi kritis, dan solusi yang inovatif.

Buku ini tidak hanya menguraikan konsep-konsep teoritis yang mendasari ekonomi pembangunan, tetapi juga menggali kisah nyata dari berbagai belahan dunia yang berhasil mengubah wajah ekonomi. Melalui pemahaman mendalam terhadap tantangan dan solusi yang dihadapi, diharapkan pembaca mendapatkan inspirasi dan pengetahuan yang konkrit untuk menghadapi ketidaksetaraan ekonomi.

Semoga buku referensi ini dapat menjadi teman setia bagi para pembaca yang tertarik mendalami ekonomi pembangunan, memberikan wawasan yang mendalam, serta menjadi sumber inspirasi untuk tindakan nyata dalam mengatasi ketimpangan ekonomi global.

Salam Hangat,

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Pengenalan tentang Masalah Ketimpangan Ekonomi Global	5
B. Pentingnya Pemahaman Ekonomi Pembangunan dalam Mengatasi Ketimpangan	12
C. Tujuan dan Ruang Lingkup Buku Referensi	18
BAB II TEORI EKONOMI PEMBANGUNAN	21
A. Konsep Dasar Ekonomi Pembangunan	21
B. Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan	27
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Ekonomi	33
BAB III DIMENSI KETIMPANGAN EKONOMI GLOBAL	39
A. Analisis Ketimpangan Ekonomi Antar Negara	39
B. Ketimpangan dalam Distribusi Pendapatan dan Kekayaan	45
C. Dampak Ketimpangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Global	51
BAB IV MODEL PEMBANGUNAN EKONOMI	59
A. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi	59
B. Model Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan	65
C. Strategi Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	70
BAB V TANTANGAN DALAM MENGATASI KETIMPANGAN EKONOMI GLOBAL	77

A.	Faktor-faktor Internal dan Eksternal yang Menghambat Pembangunan.....	78
B.	Dampak Perubahan Iklim dan Globalisasi terhadap Ketimpangan.....	84
C.	Isu-isu Kebijakan dalam Menghadapi Tantangan Ekonomo Global.....	90
BAB VI	PRAKTIK TERBAIK DALAM MENGATASI KETIMPANGAN EKONOMI	97
A.	Studi Kasus tentang Negara-negara yang Berhasil Mengurangi Ketimpangan	97
B.	Program-program Pembangunan Ekonomi yang Efektif	101
C.	Pelajaran yang Bisa Dipetik dari Pengalaman Praktis dalam Mengatasi Ketimpangan	107
BAB VII	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN INTERVENSI PEMERINTAH.....	115
A.	Peran Kebijakan Fisikal dan Moneter dalam Mengurangi Ketimpangan	115
B.	Strategi Pengembangan Infrastruktur dan Industri	122
C.	Kebijakan Perdagangan dan Intervensi untuk Meningkatkan Inklusivitas Ekonomi.....	128
BAB VIII	INOVASI DAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI	133
A.	Peran Inovasi dan Teknologi dalam Mengatasi Ketimpangan.....	134
B.	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Teknologi.....	139
C.	Tantangan Etika dan Sosial dalam Penerapan Teknologi untuk Pembangunan Ekonomi	144
BAB IX	HUBUNGAN ANTAR-NEGARA DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL.....	151
A.	Peran organisasi Internasional dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Global	152

B.	Program Bantuan dan Kerja Sama Pembangunan	158
C.	Tantangan Diplomasi Ekonomi dalam Menghadapi Ketimpangan.....	164
BAB X	KESIMPULAN	171
DAFTAR PUSTAKA		173
GLOSARIUM		179
INDEKS		181
BIOGRAFI PENULIS.....		185
SINOPSIS		187



BAB I

PENDAHULUAN

Ekonomi pembangunan menjadi fokus utama dalam merespons tantangan ketidaksetaraan ekonomi di skala global. Konsep ini menganalisis dan merumuskan strategi ekonomi yang berorientasi pada pembangunan untuk mengatasi kesenjangan antar negara. Dalam teorinya, pendekatan ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, distribusi sumber daya yang merata, dan pengurangan disparitas antar wilayah. Penerapan konsep ini melibatkan langkah-langkah konkret dalam pengelolaan kebijakan ekonomi, investasi infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan ekonomi tidak hanya mengukur kemajuan dari sudut pandang ekonomi murni, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan keberlanjutan. Dengan melibatkan aktor-aktor global, seperti lembaga keuangan internasional dan negara-negara berkembang, ekonomi pembangunan menciptakan landasan untuk kerjasama internasional yang adil.

A. Pengenalan tentang Masalah Ketimpangan Ekonomi Global

Pengenalan tentang masalah ketimpangan ekonomi global menjadi isu yang semakin mendesak untuk dibahas di era kontemporer ini. Ketimpangan ekonomi merujuk pada disparitas dalam distribusi kekayaan, pendapatan, dan peluang ekonomi di antara individu, kelompok, atau negara-negara di seluruh dunia. Fenomena ini telah

menjadi sorotan utama dalam debat ekonomi global karena dampaknya yang luas dan serius terhadap stabilitas sosial, politik, dan ekonomi.

Salah satu aspek yang memperumit masalah ini adalah fakta bahwa ketimpangan ekonomi tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat global. Negara-negara maju cenderung memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi daripada negara-negara berkembang. Seiring dengan itu, perusahaan multinasional dan institusi keuangan global sering kali memperkuat ketimpangan ini melalui praktik-praktik ekonomi yang merugikan. Dampak negatif dari ketimpangan ekonomi global sangatlah beragam. Di antaranya adalah meningkatnya ketegangan sosial, peningkatan tingkat kemiskinan, dan terhambatnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan juga dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, dan bahkan perubahan iklim global.

1. Definisi dan Dimensi Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi merupakan fenomena kompleks yang mencakup pendapatan, kekayaan, akses layanan dasar, dan peluang ekonomi. Milanovic (2016) menyarankan penggunaan indikator seperti indeks Gini, rasio 20:20, dan perbedaan absolut pendapatan atau kekayaan untuk mengukurnya. Data terkini dari *World Inequality Database* menunjukkan peningkatan signifikan dalam ketimpangan pendapatan (Alvaredo *et al.*, 2018). Hal ini memicu kekhawatiran akan stabilitas sosial, politik, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Stiglitz, 2022). Ketimpangan ini bisa terjadi di dalam satu negara atau antar negara di tingkat global.

Gambar 1, Ketimpangan Ekonomi



Ketidakseimbangan ekonomi, menurut Milanovic (2016), tidak hanya mempengaruhi aspek material seperti pendapatan dan kekayaan, tetapi juga akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi. Untuk mengukurnya, indikator seperti indeks Gini, rasio 20:20, dan perbedaan absolut dalam pendapatan diperlukan. Fenomena ini tidak terbatas pada tingkat nasional, tetapi juga melintasi batas negara, menciptakan ketidaksetaraan global. Data terbaru dari *World Inequality Database*, seperti yang disampaikan Alvaredo *et al.* (2018), menunjukkan peningkatan ketimpangan pendapatan dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini menimbulkan keprihatinan karena ketimpangan ekonomi dapat mengganggu stabilitas sosial, politik, dan bahkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, seperti yang dikemukakan oleh Stiglitz (2022).

Pentingnya memahami ketimpangan ekonomi dalam berbagai dimensi, seperti pendapatan, kekayaan, akses terhadap layanan dasar, dan peluang ekonomi, ditekankan oleh Milanovic (2016). Penggunaan indikator seperti indeks Gini, rasio 20:20, dan perbedaan absolut dalam pendapatan atau kekayaan sangat dianjurkan untuk mengukur ketimpangan ini. Data terbaru dari *World Inequality Database* menunjukkan tren meningkatnya ketimpangan pendapatan di banyak negara (Alvaredo *et al.*, 2018), yang menimbulkan kekhawatiran akan

potensi gangguan terhadap stabilitas sosial, politik, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Stiglitz, 2022).

Tingkat ketimpangan ekonomi, baik di dalam maupun di antara negara-negara, menjadi perhatian utama dalam analisis sosio-ekonomi. Milanovic (2016) menggarisbawahi pentingnya menggunakan berbagai indikator, seperti indeks Gini, rasio 20:20, serta perbedaan absolut dalam pendapatan atau kekayaan, untuk mengukur fenomena kompleks ini. Data terbaru dari *World Inequality Database* menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir (Alvaredo *et al.*, 2018). Peningkatan ini memunculkan keprihatinan luas karena ketimpangan ekonomi bukan hanya dapat mengancam stabilitas sosial dan politik, tetapi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Stiglitz, 2022).

2. Faktor-faktor Penyebab Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi bukanlah fenomena yang sederhana, melainkan hasil dari sejumlah faktor yang kompleks dan beragam. Salah satu faktor utamanya adalah kebijakan ekonomi yang tidak inklusif. Ini terjadi ketika keuntungan dari pertumbuhan ekonomi tidak merata, dengan sebagian keuntungan yang lebih besar jatuh ke tangan segelintir orang atau kelompok tertentu, sementara yang lainnya ditinggalkan jauh di belakang (Ostry *et al.*, 2014). Namun, tidak hanya faktor kebijakan domestik yang berperan dalam menciptakan ketimpangan ekonomi. Globalisasi dan revolusi industri juga turut berkontribusi. Perubahan ini tidak hanya menciptakan kesempatan baru bagi yang memiliki akses terhadap teknologi dan modal manusia yang berkualitas, tetapi juga meninggalkan yang tidak mampu mengejar perkembangan tersebut, memperlebar kesenjangan (Milanovic, 2016).

Ketimpangan ekonomi juga dipengaruhi oleh disparitas dalam pendidikan dan akses terhadap layanan kesehatan. Ketika kesempatan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas terbatas pada segelintir orang, sementara yang lainnya terbatas dalam aksesnya atau bahkan tidak memiliki akses sama sekali, kesenjangan ekonomi semakin membesar (Deaton, 2023). Dalam mengatasi ketimpangan ekonomi, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif yang tidak hanya menangani faktor-faktor ekonomi langsung, tetapi juga mencakup kebijakan pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap peluang ekonomi. Hanya dengan pendekatan yang holistik ini kita dapat berharap untuk meredakan ketegangan sosial dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Dampak Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi adalah masalah yang merayap di berbagai lapisan masyarakat, dan dampaknya meluas ke berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Salah satu implikasi sosialnya yang paling nyata adalah munculnya ketegangan sosial. Ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan sering kali memicu perasaan ketidakpuasan dan ketidakadilan di antara warga masyarakat, yang pada gilirannya dapat memicu konflik sosial. Peningkatan tingkat kriminalitas juga menjadi salah satu konsekuensi dari ketimpangan ekonomi yang signifikan. Ketika kesempatan ekonomi tidak merata, sebagian masyarakat yang terpinggirkan cenderung mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk melalui tindakan kriminal.

Tidak hanya berdampak sosial, ketimpangan ekonomi juga memiliki konsekuensi ekonomi yang serius. Salah satunya adalah potensi hambatan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Ketika sebagian besar pendapatan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, daya beli masyarakat yang berpenghasilan rendah akan menurun. Hal ini bisa menghambat permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi juga menjadi risiko yang meningkat karena ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan cenderung menciptakan kerentanan ekonomi yang lebih besar terhadap guncangan eksternal.

Ketimpangan ekonomi juga merugikan dalam hal mobilitas sosial. Peluang untuk naik di tangga sosial sering kali terbatas bagi yang berasal dari lapisan masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi. Ini menciptakan siklus perpetuasi kemiskinan dan ketidaksetaraan, di mana kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup menjadi semakin sulit. Selain itu, lingkungan yang tidak merata untuk pengembangan sumber daya manusia juga menjadi masalah serius. Potensi individu untuk berkembang secara optimal sering kali terhambat oleh ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan manusia secara menyeluruh.

4. Upaya Mengatasi Ketimpangan Ekonomi

Upaya untuk mengatasi ketimpangan ekonomi telah menjadi fokus utama baik di tingkat nasional maupun global. Di tingkat nasional, berbagai kebijakan telah diterapkan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan. Salah satu pendekatan yang terbukti efektif adalah kebijakan redistribusi pendapatan, di mana pemerintah mengimplementasikan berbagai program untuk memastikan distribusi yang lebih merata dari hasil ekonomi. Selain itu, investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan juga merupakan strategi penting.

Dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat, kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan mobilitas sosial dapat ditingkatkan. Perlindungan sosial juga menjadi bagian integral dari upaya mengatasi ketimpangan ekonomi di tingkat nasional. Melalui penguatan sistem perlindungan sosial, termasuk program-program seperti jaminan sosial, bantuan tunai, dan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, masyarakat yang kurang mampu dapat lebih terlindungi dari dampak ketimpangan ekonomi.

Di tingkat global, kerja sama internasional berperan kunci dalam mengurangi disparitas ekonomi antar negara. Salah satu pendekatan yang penting adalah perdagangan yang adil, di mana negara-negara berupaya untuk mengurangi hambatan perdagangan yang merugikan negara-negara berkembang dan memberikan akses yang lebih adil ke pasar global. Selain itu, transfer teknologi juga merupakan hal penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Melalui transfer teknologi yang adil dan berkelanjutan, negara-negara berkembang dapat meningkatkan daya saing dan meningkatkan kesempatan untuk berkembang secara ekonomi. Selain perdagangan yang adil dan transfer teknologi, bantuan pembangunan juga merupakan instrumen yang penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi global. Bantuan pembangunan dapat membantu negara-negara berkembang untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta membangun kapasitas institusi. Melalui kerja sama internasional dan komitmen bersama, upaya ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi disparitas ekonomi antar negara dan menciptakan dunia yang lebih berkeadilan secara ekonomi.

B. Pentingnya Pemahaman Ekonomi Pembangunan dalam Mengatasi Ketimpangan

Pemahaman ekonomi pembangunan memegang peranan penting dalam mengatasi ketimpangan yang terjadi dalam suatu masyarakat. Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia. Ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan, akses terhadap sumber daya, dan peluang ekonomi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konsep dan mekanisme ekonomi pembangunan menjadi kunci dalam upaya mengurangi ketimpangan.

Salah satu alasan mengapa pemahaman ekonomi pembangunan sangat penting adalah karena hal itu memungkinkan para pembuat kebijakan untuk merancang strategi pembangunan yang lebih efektif. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan, pemerintah dapat mengidentifikasi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap kesempatan ekonomi dan sumber daya. Pemahaman ekonomi pembangunan juga memungkinkan untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif. Dengan menganalisis struktur ekonomi dan pola distribusi pendapatan, pemerintah dapat menargetkan investasi dan program pembangunan pada sektor-sektor yang memperkuat daya beli masyarakat dan mengurangi kesenjangan antara kelompok-kelompok sosial.

1. Mengidentifikasi Penyebab Ketimpangan Ekonomi

Mengidentifikasi akar penyebab ketimpangan ekonomi merupakan langkah krusial dalam upaya memahami dinamika pembangunan ekonomi suatu negara. Teori ekonomi pembangunan, sebagaimana disajikan oleh Todaro dan Smith (2015), menyediakan landasan yang kokoh untuk membahas faktor-faktor yang menjadi pemicu ketimpangan tersebut. Salah satu faktor utama yang sering diidentifikasi adalah kebijakan pemerintah yang tidak inklusif. Kebijakan yang cenderung memberikan perlakuan tidak adil atau tidak seimbang terhadap berbagai kelompok dalam masyarakat dapat secara signifikan memperburuk ketimpangan ekonomi. Misalnya, subsidi yang tidak tepat sasaran atau regulasi yang memberatkan sektor-sektor tertentu namun menguntungkan sektor-sektor lain dapat menjadi pemicu ketidaksetaraan yang nyata.

Ketimpangan ekonomi juga sering kali diakibatkan oleh ketidaksetaraan dalam distribusi aset dan akses. Aset seperti tanah, modal, dan kesempatan pendidikan atau pelatihan sering kali tidak didistribusikan secara merata di masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan yang signifikan antara kelompok-kelompok yang memiliki akses penuh terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi dengan yang tidak. Misalnya, akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas atau modal usaha dapat memperkuat ketimpangan ekonomi antargenerasi dan antarkelompok.

Ketidakmerataan dalam pembangunan manusia juga merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Ketidakmerataan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan dapat mengakibatkan kesenjangan dalam kemampuan produktifitas dan mobilitas sosial. Akibatnya, individu atau kelompok-kelompok tertentu

akan terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan sulit untuk meningkatkan taraf hidup, sementara kelompok-kelompok lain mungkin mampu memanfaatkan peluang pembangunan dengan lebih baik. Dengan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan ekonomi ini, para pembuat kebijakan dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

2. Merancang Kebijakan yang Berorientasi pada Pembangunan Inklusif

Merancang kebijakan yang berorientasi pada pembangunan inklusif merupakan langkah krusial dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai hal ini, pemahaman yang mendalam mengenai konsep ekonomi pembangunan menjadi sangat penting. Teori-teori dalam ekonomi pembangunan membahas aspek-aspek vital seperti keberlanjutan, distribusi pendapatan, dan akses yang merata terhadap sumber daya ekonomi (Ray, 2018). Memperhitungkan aspek-aspek ini merupakan fondasi yang kuat bagi perumusan kebijakan yang inklusif. Aspek pertama yang harus dipertimbangkan adalah keberlanjutan. Kebijakan pembangunan haruslah dirancang dengan memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merugikan keberlanjutan lingkungan merupakan komitmen yang sangat penting. Kebijakan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekologi, seperti penggunaan energi terbarukan dan pelestarian ekosistem, adalah langkah penting dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi masa depan.

Distribusi pendapatan juga menjadi fokus utama dalam merancang kebijakan yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi tidak akan memberikan dampak positif secara merata jika tidak diikuti oleh distribusi pendapatan yang adil. Kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan akses terhadap pendidikan serta kesehatan akan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antarindividu dan kelompok masyarakat. Tidak kalah pentingnya adalah akses yang merata terhadap sumber daya ekonomi. Kebijakan harus memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya ekonomi, seperti akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar. Langkah-langkah konkret, seperti penyediaan infrastruktur dasar di daerah terpencil dan pelatihan keterampilan bagi kelompok masyarakat yang rentan, akan membantu menciptakan kesempatan yang lebih merata bagi semua.

3. Mengukur Efektivitas Kebijakan Pembangunan

Pemahaman mendalam tentang ekonomi pembangunan memberikan landasan yang kuat untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah melalui penggunaan indikator ekonomi pembangunan, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Ketimpangan Gini. Melalui analisis terhadap indikator-indikator ini, kita dapat mengukur dampak kebijakan pembangunan terhadap redistribusi pendapatan, peningkatan akses terhadap layanan dasar, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Sen, 2019).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), misalnya, memberikan gambaran menyeluruh tentang kesejahteraan manusia dengan memperhitungkan pendapatan per kapita, harapan hidup, dan tingkat pendidikan. Dengan memantau perubahan IPM dari waktu ke waktu, kita dapat melihat apakah kebijakan pembangunan berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Di sisi lain, Indeks Ketimpangan Gini memberikan gambaran tentang sejauh mana distribusi pendapatan merata di dalam suatu masyarakat. Penurunan nilai Indeks Ketimpangan Gini menandakan adanya peningkatan kesetaraan ekonomi dalam suatu negara atau wilayah.

Penggunaan indikator tersebut tidaklah cukup. Diperlukan pemahaman yang mendalam tentang konsep dan metodologi pengukuran dalam ekonomi pembangunan untuk memastikan analisis yang akurat dan relevan. Hal ini termasuk pemahaman tentang keterbatasan masing-masing indikator dan bagaimana dapat berinteraksi satu sama lain dalam memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas kebijakan pembangunan. Dengan memadukan pemahaman konsep ekonomi pembangunan dan metodologi pengukuran yang kuat, kita dapat memberikan evaluasi yang lebih mendalam terhadap efektivitas kebijakan pembangunan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi.

4. Mendorong Kolaborasi dan Kemitraan yang Efektif

Memahami ekonomi pembangunan bukan sekadar tentang mengumpulkan data dan statistik. Ini tentang menerjemahkan angka-angka menjadi tindakan konkret yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pemahaman yang mendalam tentang ekonomi pembangunan memungkinkan kita untuk mendorong kolaborasi dan kemitraan yang efektif di antara berbagai pemangku

kepentingan. Dengan memahami peran yang dimainkan oleh pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil dalam proses pembangunan, kita bisa mengidentifikasi peluang nyata untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi.

Kolaborasi ini bukan sekadar tentang menyatukan berbagai pemangku kepentingan dalam ruang yang sama, tetapi tentang menciptakan lingkungan yang mendukung implementasi kebijakan yang holistik dan berkelanjutan dalam mengatasi ketimpangan ekonomi. Ketika berbagai pihak bekerja bersama, dapat memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk mengatasi masalah yang kompleks dan saling terkait ini. Hal ini menciptakan momentum yang kuat untuk perubahan yang berkelanjutan, yang tidak hanya melibatkan pengurangan ketimpangan ekonomi, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan yang inklusif.

Kunci dari kolaborasi yang efektif adalah memahami bahwa setiap pemangku kepentingan membawa kontribusi unik sendiri. Pemerintah mungkin memiliki akses ke sumber daya dan kekuasaan kebijakan, sementara sektor swasta membawa inovasi dan fleksibilitas. Organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil mungkin memiliki wawasan langsung tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang terpinggirkan. Dalam sinergi ini, kekuatan bersama dapat dihasilkan, menghasilkan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan. Dengan mendorong kolaborasi dan kemitraan yang efektif, kita bukan hanya menciptakan peluang untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, tetapi juga mengubah paradigma pembangunan secara keseluruhan.

C. Tujuan dan Ruang Lingkup Buku Referensi

Buku referensi adalah sumber informasi yang penting dalam dunia akademis, profesional, maupun personal. Tujuan dari buku referensi adalah untuk menyediakan pembaca dengan informasi yang akurat, terperinci, dan terkini tentang topik tertentu. Dengan demikian, tujuan utama dari buku referensi adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang suatu subjek dan membantu pembaca dalam mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki.

Ruang lingkup dari buku referensi dapat bervariasi tergantung pada subjeknya. Beberapa buku referensi mungkin fokus pada topik yang sangat spesifik, seperti kamus medis atau ensiklopedia sejarah dunia, sementara yang lain mungkin mencakup berbagai topik dalam satu volume, seperti ensiklopedia umum atau buku referensi ilmiah. Ruang lingkup buku referensi juga dapat mencakup berbagai jenis informasi, termasuk definisi, fakta, statistik, grafik, dan daftar referensi untuk membantu pembaca membahas topik lebih lanjut.

1. Memberikan Pemahaman Komprehensif tentang Ekonomi Pembangunan

Buku ini menguraikan konsep, teori, dan praktik dalam ekonomi pembangunan secara komprehensif. Dengan menyajikan kerangka kerja yang solid, pembaca diberi pemahaman yang mendalam tentang proses pembangunan ekonomi. Mulai dari aspek fundamental hingga isu-isu kompleks, buku ini memberikan analisis yang mendalam untuk mengatasi ketimpangan ekonomi global. Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada pembaca tentang berbagai aspek penting dalam mengatasi ketimpangan ekonomi global. Melalui penyajian yang komprehensif, buku ini tidak hanya memberikan

pengetahuan yang kuat tentang konsep dan teori, tetapi juga mendorong pembaca untuk mempertimbangkan perannya dalam menciptakan perubahan positif dalam dunia ekonomi yang semakin kompleks ini.

2. Menguraikan Teori-teori dan Model Pembangunan

Buku ini secara mendalam membahas beragam teori dan model pembangunan yang menjadi kunci dalam menangani ketimpangan ekonomi. Buku ini menguraikan berbagai model analisis yang digunakan untuk mengukur ketimpangan ekonomi dan mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan. Pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana mengidentifikasi ketimpangan ekonomi serta mengevaluasi apakah kebijakan yang diterapkan telah berhasil mengatasi masalah. Dengan demikian, buku ini tidak hanya memberikan wawasan teoritis, tetapi juga memaparkan aplikasi praktis dari berbagai teori dan model dalam konteks nyata pembangunan ekonomi.

3. Menyoroti Praktik-praktik yang Terbukti Berhasil

Buku ini tidak hanya sekadar menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan ketimpangan ekonomi, melainkan juga mengulas praktik-praktik yang telah terbukti berhasil dalam menanggulangi masalah tersebut di berbagai belahan dunia. Dalam menjelaskan konsep-konsep teoretis, buku ini turut memberikan sorotan pada implementasi nyata dari kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan yang efektif. Berbagai studi kasus yang disajikan meliputi beragam negara dan wilayah, memperlihatkan bagaimana langkah-langkah konkret dapat meningkatkan inklusi ekonomi serta mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat. Dengan demikian, buku ini

bukan hanya sekadar teoretis, tetapi juga praktis dalam memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dan praktisi pembangunan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam menyelesaikan masalah ketimpangan ekonomi.

4. Mendorong Diskusi dan Pemikiran Kritis

Buku ini tak sekadar sebuah karya tulis biasa, tetapi merupakan ajakan untuk membahas jauh tentang dinamika ketimpangan ekonomi yang melanda dunia kita saat ini. Dengan memaparkan beragam sudut pandang dan analisis mendalam, tujuannya adalah lebih dari sekadar memberikan informasi, melainkan menginspirasi diskusi yang mendalam dan pemikiran kritis yang tajam. Pembaca diharapkan tidak hanya menjadi konsumen pasif dari ide-ide yang disajikan, tetapi juga menjadi pemikir aktif yang mampu mempertimbangkan berbagai sudut pandang serta solusi inovatif dalam menangani tantangan yang kompleks ini. Buku referensi ini menyajikan panduan komprehensif dan terstruktur untuk memperkenalkan pembaca kepada beragam topik relevan. Dengan menyajikan berbagai sumber, pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang konsep, teori, dan praktik yang dibahas. Tujuan utamanya adalah memberikan pengetahuan yang lebih baik dan memperluas wawasan dalam bidang-bidang tertentu. Sebagai sumber informasi yang andal dan mudah diakses, diharapkan dapat menjadi alat berguna bagi mahasiswa, profesional, dan pembaca umum.



BAB II

TEORI EKONOMI PEMBANGUNAN

Teori ekonomi pembangunan, menurut Todaro dan Smith (2015), menjadi landasan penting untuk memahami dinamika pembangunan ekonomi. Pendekatan neoklasik, yang menekankan investasi dalam modal fisik dan manusia serta peran pasar, merupakan salah satu pendekatan utama. Namun, kritik terhadap pendekatan ini menyatakan bahwa ia kurang mempertimbangkan aspek sosial, politik, dan lingkungan dalam pembangunan ekonomi secara menyeluruh (Todaro & Smith, 2015).

Teori neo-institusionalis juga memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang pembangunan ekonomi. Pendekatan ini menekankan peran lembaga dan aturan dalam membentuk kebijakan ekonomi serta mempengaruhi perilaku agen-agen ekonomi. Dengan memahami berbagai teori dan pendekatan dalam ekonomi pembangunan, pembaca akan dapat mengembangkan wawasan yang lebih luas tentang kompleksitas masalah pembangunan ekonomi serta berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi secara efektif (North, 2020).

A. Konsep Dasar Ekonomi Pembangunan

Konsep dasar ekonomi pembangunan adalah landasan teoritis yang digunakan untuk memahami dan menganalisis proses pembangunan suatu negara atau wilayah. Sebagai cabang dari ilmu

ekonomi, konsep ini membahas bagaimana sumber daya yang terbatas dapat digunakan secara efisien untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konsep ini, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi pijakan utama dalam merancang kebijakan pembangunan, antara lain alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi (Gai *et al.*, 2022).

Salah satu aspek penting dalam konsep ekonomi pembangunan adalah pembangunan manusia, yang menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam proses pembangunan. Hal ini mengacu pada upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan kapasitas manusia dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan keterampilan. Pembangunan manusia diyakini memiliki dampak positif yang jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi, karena sumber daya manusia yang berkualitas akan mendorong inovasi, produktivitas, dan investasi dalam berbagai sektor ekonomi.

Konsep dasar ekonomi pembangunan tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan isu lingkungan dan keberlanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dapat merusak ekosistem dan mengancam kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan mengimplementasikan kebijakan ramah lingkungan untuk melindungi ekosistem dan generasi mendatang, menjadi fondasi strategi pembangunan holistik untuk kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan.

1. Pertumbuhan Ekonomi sebagai Fondasi Utama

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif adalah landasan utama bagi kesejahteraan masyarakat dan pengurangan disparitas ekonomi. Menurut Todaro & Smith (2015), konsep ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya mencakup peningkatan output, tetapi juga distribusi pendapatan yang adil dan kesempatan kerja yang merata. Melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, diharapkan tercipta lapangan kerja yang memadai, pendapatan individu meningkat, serta infrastruktur ekonomi yang mendukung. Pentingnya aspek inklusivitas tidak boleh diabaikan dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi yang signifikan mungkin terjadi, dampaknya tidak akan merata jika tidak ada upaya konkret untuk memastikan bahwa manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan kebijakan dan program yang memastikan bahwa hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut didistribusikan secara adil dan merata, sehingga tidak ada kelompok yang terpinggirkan atau ditinggalkan.

Inklusivitas dalam pertumbuhan ekonomi juga berarti memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak memperhatikan aspek lingkungan akan menghadapi konsekuensi yang merugikan di masa depan. Oleh karena itu, strategi pembangunan ekonomi haruslah memperhitungkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yang memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif berperan kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. Distribusi Pendapatan dan Keadilan Sosial

Pada pembangunan ekonomi, distribusi pendapatan yang merata dan keadilan sosial penting untuk stabilitas yang berkelanjutan. Ketidakmerataan dapat menciptakan ketimpangan ekonomi yang mengganggu stabilitas sosial dan politik (Stiglitz, 2022). Oleh karena itu, kebijakan redistribusi, seperti pajak progresif dan bantuan sosial, menjadi fokus utama. Ini berperan kunci dalam mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif (Ostry *et al.*, 2014). Pajak progresif, sebagai salah satu instrumen redistribusi pendapatan, mengenakan beban pajak yang lebih berat pada individu atau rumah tangga dengan pendapatan yang lebih tinggi, sehingga mendorong redistribusi pendapatan dari yang kaya ke yang miskin. Di samping itu, program bantuan sosial juga berperan dalam menyediakan jaring pengaman sosial bagi yang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Implementasi kebijakan redistribusi pendapatan juga tidak selalu mulus. Tantangan seperti resistensi politik dari kelompok yang terkena dampak negatif redistribusi, serta potensi kerugian ekonomi dalam jangka pendek, bisa menghambat kesuksesan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen politik yang kuat dan koordinasi yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam menerapkan kebijakan redistribusi pendapatan. Dengan menjaga fokus pada distribusi pendapatan yang merata dan prinsip keadilan sosial, pemerintah dapat menciptakan fondasi yang lebih stabil untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini bukan hanya tentang meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga tentang memperkuat keberlanjutan sosial dan politik suatu negara. Oleh karena

itu, kebijakan redistribusi pendapatan harus diperjuangkan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi yang holistik dan berkelanjutan.

3. Pembangunan Manusia dan Peningkatan Kualitas Hidup

Pembangunan manusia dan peningkatan kualitas hidup merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dari konsep pembangunan ekonomi. Selain fokus pada pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan, pendekatan pembangunan ini juga menekankan investasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar lainnya. Melalui upaya ini, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlangsungan masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan ini diperkuat oleh teori yang diungkapkan oleh Amartya Sen pada tahun 2019, yang membahas pentingnya pembangunan manusia dalam konteks pembangunan ekonomi. Sen menegaskan bahwa pembangunan manusia yang efektif akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Ini berarti memberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai, serta memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan baik.

Investasi dalam pendidikan, misalnya, bukan hanya tentang memberikan akses ke sekolah, tetapi juga tentang memastikan bahwa pendidikan yang diberikan berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Hal yang sama berlaku untuk kesehatan, di mana akses yang mudah terhadap layanan kesehatan yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup secara keseluruhan. Pentingnya pembangunan manusia juga tercermin dalam dampak jangka panjangnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia yang berkualitas

akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, karena mampu berkontribusi secara optimal dalam proses produksi dan inovasi. Oleh karena itu, pembangunan manusia harus dilihat sebagai investasi jangka panjang yang tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

4. Peran Pemerintah dan Pembangunan Infrastruktur

Peran pemerintah dalam mengarahkan pembangunan ekonomi merupakan pilar fundamental dalam konsepsi ekonomi pembangunan. Dengan fungsi yang vital ini, pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan inklusivitas dan keberlanjutan dalam proses tersebut (Todaro & Smith, 2015). Koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan, sehingga pemerintah harus mengambil peran sebagai pengoordinasi yang efektif. Pentingnya pembangunan infrastruktur tak terbantahkan dalam konteks pembangunan ekonomi. Infrastruktur yang memadai tidak hanya membantu meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga mengurangi biaya produksi serta meningkatkan aksesibilitas terhadap pasar dan layanan publik (*World Bank*, 2014). Oleh karena itu, pemerintah harus memprioritaskan investasi dalam infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi nasional.

Untuk menghadapi kompleksitas tantangan pembangunan, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan alokasi sumber daya yang efisien dan efektif. Kebijakan yang tepat dan strategis diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak

hanya berfokus pada sektor-sektor utama, tetapi juga mencakup daerah-daerah yang terpinggirkan atau rentan. Hal ini memerlukan koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah serta kemitraan yang kuat dengan sektor swasta dan masyarakat sipil. Dalam konteks global yang terus berubah, adaptasi dan inovasi dalam peran pemerintah menjadi semakin penting. Pemerintah perlu berperan sebagai katalisator untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sambil juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari setiap kebijakan dan tindakan yang diambil. Hanya dengan demikian, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan menyeluruh dapat terwujud, memastikan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat.

B. Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan saling terkait dalam studi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan produksi barang dan jasa suatu negara, sementara distribusi pendapatan mencakup pembagian pendapatan di masyarakat. Dianggap ideal, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan seharusnya berdampak positif pada distribusi pendapatan yang lebih adil di semua tingkatan masyarakat, menciptakan kesejahteraan yang merata bagi individu dan kelompok. Teori pertumbuhan endogen menonjolkan peran krusial inovasi, investasi, dan akumulasi modal manusia dalam memicu pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara. Tidak hanya mengandalkan faktor eksternal seperti modal dan teknologi, teori ini menegaskan pentingnya faktor internal yang dapat ditingkatkan melalui kebijakan ekonomi yang tepat. Distribusi pendapatan menjadi relevan karena teori ini membahas kesetaraan akses terhadap sumber daya dan

peluang, memastikan partisipasi seluruh individu dalam proses pembangunan ekonomi.

Ketidaksetaraan pendapatan dalam banyak negara sering terjadi meskipun ada pertumbuhan ekonomi. Faktor seperti akses pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebijakan ekonomi yang tidak memperhatikan distribusi pendapatan memperburuk ketidaksetaraan. Untuk pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerintah dan pemangku kepentingan harus memperhatikan faktor-faktor ini. Dengan demikian, upaya-upaya dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang adil dan berdaya guna bagi seluruh masyarakat.

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik

Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik menekankan peran vital investasi dalam mendorong kemajuan jangka panjang. Investasi dalam modal fisik dan manusia dianggap kunci untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Barro & Sala-i-Martin (2014) membahas pentingnya akumulasi modal seperti infrastruktur dan teknologi, bersama dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemahaman bahwa investasi merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi, tercermin dalam upaya pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor yang mendorong akumulasi modal dan peningkatan produktivitas. Melalui kebijakan publik yang mendukung pembangunan infrastruktur, insentif untuk riset dan pengembangan teknologi, serta investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, ekonomi diharapkan dapat mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka panjang.

Kritik terhadap teori ini muncul dari kelompok yang membahas ketimpangan sosial yang mungkin terjadi akibat fokus utama pada pertumbuhan ekonomi. Meskipun akumulasi modal dan peningkatan produktivitas dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, ada risiko bahwa manfaatnya tidak merata di masyarakat. Kesulitan akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja yang adil dapat memperkuat ketidaksetaraan pendapatan dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak hanya berkelanjutan tetapi juga inklusif, diperlukan pendekatan yang lebih holistik. Hal ini mencakup perhatian yang lebih besar terhadap distribusi pendapatan, akses yang merata terhadap kesempatan ekonomi, serta kebijakan yang mendukung pemerataan pembangunan manusia. Dengan demikian, sambil mengakui peran vital investasi dalam mendorong pertumbuhan, penting untuk mempertimbangkan aspek-aspek distribusi dan inklusivitas guna mencapai kemajuan ekonomi yang berkelanjutan secara menyeluruh.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Strukturalis

Teori pertumbuhan ekonomi strukturalis merupakan landasan penting dalam pemahaman peran pemerintah dalam mengarahkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi disparitas pendapatan. Konsep ini, yang dikemukakan oleh Hirschman pada tahun 1958, membahas perlunya campur tangan aktif dari pemerintah untuk memperbaiki struktur ekonomi suatu negara. Sentral dalam teori ini adalah pengakuan bahwa pemerintah memiliki peran strategis dalam mengalokasikan sumber daya, mengembangkan sektor-sektor kunci seperti industri manufaktur, dan membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menekankan

kebijakan yang mendukung sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur, teori ini berpendapat bahwa pemerintah dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Langkah-langkah seperti memberikan insentif fiskal, menyediakan infrastruktur yang diperlukan, dan mempromosikan investasi dalam sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan struktural yang mungkin menghambat pertumbuhan.

Teori ini membahas pentingnya mengurangi kesenjangan antara sektor-sektor ekonomi yang berkembang dengan yang tertinggal. Pemerintah diharapkan untuk memperbaiki distribusi pendapatan agar lebih merata, sehingga memungkinkan lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi. Stabilitas sosial juga dianggap sebagai hasil yang mungkin dari distribusi pendapatan yang lebih merata, karena ketidaksetaraan yang ekstrem dapat menyebabkan ketegangan sosial dan ketidakstabilan. Pendekatan strukturalis dalam pertumbuhan ekonomi menegaskan bahwa campur tangan pemerintah yang cerdas dan strategis diperlukan untuk menciptakan fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memperbaiki struktur ekonomi dan distribusi pendapatan, pemerintah dapat berperan kunci dalam membentuk masa depan ekonomi sebuah negara menuju arah yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Institusional

Teori pertumbuhan ekonomi institusional memberikan sorotan mendalam terhadap peran krusial lembaga dan aturan dalam membentuk dinamika kebijakan ekonomi serta distribusi pendapatan yang

berkelanjutan. Sebagaimana dikemukakan oleh North (2020), fondasi teori ini meletakkan lembaga sebagai pilar utama yang menentukan arah pertumbuhan ekonomi suatu negara. Lembaga yang kuat dan efisien dianggap mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, serta memastikan distribusi pendapatan yang adil di tengah masyarakat. Pentingnya lembaga yang kuat dan efisien dalam konteks pertumbuhan ekonomi tidak bisa dilebih-lebihkan. Lembaga-lembaga tersebut berperan dalam menciptakan aturan main yang jelas dan berlaku adil bagi semua pelaku ekonomi. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi landasan yang kokoh bagi investasi dan aktivitas ekonomi yang produktif. Di sisi lain, lembaga yang lemah atau terinfeksi oleh korupsi justru dapat menjadi penghambat serius bagi pertumbuhan ekonomi. Kehadiran korupsi merusak struktur ekonomi dan menciptakan ketidakpastian yang merugikan bagi investor serta masyarakat secara keseluruhan.

Tidak hanya memengaruhi pertumbuhan ekonomi, kekuatan atau kelemahan lembaga juga berdampak signifikan terhadap distribusi pendapatan dalam masyarakat. Lembaga yang efisien cenderung menciptakan kesempatan yang merata bagi seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam perekonomian. Sebaliknya, lembaga yang lemah atau korup dapat menghasilkan ketimpangan yang tidak sehat dalam distribusi pendapatan, yang pada gilirannya dapat merusak kestabilan sosial dan politik. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang peran lembaga dan aturan dalam konteks ekonomi sangat penting bagi pembuat kebijakan, harus memastikan bahwa lembaga-lembaga yang ada tidak hanya kuat, tetapi juga transparan, akuntabel, dan berfungsi untuk kepentingan semua lapisan masyarakat.

4. Kritik terhadap Pendekatan Neoklasik dan Implikasinya pada Distribusi Pendapatan

Pendekatan neoklasik, yang telah menjadi landasan utama dalam analisis ekonomi, telah memberikan pemahaman yang cukup dalam mengenai aspek-aspek pertumbuhan ekonomi. Namun, seiring dengan kesuksesannya dalam menjelaskan fenomena-fenomena ekonomi, kritik terhadap pendekatan ini mulai muncul. Salah satu kritik utama terhadap pendekatan neoklasik adalah kurangnya perhatian terhadap distribusi pendapatan yang merata. Seperti yang dikemukakan oleh Stiglitz (2022), ketidakmerataan distribusi pendapatan tidak hanya menimbulkan masalah sosial, tetapi juga dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi yang signifikan. Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat berdampak negatif pada stabilitas ekonomi dan menyebabkan ketidakadilan sosial yang lebih dalam. Penelitian oleh Ostry *et al.* (2014) menunjukkan bahwa ketidakmerataan pendapatan dapat menjadi hambatan serius bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Fenomena ini memicu peningkatan ketegangan sosial, mengurangi daya beli masyarakat, dan merusak kepercayaan pada institusi ekonomi.

Ketidakstabilan ekonomi yang diakibatkan oleh distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, ketidakadilan sosial yang dihasilkan dapat menghambat mobilitas sosial dan meningkatkan disparitas dalam akses terhadap kesempatan ekonomi. Dengan demikian, distribusi pendapatan yang merata menjadi kunci untuk menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan dampak distribusi pendapatan dalam merancang kebijakan pembangunan

ekonomi. Langkah-langkah untuk meningkatkan distribusi pendapatan, seperti kebijakan redistribusi pajak dan pengeluaran publik yang lebih inklusif, perlu dipertimbangkan secara serius. Hanya dengan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih merata, kita dapat mengurangi ketidakstabilan ekonomi, memperkuat keadilan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi semua lapisan masyarakat.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh faktor kompleks seperti kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan keamanan. Kebijakan fiskal dan moneter yang tepat menciptakan lingkungan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dengan memicu investasi dan mendorong konsumsi. Stabilitas politik dan keamanan juga penting karena ketidakstabilan dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan menurunkan kepercayaan investor, menghambat pertumbuhan jangka panjang. Infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia merupakan pilar utama dalam pembangunan ekonomi. Infrastruktur yang kuat meningkatkan produktivitas dan daya saing, sementara adopsi teknologi canggih menciptakan peluang baru dan efisiensi dalam produksi. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan meningkatkan kualitas tenaga kerja, memicu produktivitas dan inovasi. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini berperan penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Gai *et al.*, 2023).

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, penting untuk mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan geografis suatu negara. Setiap negara memiliki

tantangan unik yang memengaruhi kemampuannya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan holistik diperlukan untuk memahami dan mengatasi faktor-faktor ini. Dengan memperhatikan berbagai aspek ini, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengembangkan strategi yang tepat untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

1. Kebijakan Ekonomi dan Kestabilan Makroekonomi

Kebijakan ekonomi dan stabilitas makroekonomi adalah landasan penting pertumbuhan suatu negara. Kebijakan inklusif dan pro-pertumbuhan mendukung investasi dan sektor vital. Pendekatan efektif melalui kebijakan fiskal yang mendukung infrastruktur dan pendidikan. Investasi infrastruktur, seperti transportasi dan energi, memperkuat pertumbuhan jangka panjang, sementara pendidikan meningkatkan produktivitas dan inovasi. Selain itu, kebijakan moneter yang bijaksana juga menjadi elemen krusial dalam mencapai stabilitas makroekonomi. Pengendalian inflasi dan suku bunga adalah dua aspek yang perlu diperhatikan secara cermat oleh otoritas moneter. Inflasi yang terlalu tinggi dapat menggerus daya beli masyarakat dan merusak stabilitas harga, sementara suku bunga yang tidak terkendali dapat membawa dampak negatif terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan moneter yang seimbang dan transparan sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan ekonomi.

Konsistensi dan prediktabilitas juga merupakan elemen krusial dalam keberhasilan kebijakan ekonomi. Perubahan yang terlalu sering atau tidak konsisten dapat menciptakan ketidakpastian di kalangan pelaku ekonomi, baik dari segi konsumen maupun investor. Ketidakpastian ini dapat menghambat keputusan investasi jangka

panjang dan memperlambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang kompleks, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang tepat dalam merancang dan melaksanakan kebijakan ekonomi yang dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan yang konsisten, progresif, dan berorientasi pada hasil akan berperan penting dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi negara dan masyarakatnya.

2. Infrastruktur dan Akses terhadap Sumber Daya

Infrastruktur yang memadai adalah fondasi vital bagi kemajuan ekonomi suatu negara. Jaringan transportasi yang efisien, sistem listrik yang handal, dan telekomunikasi yang canggih tidak hanya menopang kegiatan ekonomi, tetapi juga membuka peluang baru bagi pertumbuhan dan inovasi. Menurut *World Bank* (2014), infrastruktur yang baik memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi. Misalnya, dengan jalan raya yang baik, perusahaan dapat mengirimkan barang dengan lebih cepat dan murah, sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, infrastruktur yang solid juga membuka pintu bagi akses yang lebih luas terhadap pasar. Dengan adanya jaringan transportasi yang baik, wilayah yang sebelumnya terisolasi dapat terhubung dengan pasar regional dan global, membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Selain itu, akses yang diperluas terhadap sumber daya alam dan manusia juga merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Misalnya, dengan akses yang lebih baik terhadap tenaga kerja terampil, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tantangan besar dalam mengembangkan infrastruktur yang memadai adalah investasi yang diperlukan. Pembangunan infrastruktur seringkali membutuhkan investasi besar dalam jangka panjang, yang memerlukan kerja sama antara sektor publik dan swasta serta strategi kebijakan yang bijaksana. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga harus memperhitungkan aspek lingkungan agar tidak mengorbankan keberlanjutan jangka panjang demi keuntungan jangka pendek. Dengan demikian, infrastruktur yang memadai dan akses yang baik terhadap sumber daya merupakan pilar penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan sektor swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur yang memadai guna memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

3. Inovasi dan Teknologi

Peran inovasi dan teknologi tidak dapat dipandang sebelah mata dalam proses pembangunan ekonomi modern. Sejak zaman dahulu kala, kemajuan teknologi telah menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya membuka peluang baru, tetapi juga menjadi katalisator bagi peningkatan produktivitas di berbagai sektor ekonomi. Sebagaimana yang disoroti oleh Acemoglu & Robinson (2022), negara-negara yang mampu mengadopsi dan mengembangkan teknologi baru cenderung memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan di pasar global. Dalam konteks ini, inovasi bukanlah sekadar konsep teoritis; namun, ia berperan penting dalam mengubah wajah ekonomi suatu negara. Melalui inovasi, produk dan proses produksi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan,

memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan daya saing baik di dalam negeri maupun di pasar internasional. Terlebih lagi, teknologi sering kali menjadi pendorong utama di balik diversifikasi ekonomi, mengarah pada penciptaan sektor baru dan peluang investasi yang sebelumnya tidak terjangkau.

Peran inovasi dan teknologi dalam pembangunan ekonomi juga tidak dapat dipisahkan dari tantangan yang dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah memastikan akses yang merata terhadap teknologi bagi semua lapisan masyarakat dan wilayah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara inklusif. Selain itu, perlunya perhatian khusus terhadap regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan teknologi secara berkelanjutan, sambil mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan demikian, inovasi dan teknologi bukan hanya merupakan alat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga merupakan fondasi bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan secara sosial dan lingkungan.

4. Kondisi Sosial dan Kualitas Institusi

Kondisi sosial suatu negara memiliki dampak yang tak terbantahkan terhadap perkembangannya. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, kesehatan, dan stabilitas politik berperan kunci dalam menentukan produktivitas dan kreativitas penduduk. Menurut Amartya Sen (2019), individu yang memiliki akses terhadap pendidikan yang baik dan pelayanan kesehatan yang memadai cenderung lebih produktif dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang ada. Pendekatan ini memperkuat argumen bahwa investasi dalam sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan adalah kunci untuk mencapai

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, tidak hanya kondisi sosial individu yang penting, melainkan juga kualitas institusi secara keseluruhan. Institusi yang baik, seperti sistem keadilan hukum yang efektif, penanggulangan korupsi yang tegas, dan perlindungan hak kekayaan intelektual, berperan sentral dalam menciptakan iklim investasi yang stabil dan kondusif. Teori institusi oleh Douglas North (2020) menekankan bahwa keberadaan institusi-institusi yang kuat dan berfungsi dengan baik mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kehadiran institusi yang memfasilitasi perdagangan yang adil, menegakkan aturan hukum yang jelas, dan mendorong inovasi melalui perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi fondasi yang krusial bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Stabilitas politik juga merupakan faktor penting dalam pembentukan iklim investasi yang positif. Ketika sebuah negara mengalami stabilitas politik yang kuat dan terjamin, investor cenderung lebih percaya diri untuk melakukan investasi jangka panjang. Kepemimpinan yang stabil dan konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ekonomi yang berpihak pada pertumbuhan juga memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor. Kondisi sosial yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan stabilitas politik, serta kualitas institusi yang baik, merupakan fondasi yang tak tergantikan bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan memperkuat aspek-aspek ini, sebuah negara dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.



BAB III

DIMENSI KETIMPANGAN EKONOMI GLOBAL

Ketimpangan ekonomi global semakin menjadi fokus utama dalam era globalisasi ekonomi. Milanovic (2016) menunjukkan disparitas yang semakin melebar antara negara maju dan berkembang dalam indikator seperti pendapatan per kapita, kekayaan, dan akses terhadap layanan dasar. Faktor-faktor seperti kebijakan ekonomi, struktur sosial, dan sejarah kolonialisme mempengaruhi ketimpangan ini. Dampaknya tidak hanya terbatas pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada stabilitas sosial, yang dapat memicu konflik politik dan sosial.

A. Analisis Ketimpangan Ekonomi Antar Negara

Analisis Ketimpangan Ekonomi Antar Negara mendalam memperhatikan perbedaan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran di seluruh dunia. Dalam debat global tentang pembangunan dan keadilan sosial, ketimpangan ekonomi menjadi fokus utama. Dengan memeriksa pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, pengangguran, dan akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, analisis dapat menggambarkan pola-pola dinamika ekonomi antarnegara yang signifikan.

Pendekatan umum dalam menganalisis ketimpangan ekonomi adalah melalui penggunaan indikator seperti Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) atau Indeks Ketimpangan Gini. IPM mengevaluasi kemajuan suatu negara berdasarkan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan per kapita, sementara Indeks Ketimpangan Gini mengukur distribusi pendapatan di dalam negara tersebut. Analisis data ini memungkinkan para peneliti mengidentifikasi negara-negara dengan ketimpangan ekonomi signifikan dan mengungkap faktor-faktor penyebabnya.

Analisis ketimpangan ekonomi melibatkan pemahaman faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah, investasi asing, perdagangan internasional, dan stabilitas politik yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi negara. Dengan memahami hubungan antara faktor-faktor ini, para analis dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antar negara dan meningkatkan kesejahteraan global. Ini krusial dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif secara global.

1. Pendapatan dan Kekayaan

Pendapatan dan kekayaan adalah dua dimensi utama yang menyebabkan ketimpangan ekonomi antar negara menjadi semakin memburuk. Menurut data dari *World Bank* pada tahun 2019, negara-negara di seluruh dunia menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam pendapatan per kapita dan distribusi kekayaan. Negara-negara maju cenderung memiliki pendapatan dan kekayaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Hal ini menciptakan kesenjangan ekonomi yang besar. Perbedaan pendapatan yang mencolok antara negara-negara maju dan berkembang menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan ekonomi. Negara-negara maju seringkali memiliki sektor industri yang lebih maju, infrastruktur yang lebih baik, dan akses

yang lebih luas terhadap teknologi modern. Sementara itu, negara-negara berkembang sering kali terperangkap dalam siklus kemiskinan yang sulit untuk keluar, dengan banyak penduduknya bekerja dalam sektor informal dengan upah rendah dan tanpa jaminan sosial.

Pada skenario ini, distribusi kekayaan juga berperan penting. Kekayaan yang tidak merata di antara individu dan kelompok dalam suatu negara dapat mengakibatkan ketidakadilan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Orang-orang kaya cenderung memiliki akses yang lebih besar terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan peluang bisnis, sementara orang-orang miskin seringkali terbatas dalam hal-hal tersebut. Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang disebabkan oleh disparitas pendapatan dan kekayaan ini, diperlukan upaya bersama antara negara-negara maju dan berkembang. Ini termasuk kebijakan yang mendukung distribusi yang lebih adil dari sumber daya ekonomi, investasi dalam pendidikan dan pelatihan, serta pembangunan infrastruktur yang merata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa langkah-langkah ini akan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi global dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua warga dunia.

2. Akses terhadap Layanan Dasar

Ketimpangan ekonomi antar negara tidak hanya mengakibatkan disparitas dalam pendapatan dan kekayaan, tetapi juga tercermin dalam akses terhadap layanan dasar. Pertama, dalam hal pendidikan, negara-negara maju sering memiliki sistem pendidikan yang lebih berkualitas dan luas, dengan akses yang lebih merata bagi seluruh populasi. Sebaliknya, negara-negara berkembang sering mengalami tantangan dalam menyediakan akses pendidikan yang setara bagi semua warga,

karena terkendala oleh infrastruktur yang kurang memadai dan keterbatasan sumber daya. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakmerataan dalam pengetahuan dan keterampilan, yang dapat memperkuat ketimpangan ekonomi. Selanjutnya, ketimpangan terlihat dalam akses terhadap layanan kesehatan. Negara-negara maju biasanya memiliki sistem kesehatan yang lebih berkembang dan mudah diakses oleh penduduknya, sementara negara-negara berkembang sering menghadapi kendala dalam menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua warganya. Disparitas ini dapat menyebabkan perbedaan besar dalam tingkat kesehatan antara negara-negara tersebut, dengan konsekuensi yang signifikan terhadap kualitas hidup dan harapan hidup penduduk.

Akses terhadap sanitasi juga menjadi bagian dari ketimpangan ekonomi antar negara. Negara-negara maju umumnya memiliki infrastruktur sanitasi yang lebih baik, dengan akses yang lebih luas terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai. Di sisi lain, negara-negara berkembang sering kali masih menghadapi masalah sanitasi yang buruk, seperti kurangnya akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak. Hal ini dapat menyebabkan penyebaran penyakit yang lebih luas dan meningkatkan risiko kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Ketimpangan ekonomi antar negara tercermin dalam ketidakmerataan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi. Disparitas ini dapat memperburuk perbedaan dalam kualitas hidup antara negara-negara maju dan berkembang, serta menghambat upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan secara global.

3. Perbedaan dalam Peluang Ekonomi

Perbedaan dalam peluang ekonomi merupakan fenomena yang dapat menggambarkan ketimpangan ekonomi antar negara. Negara-negara maju seringkali memiliki struktur ekonomi yang lebih maju dan diversifikasi yang lebih besar. Dengan adanya berbagai sektor industri yang berkembang, warga negara di negara maju memiliki lebih banyak peluang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Misalnya, tersedianya pekerjaan yang beragam dan kemungkinan untuk mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar memberikan kesempatan yang lebih besar bagi individu untuk mencapai kesuksesan ekonomi. Namun, di sisi lain, negara-negara berkembang seringkali terbatas oleh struktur ekonomi yang kurang beragam dan tergantung pada sektor tertentu. Hal ini dapat menyebabkan ketergantungan yang tinggi pada sumber daya alam atau sektor industri tertentu, yang rentan terhadap fluktuasi harga dan permintaan global. Selain itu, akses yang terbatas terhadap pasar global yang menguntungkan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidaksetaraan dalam peluang ekonomi antara negara maju dan berkembang.

Penting bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan strategi diversifikasi ekonomi yang memungkinkan untuk menciptakan lebih banyak peluang bagi penduduknya. Hal ini dapat mencakup investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan berbagai sektor ekonomi. Selain itu, upaya untuk membuka akses ke pasar global yang adil dan berkelanjutan juga dapat membantu negara-negara berkembang untuk memperluas peluang ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi antar negara. Dengan

demikian, perbedaan dalam peluang ekonomi adalah salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam upaya mengatasi ketimpangan ekonomi global.

4. Peran Globalisasi

Peran globalisasi dalam mempengaruhi ketimpangan ekonomi antar negara tidak dapat diabaikan. Globalisasi telah membuka pintu bagi pertumbuhan ekonomi dan integrasi pasar di seluruh dunia. Namun, dampaknya tidak merata, terutama antara negara-negara maju dan berkembang. Negara-negara maju sering mendominasi proses globalisasi dan cenderung mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada negara-negara berkembang. Ini dapat memperburuk ketimpangan ekonomi. Globalisasi cenderung menguntungkan negara-negara maju yang memiliki infrastruktur yang lebih maju, modal manusia yang lebih terlatih, dan akses yang lebih besar terhadap teknologi. Negara-negara ini dapat lebih mudah berintegrasi ke dalam pasar global dan memanfaatkan peluang perdagangan internasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, negara-negara berkembang seringkali kesulitan mengejar ketertinggalan karena terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, keterampilan tenaga kerja, dan akses terhadap modal.

Globalisasi juga dapat meningkatkan ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan di dalam masing-masing negara. Meskipun globalisasi dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas, namun pada saat yang sama, dapat menyebabkan konsekuensi negatif seperti peningkatan disparitas pendapatan. Pekerja dengan keterampilan dan pendidikan tinggi cenderung mendapatkan manfaat yang lebih besar dari globalisasi, sementara pekerja yang kurang

terampil dan kurang teredukasi bisa terpinggirkan dan mengalami tekanan upah yang lebih besar. Peran globalisasi dalam ketimpangan ekonomi antar negara menekankan perlunya mengurangi kesenjangan dalam manfaatnya. Negara-negara maju harus memastikan distribusi manfaat yang adil dengan memperkuat kerja sama internasional dan mengurangi hambatan perdagangan yang tidak adil. Negara berkembang perlu meningkatkan kemampuan dengan investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan pembangunan kapasitas. Dengan demikian, globalisasi bisa menjadi alat untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antar negara, bukan memperburuknya.

B. Ketimpangan dalam Distribusi Pendapatan dan Kekayaan

Ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan telah menjadi isu yang semakin memprihatinkan di banyak negara di seluruh dunia. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian kecil populasi memiliki sebagian besar kekayaan dan pendapatan, sementara sebagian besar populasi hidup dalam kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Ketidakseimbangan ini dapat memiliki dampak yang serius terhadap stabilitas sosial, kemajuan ekonomi, dan kesetaraan dalam masyarakat. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan dapat mengakibatkan ketidakadilan sosial. Ketika sebagian kecil orang mendapatkan pendapatan yang sangat besar sementara sebagian besar orang lainnya hidup dalam kemiskinan atau kesulitan finansial, ini bisa menciptakan ketidakpuasan dan ketegangan sosial. Hal ini dapat memicu konflik antarkelompok, meningkatkan tingkat kejahatan, dan bahkan mengancam stabilitas politik suatu negara.

Ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan juga dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Ini dapat menciptakan lingkungan di mana orang-orang yang kurang mampu memiliki kesempatan yang lebih terbatas untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai potensi penuh. Akibatnya, kesenjangan dalam hal kesehatan, pendidikan, dan kemampuan ekonomi antarindividu dan kelompok dapat semakin memperdalam kesenjangan sosial dan menghambat pembangunan berkelanjutan.

1. Disparitas Pendapatan Antar Individu dan Kelompok

Disparitas pendapatan antara individu dan kelompok merupakan masalah serius dalam banyak masyarakat. Data dari Ostry *et al.* (2014) menegaskan bahwa ketimpangan ekonomi telah menjadi isu yang semakin mendesak dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu aspek yang paling mencolok dari disparitas ini adalah fakta bahwa sebagian kecil populasi memiliki kontrol yang signifikan atas sebagian besar pendapatan nasional, sementara mayoritas penduduk hanya menerima porsi yang kecil. Dampak dari ketimpangan ini sangat merugikan, karena menciptakan kesenjangan sosial yang besar di antara masyarakat. Kesenjangan ini juga dapat memperburuk masalah sosial yang ada, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta peningkatan tingkat kejahatan. Selain itu, ketimpangan ekonomi juga dapat mengancam stabilitas sosial dan politik suatu negara. Peningkatan ketegangan dan ketidakpuasan sosial dapat mendorong timbulnya protes massal, kerusuhan, atau bahkan konflik bersenjata, yang semuanya berpotensi merusak kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Ketidakadilan dalam distribusi pendapatan juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketika sebagian besar penduduk hanya menerima pendapatan yang kecil, daya beli menjadi terbatas, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan konsumsi dan investasi dalam perekonomian. Akibatnya, potensi pertumbuhan ekonomi negara tersebut mungkin tidak tercapai sepenuhnya, karena tidak adanya partisipasi ekonomi yang merata dari seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memperbaiki disparitas pendapatan, langkah-langkah kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan diperlukan. Ini bisa termasuk kebijakan redistribusi pendapatan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, pembangunan infrastruktur sosial, serta promosi peluang ekonomi yang adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa melalui tindakan seperti itu, ketimpangan pendapatan dapat dikurangi dan masyarakat dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Akses terhadap Kekayaan dan Peluang Ekonomi

Ketimpangan ekonomi yang termanifestasi dalam disparitas distribusi kekayaan dan akses terhadap peluang ekonomi merupakan tantangan serius yang dihadapi banyak negara. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan perbedaan dalam jumlah aset yang dimiliki oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat, tetapi juga mencerminkan kesenjangan yang mendalam dalam kemampuan individu untuk mengakses peluang ekonomi yang sama. Sebagai contoh, sebagian kecil dari populasi seringkali menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi dan memiliki akses yang lebih besar terhadap peluang investasi dan pengembangan bisnis. Ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan ini

dapat memperburuk masalah sosial seperti kemiskinan dan ketidakstabilan sosial. Kondisi di mana sebagian besar penduduk hanya memiliki akses terbatas terhadap kekayaan dan peluang ekonomi bisa menjadi hambatan serius bagi mobilitas sosial dan pengentasan kemiskinan. Tanpa akses yang adil dan merata terhadap kesempatan ekonomi, sulit bagi individu dari lapisan masyarakat yang kurang beruntung untuk meningkatkan taraf hidup atau meraih kesuksesan secara ekonomi.

Dampak dari ketimpangan ekonomi ini juga dapat terasa dalam bentuk ketegangan sosial dan ketidakstabilan politik. Perasaan ketidakpuasan dan ketidakadilan dari kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi dapat menyebabkan konflik antarkelompok dan meningkatkan risiko ketidakstabilan politik. Oleh karena itu, penanganan ketidaksetaraan ekonomi menjadi sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, stabil, dan berkelanjutan secara ekonomi. Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, diperlukan kebijakan yang dapat meningkatkan akses terhadap kesempatan ekonomi, seperti pendidikan yang berkualitas, pelatihan kerja, dan dukungan untuk pengembangan usaha kecil dan menengah. Selain itu, perlunya regulasi yang ketat terhadap praktik monopoli dan oligopoli serta kebijakan redistribusi yang adil dalam distribusi kekayaan juga menjadi kunci untuk menciptakan kesetaraan ekonomi yang lebih baik.

3. Ketidaksetaraan dalam Akses terhadap Layanan dan Fasilitas Publik

Ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan dan fasilitas publik menjadi salah satu cerminan utama dari ketimpangan ekonomi yang ada di masyarakat. Hal ini tercermin dalam disparitas yang jelas

antara individu dan kelompok yang berada dalam posisi sosial-ekonomi yang tinggi dengan yang berada di lapisan bawah masyarakat. Misalnya, dalam sektor pendidikan, anak-anak dari keluarga berpenghasilan tinggi cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan berkualitas, seperti sekolah swasta atau bimbingan belajar, sementara anak-anak dari keluarga miskin mungkin hanya dapat mengandalkan sekolah negeri yang sering kali kurang mendapat perhatian dan sumber daya yang memadai.

Gambar 2. Ketimpangan Fasilitas Pendidikan



Sumber: *Republica*

Pada hal kesehatan, individu yang mampu secara finansial dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk fasilitas perawatan medis yang modern dan obat-obatan yang mahal. Di sisi lain, yang kurang mampu sering kali harus menghadapi hambatan dalam memperoleh perawatan medis yang layak akibat keterbatasan finansial, serta kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan yang memadai. Tidak hanya dalam pendidikan dan kesehatan, tetapi juga dalam infrastruktur umum seperti jalan, transportasi, dan sanitasi,

ketidaksetaraan dalam akses masih menjadi masalah yang serius. Wilayah perkotaan atau daerah yang padat penduduk mungkin lebih cenderung mendapat perhatian dan investasi dalam infrastruktur daripada wilayah pedesaan atau daerah terpencil, menyebabkan kesenjangan yang semakin membesar antara keduanya.

4. Dampak Negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Sosial

Ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan telah terbukti sebagai salah satu faktor yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara. Ketidaksetaraan yang tinggi dapat menghambat mobilitas sosial, sehingga individu yang berada di lapisan bawah sulit untuk naik ke lapisan atas dalam struktur sosial. Hal ini dapat mengurangi motivasi untuk meningkatkan keterampilan dan pendidikan, serta membatasi akses terhadap peluang ekonomi yang lebih baik. Dampak lain dari ketimpangan ekonomi adalah penurunan daya beli masyarakat. Ketika sebagian besar pendapatan terkonsentrasi pada segmen kecil dari populasi, maka permintaan konsumen menjadi terbatas karena hanya sedikit orang yang mampu membeli barang dan jasa. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dapat melambat karena kurangnya dorongan dari pasar konsumen yang kuat.

Ketimpangan ekonomi juga dapat menciptakan ketidakstabilan politik. Ketidakpuasan sosial akibat kesenjangan yang tajam antara kelas-kelas sosial dapat memicu protes dan demonstrasi, bahkan konflik berskala besar. Ini dapat mengganggu kegiatan ekonomi, mengurangi investasi asing, dan merusak citra negara di mata dunia internasional. Oleh karena itu, penanganan ketimpangan ekonomi menjadi sangat penting dalam upaya memastikan pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan dan stabilitas sosial. Langkah-langkah untuk meningkatkan distribusi pendapatan dan kekayaan, seperti pajak yang adil, perlindungan hak-hak buruh, akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan pelatihan, serta kebijakan inklusif lainnya, diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih seimbang dan stabil secara sosial dan ekonomi.

C. Dampak Ketimpangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Global

Ketimpangan ekonomi global semakin menjadi fokus dalam diskusi internasional. Perbedaan pendapatan antar negara maju dan berkembang semakin melebar, menghambat pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. Negara-negara berkembang terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diatasi karena kesulitan mengejar ketertinggalan. Dampaknya merugikan stabilitas global dan mendorong perlunya upaya kolaboratif untuk mengatasi ketimpangan ini demi pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, dampak ketimpangan ekonomi juga dapat dirasakan secara global melalui ketidakstabilan dan ketegangan politik antarnegara. Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan dapat menciptakan ketidakpuasan sosial yang pada gilirannya dapat memicu konflik dan kerusuhan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Misalnya, ketidaksetaraan yang tinggi dapat menjadi pemicu utama untuk migrasi massal dan konflik bersenjata, yang pada akhirnya dapat mengganggu perdamaian dan stabilitas global.

Upaya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi menjadi sangat penting dalam menciptakan dunia yang lebih stabil dan sejahtera bagi semua negara dan individu. Langkah-langkah kolaboratif antarnegara, termasuk bantuan pembangunan, kerja sama perdagangan yang adil, dan

investasi dalam pembangunan manusia, perlu ditingkatkan untuk mengatasi akar masalah ketimpangan ini. Hanya dengan upaya bersama dari seluruh komunitas global, kita dapat membangun masyarakat global yang lebih adil, aman, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Merata

Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh banyak negara di dunia. Ketidaksetaraan ekonomi yang tinggi dapat menciptakan kesenjangan antara kelompok-kelompok masyarakat, membatasi akses terhadap peluang ekonomi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut penelitian oleh Ostry *et al.* (2014), ketimpangan ekonomi yang tinggi cenderung menghambat pertumbuhan jangka panjang dengan membatasi mobilitas sosial dan akses terhadap kesempatan ekonomi bagi sebagian besar masyarakat. Selain itu, ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan juga dapat mengurangi daya beli masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat mempengaruhi permintaan agregat dan menghambat pertumbuhan ekonomi, karena jika sebagian besar pendapatan dan kekayaan terkonsentrasi di tangan sedikit orang, maka konsumsi dan investasi akan cenderung terhambat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata tidak hanya merugikan bagi kelompok-kelompok yang kurang mampu, tetapi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Gambar 3. Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Merata



Sumber: *NU Online*

Ketidaksetaraan ekonomi yang tinggi juga dapat menciptakan ketegangan sosial dan politik dalam masyarakat. Kesempatan yang tidak merata dan perasaan ketidakpuasan dapat menyebabkan ketegangan antara kelompok-kelompok ekonomi yang berbeda, serta meningkatkan risiko konflik sosial. Hal ini dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial suatu negara, yang pada gilirannya dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai langkah, termasuk kebijakan redistribusi pendapatan dan kekayaan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta promosi kesetaraan kesempatan dalam pasar kerja. Dengan demikian, melalui upaya-upaya ini, diharapkan dapat tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan bagi semua lapisan masyarakat.

2. Ketidakstabilan Sosial dan Politik

Ketidakstabilan sosial dan politik sering kali menjadi konsekuensi yang serius dari ketimpangan ekonomi yang tinggi dalam suatu negara. Ketidaksetaraan yang besar dalam distribusi kekayaan dan peluang ekonomi dapat menciptakan ketegangan sosial di antara berbagai kelompok masyarakat. Menurut Stiglitz (2022), ketidaksetaraan yang signifikan dapat memicu konflik internal, demonstrasi, atau bahkan kerusuhan, karena kelompok-kelompok yang merasa diperlakukan tidak adil cenderung melawan sistem yang mendukung ketidaksetaraan tersebut. Konflik sosial yang disebabkan oleh ketimpangan ekonomi dapat merusak kohesi sosial suatu masyarakat, mengancam perdamaian dan keamanan internal negara. Demonstrasi dan kerusuhan yang timbul sebagai akibat dari ketidaksetaraan ekonomi juga dapat menimbulkan kerugian materi dan fisik yang serius bagi individu dan infrastruktur negara.

Ketidaksetaraan yang ekstrem juga bisa memperburuk ketidakpercayaan terhadap institusi politik. Ketika kelompok-kelompok yang kurang beruntung merasa bahwa sistem politik tidak lagi mewakili kepentingan, mungkin kehilangan keyakinan pada legitimasi pemerintah. Hal ini dapat meningkatkan risiko ketidakstabilan politik, termasuk dalam bentuk protes massa, pemboikotan, atau bahkan pemberontakan terhadap pemerintahan yang dianggap tidak adil. Dengan demikian, ketidakstabilan sosial dan politik merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan suatu negara, dan ketimpangan ekonomi yang tinggi seringkali menjadi faktor pendorong utamanya. Untuk mencegah terjadinya konflik dan ketidakstabilan, penting bagi pemerintah dan institusi terkait untuk mengambil langkah-langkah yang bertujuan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan memperbaiki sistem

yang memungkinkan kesempatan yang lebih merata bagi semua warga negara.

3. Ketimpangan Menghambat Inovasi dan Produktivitas

Ketimpangan ekonomi adalah fenomena yang seringkali menghambat inovasi dan produktivitas dalam suatu masyarakat. Dampaknya dapat sangat merugikan, seperti yang dicatat oleh Milanovic (2016), dimana akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi bagi sebagian besar populasi dapat menyulitkan masyarakat untuk menghasilkan inovasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Ketidakmampuan untuk mengakses pendidikan yang berkualitas, misalnya, bisa menghalangi individu untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam perekonomian modern yang didorong oleh inovasi. Dalam konteks ini, ketidaksetaraan akses terhadap layanan kesehatan juga menjadi kendala serius. Orang yang tidak memiliki akses yang memadai ke perawatan kesehatan sering kali terbatas dalam kapasitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi secara produktif, mungkin terbatas oleh masalah kesehatan yang dapat menghambat mobilitas dan produktivitas. Dengan demikian, kesenjangan ekonomi dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam kesehatan, yang pada gilirannya dapat memperburuk ketimpangan ekonomi, menciptakan spiral negatif yang sulit dipatahkan.

Kurangnya peluang ekonomi bagi mayoritas penduduk dapat menghambat inovasi dan produktivitas. Ketika akses ke lapangan kerja terbatas, potensi inovasi terkekang. Banyak bakat tidak dimanfaatkan karena kurangnya kesempatan. Ini tidak hanya merugikan individu secara langsung, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memperbesar kesenjangan antara negara maju dan

berkembang. Ketimpangan ekonomi bukan hanya masalah sosial, tetapi juga menghambat kemajuan ekonomi dan inovasi. Untuk masyarakat inklusif dan produktif, pemerintah harus memperbaiki akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Langkah-langkah ini harus mendukung kesetaraan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya. Dengan demikian, lingkungan yang memperkuat inovasi dan produktivitas yang berkelanjutan dapat terwujud.

4. Dampak Global terhadap Stabilitas Ekonomi

Ketimpangan ekonomi tidak hanya berdampak besar secara nasional, tetapi juga secara langsung mempengaruhi stabilitas ekonomi global. Pertumbuhan yang cepat di beberapa negara, sementara yang lain tertinggal, menciptakan ketidakseimbangan dalam perekonomian dunia. Ini, seperti yang disoroti oleh Milanovic (2016), meningkatkan risiko krisis keuangan global. Ketika negara-negara berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru, yang lain menghadapi stagnasi atau depresi ekonomi, menciptakan ketidakstabilan yang dapat menular ke pasar global. Ketidaksetaraan distribusi pendapatan dan kekayaan berpotensi mengganggu keseimbangan perdagangan internasional. Negara-negara dengan ketidaksetaraan tinggi cenderung memiliki permintaan domestik rendah karena pendapatan terkonsentrasi pada segelintir orang kaya, sementara mayoritas mengalami keterbatasan daya beli. Ini mendorong ketergantungan pada ekspor untuk pertumbuhan ekonomi, menciptakan ketidakseimbangan perdagangan dan meningkatkan risiko ketidakstabilan global.

Ketidaksetaraan ekonomi juga dapat mempengaruhi arus investasi asing. Negara-negara dengan tingkat ketidaksetaraan yang tinggi mungkin dihadapkan pada risiko politik dan sosial yang lebih

tinggi, yang dapat membuat investor asing enggan untuk menanamkan modalnya. Akibatnya, negara-negara tersebut mungkin mengalami defisit investasi yang memperlambat pertumbuhan ekonomi, sementara negara-negara dengan tingkat ketidaksetaraan yang lebih rendah mungkin menarik lebih banyak investasi asing, menciptakan lebih banyak kesempatan ekonomi dan meningkatkan stabilitas regional. Ketidaksetaraan ekonomi bukan hanya masalah lokal, tetapi juga memiliki konsekuensi yang luas dan signifikan pada stabilitas ekonomi global. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya kerja sama internasional yang kuat untuk mempromosikan inklusivitas ekonomi dan memperkecil kesenjangan antara negara-negara kaya dan miskin serta antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

BAB IV

MODEL PEMBANGUNAN EKONOMI

Model pembangunan ekonomi adalah fondasi krusial bagi negara-negara dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan mengatasi ketimpangan ekonomi. Model neoklasik menekankan investasi dalam modal fisik dan manusia, serta peran pasar dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien. Sementara itu, model strukturalis membahas intervensi pemerintah untuk memperbaiki ketidaksetaraan ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor tertentu dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Model pembangunan manusia membahas investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan sumber daya manusia berkualitas (Sen, 2019). Dengan memperbaiki kualitas manusia, negara dapat menciptakan modal manusia yang produktif dan inovatif, mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang secara berkelanjutan.

A. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi

Pemerintah memegang peran krusial dalam mengarahkan pembangunan ekonomi, dengan kebijakan dan tindakan yang tepat mampu mendorong pertumbuhan berkelanjutan serta mengurangi ketimpangan. *World Bank* menekankan tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi pelaku usaha, memperkuat infrastruktur, dan menyediakan layanan publik berkualitas. Melalui kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah mengatur pengeluaran negara,

pendapatan, serta mengontrol inflasi untuk mencapai stabilitas ekonomi yang diinginkan. Pemerintah memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi dengan menciptakan regulasi yang jelas dan efisien. Menurut OECD, peraturan yang transparan dan mudah dipahami dapat mempercepat proses bisnis, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendorong investasi baik domestik maupun internasional. Selain itu, dukungan dan insentif dari pemerintah kepada sektor-sektor strategis seperti manufaktur berbasis teknologi tinggi dan sektor jasa inovatif juga krusial untuk pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah bertanggung jawab tidak hanya terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga inklusifitasnya, dengan memastikan manfaatnya merata pada seluruh lapisan masyarakat. Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), kebijakan pro-pembangunan manusia, seperti pendidikan dan kesehatan berkualitas, serta akses ekonomi yang adil bagi semua warga negara, harus diadopsi. Hal ini tidak hanya menjaga stabilitas sosial, tetapi juga mengurangi disparitas ekonomi yang berpotensi mengganggu keberlanjutan pembangunan.

1. Kebijakan Fiskal dan Moneter

Kebijakan fiskal dan moneter adalah dua alat utama yang dimiliki pemerintah untuk mengatur kondisi ekonomi suatu negara. Kebijakan fiskal melibatkan pengeluaran dan penerimaan pemerintah, seperti perencanaan anggaran dan pengenaan pajak, yang dapat memengaruhi tingkat pengeluaran dan investasi dalam ekonomi (Todaro & Smith, 2015). Di sisi lain, kebijakan moneter berkaitan dengan pengaturan suku bunga dan pengendalian jumlah uang beredar untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi (Blanchard *et al.*, 2023).

Gambar 4. *Fiscal and Monetary Policy*



Kedua kebijakan ini bekerja bersama-sama untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Misalnya, saat pemerintah menghadapi resesi ekonomi, dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk meningkatkan pengeluaran melalui program stimulus atau penurunan pajak, sehingga merangsang aktivitas ekonomi. Pada saat yang sama, bank sentral dapat menurunkan suku bunga untuk mendorong pinjaman dan investasi. Namun, penting bagi pemerintah untuk menggunakan kedua kebijakan ini secara bijaksana dan seimbang. Terlalu banyak stimulus fiskal atau penurunan suku bunga yang terlalu besar dapat menyebabkan inflasi yang tidak terkendali atau bahkan memicu gelembung ekonomi. Sebaliknya, kebijakan yang terlalu ketat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan pengangguran meningkat.

2. Pengaturan dan Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah memiliki tanggung jawab penting dalam pengaturan dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi. Infrastruktur yang memadai, seperti jaringan transportasi, energi, dan telekomunikasi, merupakan elemen kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*World Bank*, 2014). Dengan mengatur infrastruktur yang

efisien dan handal, pemerintah dapat menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pemerintah memiliki peran krusial dalam memastikan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur yang efisien untuk mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan produktivitas. Langkah-langkah regulasi yang tepat dapat memastikan investasi infrastruktur berkelanjutan dan menguntungkan bagi masyarakat serta bisnis (*World Bank*, 2014). Dengan regulasi yang baik, pemerintah dapat mendorong partisipasi sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur, mengurangi beban fiskal, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan proyek infrastruktur.

Penting bagi pemerintah untuk tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik saja, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek seperti aksesibilitas, keberlanjutan lingkungan, dan inklusivitas sosial dalam pengembangan infrastruktur (*World Bank*, 2014). Dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan berbagai pihak, pemerintah dapat memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun tidak hanya meningkatkan produktivitas ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang luas bagi masyarakat. Dengan demikian, melalui pengaturan yang efektif dan pembangunan infrastruktur yang terencana dengan baik, pemerintah dapat berperan krusial dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (*World Bank*, 2014). Dengan fondasi infrastruktur yang kokoh, ekonomi dapat tumbuh secara stabil dan memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat.

3. Regulasi dan Perlindungan Hak

Regulasi dan perlindungan hak merupakan pilar utama dalam sistem ekonomi suatu negara. Pemerintah bertanggung jawab untuk

memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan lancar sambil menjaga hak individu dan kepentingan masyarakat. Sesuai dengan teori Acemoglu & Robinson (2022), regulasi yang cermat mampu menciptakan lingkungan yang adil bagi semua pemangku kepentingan ekonomi. Misalnya, lembaga pengatur keuangan dapat menetapkan aturan untuk menghindari monopoli dan melindungi konsumen dari risiko keuangan yang berlebihan, menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Perlindungan hukum adalah pondasi vital dalam pembentukan lingkungan ekonomi yang stabil dan dapat dipercaya. Dengan perlindungan hukum yang kuat, investor merasa yakin untuk menanamkan modalnya di berbagai sektor. Ini merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, hak-hak individu seperti kepemilikan properti dan hak kontrak terjaga, memastikan keadilan dan stabilitas dalam aktivitas ekonomi.

Implementasi regulasi dan perlindungan hukum tidak selalu berjalan mulus. Terkadang, kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat menjadi kontroversial dan menimbulkan perselisihan di antara berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, lemahnya penegakan hukum juga dapat melemahkan efektivitas dari regulasi yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa regulasi dan perlindungan hukum yang diberlakukan benar-benar efektif dan menguntungkan bagi semua pihak. Dalam konteks globalisasi dan perubahan cepat dalam teknologi dan ekonomi, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap regulasi dan perlindungan hukum yang ada. Hal ini agar tetap relevan dan dapat menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul dalam dunia ekonomi yang terus berkembang. Dengan demikian, pemerintah dapat berperan

yang efektif dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat. (Acemoglu & Robinson, 2022)

4. Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Manusia

Pemerintah memiliki peran yang krusial dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas manusia. Melalui berbagai kebijakan dan program, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu negara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sen (2019), salah satu cara yang efektif adalah melalui kebijakan pendidikan yang memastikan akses dan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di pasar kerja global. Selain pendidikan, pelatihan kerja juga menjadi fokus penting pemerintah dalam upaya peningkatan kapasitas manusia. Dengan menyediakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, pemerintah dapat membantu individu meningkatkan keterampilan dan daya saing. Hal ini juga sejalan dengan upaya menciptakan lapangan kerja yang produktif dan berkualitas.

Tidak hanya dalam bidang pendidikan dan pelatihan kerja, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Sebagaimana disebutkan oleh Sen (2019), sumber daya manusia yang sehat merupakan aset berharga bagi pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan yang memastikan semua warga memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Dengan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas manusia yang efektif, pemerintah dapat

menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, investasi dalam pembangunan sumber daya manusia merupakan langkah strategis yang dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan. (Sen, 2019).

B. Model Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Ini melibatkan mempertimbangkan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan. Menurut *World Commission on Environment and Development* (1987), tujuan pembangunan berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Aspek ekonomi pembangunan berkelanjutan menekankan penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan distribusi kekayaan yang adil, sambil memperhatikan kesejahteraan sosial yang menyeluruh. Hal ini memerlukan integrasi teknologi dan praktik ramah lingkungan serta pelestarian ekosistem. Dengan pendekatan ini, pembangunan ekonomi berkelanjutan memastikan akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya, sambil menjaga sumber daya alam untuk masa depan. (70 kata)

Pentingnya pembangunan ekonomi berkelanjutan semakin diakui global. Kebijakan yang menyatukan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan membentuk masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif. Kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah, swasta, masyarakat, dan lembaga internasional, krusial untuk mencapai tujuan pembangunan

berkelanjutan. Langkah ini memastikan kesejahteraan generasi masa kini dan mendatang secara efektif dan adil.

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan menjadi fokus utama model pembangunan, mengejar keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Blanchard *et al.* (2023) menekankan pentingnya memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang, tanpa mengorbankan generasi mendatang. Ini menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat, bukan hanya peningkatan output dan pendapatan. Salah satu aspek utama dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki dan dapat mengancam keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang. Dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, model pembangunan yang berkelanjutan bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya alam dapat dikelola secara bijaksana untuk kepentingan generasi masa depan (Blanchard *et al.*, 2023).

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga memperhatikan kesejahteraan sosial. Hal ini mencakup peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang layak bagi seluruh masyarakat. Dengan memperhatikan dimensi sosial ini, model pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berusaha untuk menciptakan kesetaraan dan inklusi dalam proses pembangunan, sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Blanchard *et al.*, 2023). Dengan demikian, model

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan menegaskan pentingnya memperhitungkan aspek lingkungan dan sosial dalam proses pertumbuhan ekonomi. Melalui pendekatan ini, diharapkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat berlangsung secara berkelanjutan, memperbaiki kesejahteraan manusia tanpa merusak lingkungan dan menciptakan kesenjangan sosial. (Blanchard *et al.*, 2023).

2. Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Sosial

Di era globalisasi, pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial menjadi prioritas utama. Amartya Sen menegaskan perlunya memperhatikan aspek kemanusiaan seperti akses pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya dalam pembangunan yang berkelanjutan (Sen, 2019). Investasi dalam pembangunan manusia tidak hanya meningkatkan produktivitas masyarakat, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan terdidik, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi dalam pembangunan manusia tidak hanya akan memberikan dampak positif secara ekonomi, tetapi juga akan meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, kita dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan mobilitas sosial dalam masyarakat. Hal ini akan membantu menciptakan kesempatan yang lebih merata bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang atau status ekonomi (Sen, 2019).

Pembangunan manusia juga berdampak langsung pada pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan memiliki masyarakat yang lebih sehat dan terdidik, negara dapat menciptakan kekuatan kerja yang

lebih berkualitas dan inovatif. Hal ini akan membantu meningkatkan daya saing negara dalam pasar global serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang (Sen, 2019). Dengan demikian, pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial harus menjadi prioritas utama bagi setiap negara dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi dalam aspek-aspek kemanusiaan ini tidak hanya akan membawa manfaat ekonomi, tetapi juga akan menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan secara sosial. Sehingga, pembangunan yang holistik dan terpadu merupakan kunci dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua individu dan generasi mendatang (Sen, 2019).

3. Penggunaan Sumber Daya yang Berkelanjutan

Penggunaan sumber daya yang berkelanjutan menjadi kunci dalam model pembangunan ekonomi modern. Menurut *World Bank* (2014), pendekatan ini menitikberatkan pada pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, dan upaya pengurangan limbah serta polusi. Dengan mengadopsi strategi ini, kita dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam yang terbatas. Pentingnya penggunaan energi terbarukan tidak dapat dilebih-lebihkan. Energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, memiliki potensi besar untuk mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil yang terbatas dan menyebabkan polusi udara. Dengan meningkatkan investasi dan inovasi dalam teknologi energi terbarukan, kita dapat mempercepat transisi menuju masyarakat yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana menjadi hal yang krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui praktik-praktik

seperti reboisasi, pengendalian perburuan liar, dan pemantauan kelestarian lahan, kita dapat memastikan bahwa sumber daya alam kita terjaga dengan baik untuk generasi yang akan datang. Pendekatan ini juga memberikan manfaat ekonomi jangka panjang dengan mempertahankan produktivitas dan keanekaragaman hayati. Tidak kalah pentingnya, upaya pengurangan limbah dan polusi menjadi bagian integral dari pembangunan berkelanjutan. Dengan mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan mengimplementasikan kebijakan yang ketat terhadap pembuangan limbah, kita dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Selain itu, dengan mendorong praktik daur ulang dan penggunaan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan, kita dapat menciptakan ekonomi sirkular yang meminimalkan limbah dan mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak berkelanjutan.

4. Partisipasi dan Kesenjangan Sosial

Model pembangunan ekonomi yang berkelanjutan menempatkan partisipasi masyarakat dan kesetaraan sosial sebagai pilar utama. Acemoglu & Robinson (2022) menegaskan bahwa untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi. Kesenjangan dalam akses ini tidak hanya menciptakan fondasi yang lebih solid untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membantu dalam menciptakan masyarakat yang lebih stabil secara sosial. Keadilan dalam distribusi kekayaan juga menjadi fokus dalam model pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Acemoglu & Robinson (2022) menekankan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus didasarkan pada prinsip keadilan, di mana distribusi kekayaan tidak

hanya berpihak pada segelintir orang atau kelompok tertentu, tetapi merata secara adil di antara seluruh masyarakat. Hal ini akan membantu mengurangi disparitas sosial dan ekonomi yang bisa menjadi pemicu ketidakstabilan dalam masyarakat.

Partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat juga penting dalam model pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik pada tingkat lokal maupun nasional, akan membantu menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap pembangunan. Acemoglu & Robinson (2022) mencatat bahwa partisipasi ini juga membantu mengurangi ketimpangan kekuasaan dan memperkuat tatanan demokratis dalam masyarakat. Prinsip kesetaraan, keadilan, dan partisipasi aktif masyarakat adalah landasan yang penting dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam akses terhadap peluang ekonomi, distribusi kekayaan yang adil, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan secara ekonomi. (Acemoglu & Robinson, 2022)

C. Strategi Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan

Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi menjadi fokus utama pembangunan global, mempengaruhi keberlanjutan dan kesejahteraan. Laporan PBB 2020 menegaskan ketimpangan antara negara berkembang dan maju menghambat pencapaian SDGs. Ini membahas urgensi strategi komprehensif untuk mereduksi kesenjangan (PBB, 2020). Salah satu pendekatan yang telah diperkenalkan adalah

upaya pemberdayaan ekonomi lokal melalui pembangunan keterampilan dan akses ke modal. Melalui program-program ini, masyarakat yang rentan dapat meningkatkan kapasitas produktif dan mengakses peluang ekonomi yang lebih baik. Misalnya, penelitian oleh Banerjee dan Duflo (2019) membahas pentingnya intervensi yang berfokus pada pendidikan dan kesehatan masyarakat miskin sebagai langkah awal untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.

Di samping itu, regulasi dan kebijakan yang adil dan inklusif juga merupakan instrumen penting dalam memerangi kemiskinan dan ketimpangan. Pemerintah dapat berperan kunci dalam memastikan distribusi yang adil dari sumber daya ekonomi, termasuk perlindungan tenaga kerja, kebijakan pajak yang berkeadilan, dan investasi dalam infrastruktur dasar seperti pendidikan dan kesehatan (*World Bank*, 2020).

1. Pendidikan dan Keterampilan

Investasi dalam pendidikan dan keterampilan memiliki peran krusial dalam upaya mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Seperti yang disoroti oleh Sen (2019), pendidikan yang berkualitas memberikan kesempatan yang adil bagi individu untuk meningkatkan keterampilan dan mendapatkan akses ke pekerjaan yang lebih baik serta penghasilan yang lebih tinggi. Ini membuka pintu bagi mobilitas sosial dan mengurangi ketidaksetaraan dalam masyarakat. Program-program pendidikan inklusif yang fokus pada pengembangan kemampuan dapat menjadi kunci dalam memperbaiki kesenjangan pendapatan yang ada. Dalam masyarakat yang berfokus pada pendidikan, kesempatan untuk belajar haruslah merata dan tidak memandang latar belakang ekonomi. Hal ini sesuai dengan pandangan

Sen (2019) tentang pentingnya memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu. Melalui pendidikan yang inklusif, individu dari berbagai lapisan masyarakat dapat memiliki akses yang sama terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar kerja yang kompetitif.

Investasi dalam pendidikan bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kesetaraan dan mobilitas sosial. Dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan infrastruktur pendidikan yang memadai dan program-program pelatihan keterampilan yang relevan juga diperlukan. Sehingga, peran kolaboratif dari berbagai pihak menjadi penting dalam mengatasi tantangan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan dan peluang kerja. Dalam konteks globalisasi dan perubahan ekonomi yang cepat, penting bagi individu untuk terus mengembangkan keterampilan sepanjang hayat. Dengan demikian, pendidikan dan pelatihan keterampilan bukan hanya merupakan investasi jangka pendek untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperbaiki kesenjangan sosial secara berkelanjutan (Sen, 2019).

2. Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Pemberdayaan ekonomi lokal merupakan salah satu strategi yang efektif untuk mengurangi ketimpangan regional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*World Bank*, 2014). Melalui dukungan yang diberikan kepada pelaku usaha kecil dan menengah, serta dengan memfasilitasi akses terhadap pasar dan sumber daya, pemerintah dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan di daerah-daerah yang terpinggirkan. Program-program

pemberdayaan ekonomi lokal juga memiliki dampak yang positif dalam mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor ekonomi tertentu. Dengan memperluas diversifikasi ekonomi di tingkat lokal, masyarakat akan lebih mampu mengatasi risiko ekonomi yang terkait dengan fluktuasi pasar atau perubahan dalam sektor tertentu.

Pemberdayaan ekonomi lokal juga berpotensi untuk meningkatkan ketahanan ekonomi di tingkat daerah. Dengan adanya lebih banyak peluang usaha dan pendapatan yang dihasilkan dari sektor-sektor ekonomi lokal, masyarakat akan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan ekonomi, seperti krisis global atau perubahan kebijakan nasional. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi lokal tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di tingkat lokal, tetapi juga berpotensi untuk memperkuat ekonomi nasional secara keseluruhan melalui peningkatan kontribusi dari berbagai daerah dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*World Bank*, 2014).

3. Kebijakan Redistribusi dan Perlindungan Sosial

Kebijakan redistribusi pendapatan dan perlindungan sosial merupakan strategi penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Ostry *et al.* (2014) menunjukkan bahwa program-program sosial seperti bantuan langsung tunai, program kesehatan dan pendidikan gratis, serta sistem jaminan sosial, dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Program bantuan langsung tunai, misalnya, memberikan dukungan finansial langsung kepada keluarga yang membutuhkan, sehingga membantu meningkatkan daya beli dan akses terhadap kebutuhan dasar. Selain itu, program kesehatan dan pendidikan gratis memberikan akses yang lebih luas kepada layanan kesehatan dan

pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga membantu mengurangi kesenjangan dalam hal kesehatan dan pendidikan. Dengan meningkatnya akses terhadap layanan ini, diharapkan akan tercipta peluang yang lebih adil bagi semua orang untuk mengembangkan potensi.

Sistem jaminan sosial juga merupakan bagian penting dari kebijakan redistribusi dan perlindungan sosial. Sistem ini memberikan perlindungan finansial kepada kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak dari keluarga miskin, sehingga membantu melindungi dari risiko kemiskinan dan marginalisasi sosial. Dengan demikian, kebijakan redistribusi pendapatan dan perlindungan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4. Penguatan Institusi dan Tata Kelola yang Baik

Penguatan institusi dan tata kelola yang baik berperan krusial dalam upaya memerangi kemiskinan dan ketimpangan. Acemoglu & Robinson (2022) menegaskan bahwa institusi yang kuat dan tata kelola yang transparan adalah fondasi yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa landasan yang kokoh dalam institusi dan tata kelola, upaya untuk mengatasi masalah sosial-ekonomi akan sulit dilakukan. Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk memperkuat institusi dan tata kelola. Reformasi kebijakan adalah salah satu aspek yang penting dalam hal ini. Dengan menerapkan kebijakan yang memihak pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah dapat memastikan bahwa sumber daya dan kesempatan didistribusikan secara adil dan merata. Selain itu, peningkatan akses

terhadap keadilan hukum juga menjadi hal yang krusial. Hukum yang berlaku adil dan transparan memberikan jaminan perlindungan bagi hak-hak individu dan perusahaan, serta memastikan bahwa pelanggaran hukum bisa ditindak dengan tegas.

Tidak kalah pentingnya adalah upaya untuk memerangi korupsi. Korupsi dapat merusak institusi dan tata kelola yang baik dengan merusak kepercayaan publik dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, langkah-langkah preventif dan penindakan yang keras terhadap korupsi harus diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, institusi dan tata kelola yang baik dapat terjaga dan diperkuat dari ancaman korupsi. Penguatan institusi dan tata kelola yang baik memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Melalui langkah-langkah reformasi, peningkatan akses terhadap keadilan hukum, dan penanggulangan korupsi yang berkelanjutan, kita dapat membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta pengentasan kemiskinan dan ketimpangan yang lebih efektif.



BAB V

TANTANGAN DALAM MENGATASI KETIMPANGAN EKONOMI GLOBAL

Tantangan utama dalam mengatasi ketimpangan ekonomi global adalah akses terhadap sumber daya ekonomi yang tidak merata, seperti pendapatan, kekayaan, dan kesempatan. Menurut Milanovic (2016), ketimpangan ini menciptakan pembagian kelas sosial yang terpisah, memperdalam kesenjangan ekonomi yang sudah ada. Selain itu, perubahan struktural ekonomi seperti globalisasi dan revolusi teknologi juga menjadi tantangan signifikan. Hal ini sering kali meningkatkan kesenjangan antara negara-negara maju dan berkembang, serta antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Stiglitz (2022).

Tantangan lainnya adalah lingkungan, dengan perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang semakin memperkuat ketimpangan ekonomi. Negara-negara yang kurang mampu sering kali merasakan dampak yang lebih besar dari tantangan lingkungan ini, seperti yang diungkapkan oleh *World Bank* (2014). Sementara itu, tantangan politik dan sosial seperti korupsi, konflik bersenjata, dan kekacauan politik juga memperburuk ketimpangan ekonomi. Hal ini menghambat upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sesuai dengan teori Acemoglu & Robinson (2022).

A. Faktor-faktor Internal dan Eksternal yang Menghambat Pembangunan

Pembangunan ekonomi suatu negara terhambat oleh faktor internal dan eksternal yang kompleks. Korupsi, birokrasi lambat, dan ketimpangan ekonomi menjadi tantangan utama. Korupsi menghalangi investasi asing dan domestik serta mengurangi kepercayaan publik. Birokrasi yang berbelit-belit mengurangi kemudahan berbisnis dan daya saing global. Ketimpangan ekonomi memicu ketegangan sosial-politik, mengancam stabilitas negara (*World Bank*, 2021). Faktor eksternal juga memiliki peran besar dalam menghambat pembangunan ekonomi suatu negara. Perubahan dalam ekonomi global, seperti krisis keuangan atau perubahan kebijakan perdagangan internasional, dapat memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi negara-negara berkembang. Misalnya, penelitian oleh *International Monetary Fund* (IMF) (2019) menunjukkan bahwa perang dagang antara dua kekuatan ekonomi besar, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, dapat menyebabkan gangguan ekonomi yang luas di negara-negara lainnya, melalui penurunan permintaan global dan volatilitas pasar keuangan.

Pemerintah dan pemangku kepentingan terus berupaya mengatasi hambatan struktural dalam pembangunan ekonomi dengan reformasi tata kelola pemerintahan, perbaikan sistem hukum, dan pengurangan ketimpangan ekonomi. Kerja sama internasional dan diplomasi ekonomi juga krusial dalam menghadapi tantangan eksternal. Melalui kerja sama regional dan multilateral, negara-negara dapat saling mendukung dalam mengatasi dampak perubahan ekonomi global, menciptakan lingkungan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan upaya berkelanjutan dan kerja sama yang solid,

diharapkan hambatan tersebut dapat diatasi, membuka jalan bagi kemajuan ekonomi dan sosial global.

1. Ketidakstabilan Politik dan Konflik Bersenjata

Ketidakstabilan politik dan konflik bersenjata seringkali menjadi faktor internal yang menghambat pembangunan ekonomi suatu negara. Menurut Acemoglu & Robinson (2022), konflik bersenjata dan ketidakstabilan politik dapat mengganggu aktivitas ekonomi dengan menghambat investasi dan mengganggu penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks ini, ketidakstabilan politik juga menciptakan ketidakpastian yang merugikan bagi investasi dan perdagangan, sehingga berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketidakpastian politik mempengaruhi keputusan investor dan pengusaha dalam melakukan investasi jangka panjang. Ketika situasi politik tidak stabil, investor cenderung enggan untuk menanamkan modalnya karena risiko yang lebih tinggi terkait dengan perubahan kebijakan atau potensi konflik yang dapat mengganggu operasi bisnis (Acemoglu & Robinson, 2022). Hal ini dapat menghambat pertumbuhan sektor swasta dan mengakibatkan stagnasi ekonomi.

Konflik bersenjata juga dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar akibat penghancuran infrastruktur dan sumber daya manusia, serta mengganggu proses produksi dan distribusi barang dan jasa. Dampak ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga dapat berlanjut dalam jangka panjang dengan adanya kebutuhan pemulihan ekonomi pasca-konflik (Collier, 2017). Penting bagi suatu negara untuk menciptakan stabilitas politik dan menghindari konflik bersenjata agar dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan

ekonomi. Langkah-langkah seperti memperkuat institusi politik, meningkatkan partisipasi politik, dan memperbaiki tata kelola pemerintahan dapat membantu mengurangi risiko ketidakstabilan politik dan konflik bersenjata, sehingga mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*World Bank*, 2011).

2. Korupsi dan Kekurangan Tata Kelola yang Baik

Korupsi merupakan masalah serius yang menghambat pembangunan ekonomi di banyak negara. Menurut *World Bank* (2014), korupsi menguras sumber daya publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan sosial. Dana yang seharusnya dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, pembangunan ekonomi terhambat dan peluang untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan menjadi terbatas. Tidak hanya itu, kekurangan dalam tata kelola yang baik juga berdampak negatif terhadap kesenjangan sosial-ekonomi. Tanpa tata kelola yang baik, pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan dapat cenderung bias dan tidak adil, yang pada akhirnya memperkuat ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Hal ini dapat menghambat upaya-upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata dalam distribusi kekayaan dan peluang.

Kekurangan dalam tata kelola yang baik juga dapat memperburuk iklim investasi dan perdagangan di suatu negara. Investor dan pelaku bisnis cenderung enggan untuk beroperasi di lingkungan yang korup dan tidak stabil secara kelembagaan. Dengan demikian, kurangnya tata kelola yang baik dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena mengurangi aliran investasi dan

perdagangan. Dalam konteks ini, upaya untuk meningkatkan tata kelola yang baik merupakan hal yang penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Reformasi kelembagaan, pemberantasan korupsi, dan penguatan aturan hukum adalah langkah-langkah yang harus diambil untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (*World Bank*, 2014). Dengan demikian, tata kelola yang baik bukan hanya menjadi prasyarat bagi pembangunan ekonomi yang sukses, tetapi juga merupakan fondasi yang diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera secara keseluruhan.

3. Keterbatasan Sumber Daya Alam

Keterbatasan sumber daya alam merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebagian besar negara bergantung pada sumber daya alam tertentu untuk mendukung aktivitas ekonominya. Namun, negara-negara yang terlalu bergantung pada sumber daya alam tertentu, seperti minyak dan gas, rentan terhadap fluktuasi harga komoditas tersebut. Blanchard, Amighini, dan Giavazzi (2023) mencatat bahwa fluktuasi harga komoditas dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang signifikan dan menimbulkan risiko ekonomi yang terkait dengan ketergantungan tersebut.

Gambar 5. Kenaikan Harga Akibat Keterbatasan Sumber Daya Alam



Sumber: *SasarainaFM*

Eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan juga dapat menyebabkan dampak negatif jangka panjang bagi perekonomian suatu negara. Degradasi lingkungan akibat eksploitasi yang berlebihan dapat mengurangi produktivitas sumber daya alam tersebut dan membatasi potensi pertumbuhan ekonomi di masa depan. Selain itu, kerugian ekonomi jangka panjang juga dapat terjadi akibat hilangnya sumber daya alam yang berharga dan berpotensi menghasilkan pendapatan dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, penting bagi negara-negara yang memiliki keterbatasan sumber daya alam untuk mengembangkan strategi ekonomi yang beragam dan berkelanjutan. Diversifikasi ekonomi dapat membantu mengurangi ketergantungan pada satu jenis sumber daya alam tertentu dan mengurangi risiko ekonomi yang terkait dengan fluktuasi harga komoditas. Selain itu, perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan juga perlu menjadi prioritas dalam upaya memastikan kelangsungan ekonomi jangka panjang.

4. Pengaruh Eksternal dan Ketergantungan Ekonomi

Pengaruh eksternal dan ketergantungan ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Menurut Todaro dan Smith (2015), negara-negara yang sangat tergantung pada perdagangan internasional dan investasi asing rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi global. Salah satu dampak utamanya adalah ketika terjadi krisis ekonomi global. Krisis semacam itu dapat menyebabkan penurunan ekspor dan penarikan modal asing dari negara yang terkena dampaknya. Selain itu, fluktuasi pasar keuangan internasional juga dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara secara signifikan. Ketika terjadi fluktuasi pasar, nilai tukar mata uang bisa berubah secara drastis, yang kemudian dapat mengganggu aktivitas perdagangan dan investasi. Hal ini juga bisa mengarah pada krisis keuangan domestik yang membuat ketidakpastian meningkat.

Krisis ekonomi global dan fluktuasi pasar keuangan internasional juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara. Ketika terjadi penurunan ekspor dan investasi asing, pertumbuhan ekonomi akan terhambat karena kurangnya sumber daya yang dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan. Hal ini bisa membuat negara tersebut sulit untuk mencapai target-target pembangunan ekonomi yang telah ditetapkan.

Gambar 6. *Global Economic Crisis*



Pada situasi seperti ini, penting bagi negara-negara untuk memiliki strategi cadangan dan kebijakan yang mampu menghadapi tantangan eksternal yang tidak terduga. Hal ini bisa termasuk diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang rentan terhadap fluktuasi pasar internasional, serta memperkuat sistem keuangan domestik untuk menghadapi kemungkinan krisis keuangan. Dengan demikian, negara-negara dapat lebih siap menghadapi dampak dari eksternalitas ekonomi dan meningkatkan ketahanan ekonomi dalam jangka panjang.

B. Dampak Perubahan Iklim dan Globalisasi terhadap Ketimpangan

Perubahan iklim dan globalisasi telah berperan krusial dalam membentuk ketimpangan ekonomi global. Pertama, dampak perubahan iklim telah memperburuk disparitas ekonomi antara negara-negara maju dan berkembang. Menurut laporan Bank Dunia tahun 2020, negara-negara dengan ekonomi yang lebih lemah cenderung menjadi korban

utama dari bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, dan badai tropis. Dampak buruk dari bencana semacam itu sering kali melumpuhkan infrastruktur dasar, menyebabkan kerugian ekonomi besar-besaran, dan memperdalam kesenjangan ekonomi antara negara-negara yang sudah kaya dan yang miskin (Bank Dunia, 2020).

Globalisasi telah menghadirkan tantangan dan peluang yang tidak merata bagi negara-negara di seluruh dunia. Sementara negara-negara maju telah mampu memanfaatkan akses pasar global dan teknologi untuk meningkatkan ekonomi, negara-negara berkembang sering kali terpinggirkan dalam persaingan global. Misalnya, perusahaan multinasional cenderung memindahkan produksi ke negara-negara dengan biaya tenaga kerja lebih rendah, meninggalkan negara-negara berkembang dengan pekerjaan yang kurang menguntungkan dan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi (Stiglitz, 2018).

Sementara perubahan iklim dan globalisasi telah menjadi penyebab utama ketimpangan ekonomi global, juga bisa menjadi bagian solusi. Upaya untuk mengurangi emisi karbon dan mengatasi dampak perubahan iklim dapat membantu mengurangi kerentanan ekonomi negara-negara yang paling terpengaruh. Selain itu, dengan memperkuat kerja sama internasional dan memastikan adanya peraturan yang adil dalam perdagangan global, globalisasi dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan memperjuangkan keadilan ekonomi global yang lebih besar (*World Bank*, 2021).

1. Ketimpangan dalam Ketersediaan Sumber Daya Alam

Perubahan iklim telah menjadi perhatian global karena dampaknya yang signifikan terhadap distribusi sumber daya alam, yang

pada gilirannya memperdalam ketimpangan ekonomi antara negara-negara. Menurut IPCC (Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim) dalam laporannya tahun 2014, pola distribusi sumber daya alam telah berubah secara dramatis sebagai akibat dari perubahan iklim. Daerah tropis dan subtropis, yang sering kali merupakan negara-negara berkembang, menjadi lebih rentan terhadap dampak seperti kekeringan, banjir, dan penurunan produktivitas pertanian. Sebagai contoh, negara-negara di Afrika Sub-Sahara sering kali mengalami kekeringan yang parah, yang mengancam ketahanan pangan dan ekonomi.

Dampak ini secara langsung mempengaruhi ketimpangan ekonomi antara negara-negara yang kaya akan sumber daya alam dan yang tidak. Negara-negara dengan akses yang lebih baik terhadap sumber daya alam dan teknologi adaptasi memiliki keunggulan dalam mengatasi dampak perubahan iklim, dapat mengembangkan infrastruktur yang lebih tangguh, sistem irigasi yang lebih efisien, dan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap perubahan iklim, sementara negara-negara lain mungkin kesulitan dalam mengakses sumber daya dan teknologi yang sama.

Ketimpangan ini memperkuat ketidaksetaraan ekonomi global dan dapat menghambat upaya-upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan secara inklusif. Upaya untuk mengurangi ketimpangan dalam ketersediaan sumber daya alam dan teknologi adaptasi perlu diutamakan dalam agenda global untuk mengatasi perubahan iklim. Ini melibatkan kerjasama internasional, transfer teknologi, dan dukungan finansial kepada negara-negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Melalui tindakan kolaboratif yang kokoh, kita dapat bergerak menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua negara. (IPCC, 2014)

2. Ketimpangan dalam Akses terhadap Pasar Global

Globalisasi telah menjadi pendorong utama dalam membuka pasar global bagi berbagai negara di seluruh dunia. Namun, meskipun memberikan peluang ekonomi yang besar, globalisasi juga dapat memperkuat ketimpangan antara negara-negara maju dan berkembang. Sebagaimana diungkapkan oleh Stiglitz (2022), negara-negara maju cenderung lebih mampu memanfaatkan pasar global dan teknologi informasi untuk meningkatkan daya saing. Sebaliknya, negara-negara berkembang sering menghadapi tantangan dalam memasuki pasar global dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan multinasional. Perbedaan akses terhadap pasar global ini dapat memperdalam ketimpangan ekonomi antara negara-negara yang memiliki akses yang lebih besar dengan yang tidak. Dengan kata lain, negara-negara yang sudah maju secara ekonomi dapat terus meningkatkan keunggulan kompetitif melalui akses yang lebih besar terhadap pasar global, sementara negara-negara berkembang terkadang terpinggirkan dalam persaingan global tersebut.

Ketidakseimbangan ini juga dapat termanifestasi dalam bentuk ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan di dalam negara-negara tersebut. Negara-negara yang memiliki akses terhadap pasar global yang lebih besar cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, yang pada gilirannya dapat memperkuat ketidaksetaraan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi komunitas internasional untuk memperhatikan dan mengatasi ketimpangan dalam akses terhadap pasar global ini. Diperlukan langkah-langkah yang memungkinkan negara-negara berkembang untuk lebih aktif terlibat dalam perdagangan internasional dan memperoleh manfaat yang sama dengan negara-negara maju. Hanya dengan demikian,

globalisasi dapat menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan bagi semua negara dan masyarakat.

3. Ketimpangan dalam Akses terhadap Teknologi dan Inovasi

Globalisasi telah menjadi pendorong utama dalam transfer teknologi dan inovasi di seluruh dunia. Namun, hasil dari transfer ini tidak selalu merata, dengan negara-negara maju mendominasi akses terhadap teknologi dan inovasi. Sebagaimana yang dinyatakan oleh *World Bank* (2019), negara-negara maju cenderung memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya teknologi dan inovasi dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Hal ini menciptakan ketimpangan yang signifikan antara negara-negara tersebut, yang pada akhirnya dapat memperdalam kesenjangan ekonomi yang sudah ada. Negara-negara maju sering kali memiliki infrastruktur teknologi yang lebih maju, lembaga riset yang kuat, dan akses yang lebih besar terhadap modal manusia yang terampil. Di sisi lain, negara-negara berkembang sering kali menghadapi tantangan dalam memperoleh teknologi dan inovasi terbaru karena keterbatasan sumber daya, infrastruktur yang kurang berkembang, serta kurangnya investasi dalam pendidikan dan riset.

Dampak dari ketimpangan ini sangat serius, karena dapat memperdalam kesenjangan produktivitas antara negara-negara maju dan berkembang. Negara-negara yang kurang mampu mengakses teknologi dan inovasi terkini akan kesulitan bersaing secara ekonomi dan mengalami pertumbuhan yang lambat. Sementara itu, negara-negara maju yang memiliki akses lebih besar akan terus memperkuat posisi dalam perekonomian global. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat internasional untuk bekerja sama dalam mengatasi ketimpangan dalam akses terhadap teknologi dan inovasi. Hal ini dapat dilakukan melalui

transfer teknologi yang adil, pembangunan infrastruktur yang mendukung, investasi dalam pendidikan dan riset, serta memperkuat kerja sama antar negara untuk memfasilitasi akses yang lebih merata terhadap sumber daya teknologi dan inovasi. Dengan demikian, kita dapat bergerak menuju dunia yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi semua negara dan masyarakat. (*World Bank*, 2019).

4. Ketimpangan dalam Dampak Adaptasi dan Mitigasi

Perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang mempengaruhi semua negara di dunia. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah ketimpangan dalam dampak adaptasi dan mitigasi. Sebagaimana disebutkan oleh IPCC (2014), negara-negara yang lebih mampu secara finansial cenderung dapat mengambil langkah-langkah adaptasi dan mitigasi yang lebih efektif untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Memiliki sumber daya yang cukup untuk membangun infrastruktur tangguh, meningkatkan sistem peringatan dini, dan mengembangkan teknologi ramah lingkungan. Namun, bagi negara-negara yang lebih miskin, hal ini menjadi tantangan yang lebih besar. Sering kali kesulitan untuk membiayai langkah-langkah adaptasi dan mitigasi yang diperlukan. Dampaknya dapat memperdalam ketimpangan ekonomi dan sosial antara negara-negara yang kaya dan yang miskin. Kesenjangan ini menciptakan lingkungan di mana negara-negara yang kurang mampu harus berjuang lebih keras untuk menghadapi dampak perubahan iklim, sementara negara-negara yang lebih kaya mungkin dapat melakukannya dengan lebih efektif.

Ketimpangan dalam dampak adaptasi dan mitigasi juga dapat memperkuat ketidaksetaraan dalam masyarakat di dalam negara itu sendiri. Kelompok-kelompok yang lebih miskin dan rentan, seperti kaum

miskin, perempuan, dan anak-anak, sering kali lebih terpukul oleh dampak perubahan iklim dan memiliki akses yang lebih terbatas terhadap sumber daya untuk melindungi diri. Hal ini dapat mengakibatkan ketimpangan sosial yang lebih dalam dan memperburuk kondisi yang sudah rentan dalam masyarakat. Dengan demikian, penting bagi komunitas internasional untuk bekerja sama dalam mengatasi ketimpangan dalam dampak adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Ini termasuk pemberian dukungan finansial dan teknis kepada negara-negara yang lebih miskin, serta memperkuat kerja sama antar negara dalam pengembangan solusi adaptasi yang inklusif dan berkelanjutan. Hanya dengan upaya bersama, kita dapat mengurangi dampak perubahan iklim secara adil dan membangun dunia yang lebih tahan terhadap tantangan masa depan. (IPCC, 2014)

C. Isu-isu Kebijakan dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Global

Untuk menghadapi kompleksitas ekonomi global, penting bagi pembuat kebijakan untuk memahami keterkaitan antarnegara. Fahad Alturki dari Jadwa Investment menegaskan perlunya kerja sama internasional dalam mengatasi tantangan ekonomi. Kebijakan yang diambil satu negara dapat berdampak secara luas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan yang tepat harus mempertimbangkan implikasi global dan mengupayakan kerja sama lintas negara untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Dalam menghadapi kompleksitas ekonomi global, kebijakan yang diterapkan haruslah responsif dan fleksibel. Sebagaimana disoroti oleh Jonathan Ostry, Kepala Riset Departemen Hubungan Keuangan Internasional di Dana Moneter Internasional (IMF), "Ketika kita berurusan dengan tantangan yang cepat

berubah, seperti yang terjadi dalam ekonomi global saat ini, kebijakan yang efektif haruslah mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah." Hal ini menekankan pentingnya adopsi pendekatan yang adaptif dalam merumuskan kebijakan ekonomi, di mana kebijakan tidak hanya harus efektif dalam mengatasi tantangan saat ini, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masa mendatang.

Untuk mencapai kesuksesan dalam menghadapi tantangan ekonomi global, perumusan kebijakan haruslah didasarkan pada analisis data yang mendalam dan pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi ekonomi global. Sebagaimana disarankan oleh Christine Lagarde, Presiden Bank Sentral Eropa, "Keputusan kebijakan yang kuat memerlukan pemahaman yang mendalam tentang dinamika ekonomi global dan nasional serta keterampilan dalam menerapkan analisis data yang akurat." Dengan demikian, kebijakan ekonomi yang dibuat haruslah didasarkan pada bukti-bukti empiris dan analisis yang cermat, sehingga dapat menghasilkan dampak yang positif dan berkelanjutan dalam mengatasi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.

1. Proteksionisme Versus Liberalisasi Perdagangan

Salah satu isu utama dalam kebijakan ekonomi global adalah pertentangan antara proteksionisme dan liberalisasi perdagangan. Proteksionisme, yang memprioritaskan kepentingan nasional melalui penerapan tarif dan hambatan perdagangan lainnya, telah menjadi sasaran kritik karena dianggap dapat menghambat pertumbuhan ekonomi global dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku bisnis internasional (Bown, 2018). Di sisi lain, liberalisasi perdagangan, yang mendorong pembukaan pasar dan penghapusan hambatan perdagangan,

dianggap sebagai langkah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antarnegara (Rodrik, 2018). Tantangan bagi para pembuat kebijakan adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara kedua pendekatan ini, harus mempertimbangkan kepentingan nasional seperti pelestarian lapangan kerja dan keamanan pangan, sambil juga memahami manfaat dari integrasi global seperti peningkatan akses pasar dan transfer teknologi. Kesepakatan perdagangan multilateral seperti WTO dapat menjadi forum untuk mencapai konsensus dalam hal ini, tetapi kesulitan dalam mencapai persetujuan yang diinginkan menunjukkan kompleksitas dalam menyeimbangkan kedua pendekatan tersebut.

Pentingnya menemukan solusi yang tepat diperkuat oleh dampak global dari kebijakan perdagangan. Ketegangan perdagangan antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok telah menimbulkan ketidakpastian dalam pasar global dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia (Bown, 2018). Oleh karena itu, kolaborasi antarnegara dan penyelesaian konflik perdagangan menjadi penting untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang stabil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi para pemimpin global untuk mengambil langkah-langkah yang berani dan inovatif. Hal ini dapat mencakup pembaharuan aturan perdagangan yang lebih inklusif, dukungan terhadap pengembangan teknologi untuk meningkatkan daya saing ekonomi, dan investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi global (Bown, 2018). Dengan demikian, dapat diciptakan lingkungan perdagangan yang adil, berkelanjutan, dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Pertumbuhan Ekonomi Versus Perlindungan Lingkungan

Isu mengenai pertumbuhan ekonomi versus perlindungan lingkungan merupakan perdebatan yang kompleks dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi dianggap penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Namun, di sisi lain, dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali dapat merusak lingkungan alam, mengancam keberlanjutan sumber daya alam, dan menyebabkan perubahan iklim yang tidak diinginkan. Salah satu solusi untuk mengatasi konflik ini adalah dengan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Dengan pendekatan ini, pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari sudut pandang pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), tetapi juga dari sudut pandang keberlanjutan lingkungan, seperti penggunaan sumber daya yang efisien, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan perlindungan ekosistem.

Pembuat kebijakan harus mempertimbangkan berbagai faktor dalam merumuskan kebijakan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Hal ini melibatkan pembuatan keputusan yang mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari kebijakan ekonomi terhadap lingkungan, serta melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, industri, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Penting juga untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang pentingnya perlindungan lingkungan di kalangan masyarakat. Dengan meningkatkan pemahaman tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

lingkungan, masyarakat dapat mendukung upaya untuk mengambil tindakan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

3. Ketidaksetaraan Ekonomi dan Sosial

Ketidaksetaraan ekonomi dan sosial adalah isu yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan dalam masyarakat modern. Ketimpangan pendapatan, akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta peluang ekonomi yang tidak merata menjadi faktor utama yang memperburuk ketidaksetaraan ini. Sebagian besar negara, baik yang sedang berkembang maupun yang sudah maju, menghadapi tantangan dalam mengatasi kesenjangan yang semakin melebar antara kelompok-kelompok masyarakat. Penelitian oleh Piketty pada tahun 2014 membahas peran penting ketidaksetaraan dalam masyarakat modern. Karya tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan telah meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir, dengan sebagian kecil orang kaya semakin mendapatkan bagian yang lebih besar dari kue ekonomi, sementara sebagian besar populasi mengalami stagnasi atau bahkan penurunan pendapatan riil.

Para pembuat kebijakan dihadapkan pada tugas yang menantang untuk merancang kebijakan yang efektif dalam mengurangi ketidaksetaraan ini. Salah satu pendekatan utama adalah melalui distribusi yang lebih adil dari manfaat ekonomi dan akses terhadap kesempatan. Ini bisa dilakukan melalui program redistribusi pendapatan, seperti pajak progresif dan transfer tunai langsung kepada yang kurang mampu, serta melalui investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan mobilitas sosial. Mengatasi ketidaksetaraan tidak hanya masalah kebijakan pemerintah semata. Diperlukan pula kerja sama dari

berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil, untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkesempatan sama bagi semua orang. Dengan upaya bersama, kita dapat mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua warganya.

4. Krisis Keuangan dan Stabilitas Ekonomi

Isu krisis keuangan dan stabilitas ekonomi telah menjadi sorotan utama dalam kebijakan ekonomi global sejak krisis keuangan global pada tahun 2008. Peristiwa tersebut membahas kerentanan yang ada dalam sistem keuangan global dan dampak yang luasnya terhadap berbagai negara di seluruh dunia. Krisis keuangan tidak hanya mempengaruhi sektor keuangan, tetapi juga merembet ke sektor riil ekonomi, mengakibatkan resesi ekonomi, pengangguran massal, dan ketidakstabilan sosial. Karya-karya seperti yang ditulis oleh Reinhart dan Rogoff pada tahun 2019 telah memberikan pemahaman mendalam tentang sifat krisis keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menunjukkan bahwa krisis keuangan tidak hanya merupakan fenomena lokal, tetapi juga memiliki dampak yang merata secara global, dengan negara-negara di seluruh dunia saling terkait dalam jaringan keuangan yang kompleks.

Para pembuat kebijakan dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam mengatasi krisis keuangan dan menjaga stabilitas ekonomi global. Salah satu pendekatan utama adalah dengan meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap sektor keuangan, untuk mencegah terjadinya praktek-praktek yang berisiko tinggi dan melindungi sistem keuangan dari potensi kegagalan. Diperlukan juga mekanisme yang efektif untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi

global. Hal ini melibatkan kerjasama antar negara dalam membangun sistem peringatan dini, pertukaran informasi, dan koordinasi kebijakan ekonomi untuk mencegah terjadinya krisis dan meresponsnya dengan cepat jika terjadi.



BAB VI

PRAKTIK TERBAIK DALAM MENGATASI KETIMPANGAN EKONOMI

Pengurangan ketimpangan perekonomian memerlukan pendekatan yang terencana dan terukur untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan secara ekonomi. Salah satu praktik terbaik adalah pengembangan program redistribusi, seperti bantuan tunai, pendidikan dan layanan kesehatan gratis, serta sistem jaminan sosial. Pendekatan ini, telah terbukti efektif dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan antar kelompok dalam masyarakat (Ostry *et al.*, 2014), sambil melindungi kelompok rentan dari risiko kemiskinan dan marginalisasi. Praktik terbaik meliputi penguatan sistem pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan akses kesempatan ekonomi bagi semua. Investasi dalam pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan mengurangi kesenjangan pasar tenaga kerja dan meningkatkan mobilitas sosial. Program-program ini mempersiapkan individu menghadapi tantangan ekonomi globalisasi (Acemoglu & Robinson, 2022; *World Bank*, 2019).

A. Studi Kasus tentang Negara-negara yang Berhasil Mengurangi Ketimpangan

Ketimpangan ekonomi menjadi tantangan serius bagi banyak negara di seluruh dunia, namun beberapa negara telah berhasil mengatasi masalah ini dengan keberhasilan yang signifikan. Studi kasus tentang

negara-negara tersebut memberikan wawasan penting tentang faktor-faktor dan strategi yang berkontribusi terhadap penurunan ketimpangan ekonomi. Misalnya, negara-negara Nordik seperti Swedia, Norwegia, dan Denmark telah berhasil mengurangi ketimpangan dengan mengimplementasikan kebijakan redistribusi pendapatan yang kuat, pendidikan universal yang berkualitas, akses yang lebih luas terhadap layanan kesehatan, serta infrastruktur sosial yang kokoh. Di samping itu, negara-negara seperti Jerman dan Kanada juga memperlihatkan peningkatan yang signifikan dalam mengurangi ketimpangan dengan kombinasi kebijakan ekonomi yang inklusif, dukungan terhadap pelatihan keterampilan, dan investasi dalam penyediaan pekerjaan yang layak. Faktor-faktor ini membahas pentingnya kebijakan yang berorientasi pada kesetaraan dan pembangunan inklusif dalam mengatasi ketimpangan ekonomi di tingkat global.

Norwegia menonjol sebagai contoh sukses dalam mengurangi ketimpangan ekonomi melalui kebijakan redistribusi pendapatan yang efektif. Dengan menerapkan pajak progresif dan sistem perlindungan sosial yang kokoh, negara ini telah menciptakan lingkungan di mana tunjangan keluarga, bantuan tunai bagi keluarga miskin, serta sistem kesehatan dan pendidikan universal berperan penting dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Melalui langkah-langkah ini, Norwegia berhasil mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan sambil mempromosikan kesetaraan dan kesejahteraan bagi semua warganya. Pendekatan holistik dalam menangani ketimpangan ekonomi telah membuktikan bahwa dengan kebijakan yang tepat, negara dapat mencapai kesuksesan yang signifikan dalam mengatasi ketidaksetaraan.

Korea Selatan telah berhasil mengurangi ketimpangan ekonomi dengan strategis menginvestasikan dalam pendidikan dan inovasi. Dengan mengalokasikan sumber daya yang signifikan, negara ini telah meningkatkan akses pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan bagi seluruh masyarakatnya, seperti yang dilaporkan oleh *World Bank* pada tahun 2019. Program-program ini tidak hanya membantu meningkatkan mobilitas sosial tetapi juga memberikan kesempatan yang lebih merata bagi semua individu untuk mencapai kemajuan ekonomi. Melalui upaya-upaya ini, Korea Selatan telah menciptakan lingkungan di mana setiap warga negara memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk bersaing dalam perekonomian global yang semakin kompleks. Dengan demikian, negara ini telah berhasil merangkul inklusi ekonomi dan memperkuat fondasi bagi pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif di masa depan.

Program pengentasan kemiskinan seperti Bolsa Familia telah membawa perubahan signifikan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di Brazil. Bolsa Familia memberikan bantuan tunai langsung kepada keluarga miskin, yang telah membantu menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan secara substansial (Fiszbein & Schady, 2019). Selain itu, program-program ini tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga telah berhasil meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan untuk kelompok-kelompok rentan di Brazil. Melalui intervensi yang tepat sasaran dan efektif, Brazil telah menjadi contoh inspiratif bagi negara-negara lain dalam upaya mengatasi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Keberhasilan Bolsa Familia tidak hanya terlihat dalam angka-angka statistik, tetapi juga dalam perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat yang dulunya terpinggirkan di Brazil.

Rwanda telah menjadi contoh yang menginspirasi dalam mengurangi ketimpangan ekonomi melalui penguatan institusi dan partisipasi masyarakat. Dengan fokus pada reformasi tata kelola dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, negara ini berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Investasi yang signifikan dalam sektor pertanian, infrastruktur, dan program pembangunan pedesaan telah membawa dampak positif yang besar, mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Pendekatan holistik ini, yang diperkuat oleh kerjasama aktif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional seperti yang dilaporkan oleh *World Bank* (2014), menegaskan bahwa transformasi ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan dukungan yang kuat dari berbagai pihak dan keberpihakan pada pembangunan yang merata di seluruh lapisan masyarakat.

Studi kasus tentang negara-negara yang berhasil mengurangi ketimpangan ekonomi menegaskan bahwa tidak ada pendekatan tunggal yang dapat diadopsi secara universal. Dalam menangani masalah ini, kesuksesan lebih cenderung tercapai melalui kombinasi strategi yang terencana dan terukur, serta komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat. Beberapa negara telah berhasil melalui langkah-langkah seperti kebijakan redistribusi pendapatan, pemberdayaan ekonomi melalui pendidikan dan pelatihan, serta promosi kesetaraan akses terhadap peluang ekonomi. Namun demikian, keberhasilan ini seringkali melibatkan penyesuaian strategi berdasarkan konteks lokal dan perubahan global. Misalnya, negara-negara Nordik menekankan pada sistem kesejahteraan yang inklusif, sementara negara-negara berkembang fokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan

akses ke layanan dasar. Pentingnya komitmen pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat juga menjadi faktor krusial, karena mendorong implementasi kebijakan yang efektif dan memastikan distribusi manfaat yang adil. Dengan demikian, meskipun tidak ada pendekatan universal, upaya bersama yang terarah dapat mengatasi ketimpangan ekonomi secara berhasil.

B. Program-program Pembangunan Ekonomi yang Efektif

Implementasi program-program ekonomi yang terukur dan tepat sasaran berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Singapura merupakan contoh sukses dalam menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi yang komprehensif sejak merdeka pada tahun 1965. Fokus pada pengembangan industri manufaktur, pariwisata, dan layanan keuangan, serta orientasi pada inovasi, membantu Singapura menjadi pusat finansial dan teknologi terkemuka dengan tingkat pengangguran rendah dan pendapatan per kapita tinggi (Chan, 2018).

China telah menjadi teladan dalam mengimplementasikan program-program ekonomi yang sukses, sejajar dengan Singapura. Melalui reformasi ekonomi pada akhir 1970-an, China berubah dari sistem terpusat menjadi ekonomi pasar yang lebih terbuka. Langkah-langkah seperti pembukaan zona ekonomi khusus, deregulasi bisnis, dan investasi infrastruktur telah memicu pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Dengan komitmen dan langkah-langkah terencana, China membuktikan bahwa negara berpenduduk besar pun dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat (Lin, 2019).

Rwanda juga memberikan contoh yang inspiratif dalam mengimplementasikan program-program pembangunan ekonomi yang berdampak luas. Meskipun menghadapi tantangan yang besar pasca genosida pada tahun 1994, Rwanda berhasil mengubah perekonomiannya melalui berbagai inisiatif pembangunan yang terukur dan tepat sasaran. Fokus pada sektor pertanian, pariwisata, dan teknologi informasi telah membantu negara ini mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif. Melalui kebijakan yang terfokus pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, Rwanda menunjukkan bahwa bahkan dalam konteks yang sulit sekalipun, implementasi program ekonomi yang efektif dapat mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan (*World Bank*, 2020).

1. Program Kesejahteraan Sosial yang Inklusif

Program kesejahteraan sosial yang inklusif telah menjadi strategi efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai belahan dunia. Berbagai negara, terutama di wilayah Skandinavia seperti Norwegia dan Swedia, telah sukses menerapkan program-program ini sebagai bagian integral dari sistem kesejahteraan. Contoh yang mencolok adalah program tunjangan keluarga dan bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin. Studi yang dilakukan oleh Ostry *et al.* (2014) menunjukkan bahwa program-program ini memberikan manfaat yang signifikan dalam melindungi kelompok-kelompok yang rentan dari risiko kemiskinan. Program kesejahteraan sosial tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga berperan dalam memperkuat jaringan sosial dalam masyarakat. Dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar, program-program ini membantu

meningkatkan kapasitas individu dan keluarga untuk mencapai kemandirian ekonomi. Selain itu, pendekatan inklusif dalam program-program ini memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal di belakang, sehingga menciptakan fondasi yang lebih stabil bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Keberhasilan program kesejahteraan sosial bergantung pada komitmen yang kuat dari pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya yang memadai serta memastikan administrasi yang efisien dan transparan. Di samping itu, partisipasi aktif dari masyarakat sipil dan sektor swasta juga penting dalam memastikan bahwa program-program tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaannya. Dengan demikian, program kesejahteraan sosial yang inklusif bukan hanya menjadi instrumen untuk mengatasi kemiskinan, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

2. Investasi dalam Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Investasi dalam infrastruktur dan pengembangan wilayah telah menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang kerja yang signifikan. Program-program ini meliputi berbagai inisiatif, mulai dari pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, hingga proyek-proyek energi, serta pengembangan kawasan industri dan pariwisata. Berdasarkan laporan *World Bank* (2019), investasi semacam ini memiliki dampak positif dalam meningkatkan konektivitas dan produktivitas ekonomi.

Negara-negara yang mengadopsi strategi ini, seperti China dan India, telah mencatat keberhasilan yang signifikan dalam mempercepat

pertumbuhan ekonomi. Melalui pembangunan infrastruktur yang memadai, mampu meningkatkan aksesibilitas ke wilayah-wilayah terpencil, membuka akses terhadap pasar baru, dan memfasilitasi perdagangan yang lebih lancar. Selain itu, pengembangan kawasan industri dan pariwisata memberikan peluang bagi penciptaan lapangan kerja baru serta diversifikasi ekonomi (Syafara *et al.*, 2021).

Keberhasilan investasi ini tidak hanya bergantung pada skala proyek, tetapi juga pada keberlanjutan dan dampak sosial-ekonominya. Diperlukan perencanaan yang matang, termasuk penilaian dampak lingkungan dan kajian sosial, untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan. Selain itu, koordinasi yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil penting untuk mengelola risiko dan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien. Transparansi dalam pengelolaan dana investasi infrastruktur juga sangat penting untuk mencegah korupsi dan menjamin akuntabilitas. Dengan demikian, investasi dalam infrastruktur dan pengembangan wilayah bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan

Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan merupakan pilar utama dalam memperkuat daya saing ekonomi suatu negara. Program-program ini meliputi berbagai inisiatif, mulai dari pembangunan sekolah dan perguruan tinggi, penyediaan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi kelompok-kelompok yang kurang mampu, hingga program pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja. Menurut laporan *World Bank* (2019), pendekatan ini membantu meningkatkan

kualitas sumber daya manusia suatu negara. Negara-negara seperti Korea Selatan dan Singapura menonjol sebagai contoh keberhasilan dalam mengimplementasikan program-program pendidikan dan pelatihan keterampilan. Melalui fokus yang kuat pada pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, kedua negara ini telah berhasil menciptakan tenaga kerja yang sangat terampil dan adaptif. Hal ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga meningkatkan daya saing global.

Pentingnya investasi ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi semata, tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Pendidikan yang berkualitas memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan mobilitas sosial. Selain itu, pelatihan keterampilan membantu mengurangi kesenjangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar kerja, sehingga memberikan manfaat langsung bagi pembangunan inklusif. Untuk mencapai hasil yang optimal, dibutuhkan kerjasama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan. Koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan ini diperlukan untuk memastikan bahwa program-program pendidikan dan pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan memberikan hasil yang berkelanjutan. Dengan demikian, investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan bukan hanya tentang memperbaiki ekonomi, tetapi juga tentang membentuk masa depan yang lebih cerah dan inklusif bagi masyarakat.

4. Dukungan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Usaha kecil dan menengah (UKM) memegang peranan vital dalam menggerakkan perekonomian dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam penciptaan lapangan kerja. Program-program dukungan yang ditujukan untuk UKM menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem bisnis. Ini meliputi penyediaan akses terhadap modal, pelatihan kewirausahaan, bantuan teknis, dan fasilitasi akses pasar. Menurut laporan *World Bank* (2019), pendekatan ini membantu meningkatkan daya saing dan ketahanan UKM dalam menghadapi tantangan pasar yang dinamis.

Gambar 7. Dukungan Terhadap UMKM



Sumber: *Detiknews*

Negara-negara seperti Malaysia dan Thailand telah memberikan contoh yang menginspirasi melalui pengembangan ekosistem yang mendukung UKM. Dengan implementasi program-program dukungan yang holistik, keduanya berhasil menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan UKM. Penyediaan akses terhadap modal membantu mengatasi hambatan finansial yang sering dialami oleh UKM, sementara pelatihan kewirausahaan meningkatkan kemampuan

manajerial dan inovasi. Bantuan teknis dan fasilitasi akses pasar membantu UKM untuk meningkatkan kualitas produk dan memperluas jangkauan pasar. Ini tidak hanya meningkatkan pendapatan UKM secara keseluruhan, tetapi juga memperkuat daya saing di pasar domestik maupun internasional. Keberhasilan program-program ini juga tercermin dalam kontribusi yang signifikan dari UKM terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di negara-negara tersebut.

Tantangan yang dihadapi oleh UKM tidak bisa dianggap remeh. Masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memperkuat dukungan bagi UKM, termasuk peningkatan akses terhadap pasar global, peningkatan kapasitas manajerial, dan percepatan adopsi teknologi. Selain itu, pemerintah perlu terus berperan sebagai fasilitator dan penyedia regulasi yang mendukung bagi UKM. Dengan demikian, investasi dalam mendukung UKM bukan hanya tentang mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kokoh bagi inklusi sosial dan pembangunan berkelanjutan.

C. Pelajaran yang Bisa Dipetik dari Pengalaman Praktis dalam Mengatasi Ketimpangan

Pengalaman praktis dari berbagai negara menunjukkan bahwa mengatasi ketimpangan ekonomi membutuhkan pendekatan inklusif. Finlandia adalah contoh sukses dengan sistem pendidikan yang memperhatikan akses tanpa memandang latar belakang sosioekonomi. OECD membahas bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua. Ini menciptakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta masyarakat yang lebih merata secara ekonomi (OECD, 2019).

Jepang memberikan contoh dalam menerapkan kebijakan perlindungan sosial yang kuat untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. Negara ini telah memperkenalkan program-program seperti jaminan kesehatan universal dan tunjangan pengangguran yang besar, yang membantu mengurangi tekanan ekonomi pada kelompok rentan. Menurut *World Bank* (2020), kebijakan-kebijakan ini telah membantu menjaga stabilitas sosial dan mengurangi kesenjangan pendapatan di Jepang, menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

1. Pentingnya Konsistensi dan Kestinambungan Kebijakan

Salah satu pelajaran penting dari berbagai pengalaman negara adalah perlunya konsistensi dan kesinambungan dalam kebijakan untuk menangani ketimpangan ekonomi. Studi menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil mengurangi ketimpangan ekonomi memiliki kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan dalam jangka panjang (Ravallion, 2015). Brazil adalah contoh utama dengan program Bolsa Familia, menampilkan komitmen pemerintah untuk memperluas cakupan dan mendukung program tersebut, efektif mengurangi kesenjangan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Konsistensi kebijakan juga berperan penting dalam memelihara kepercayaan investor dan masyarakat. Negara-negara seperti Singapura dan Korea Selatan telah menunjukkan bahwa konsistensi dalam kebijakan ekonomi, investasi dalam pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan infrastruktur dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif (*World Bank*, 2018). Kedua negara ini telah melanjutkan dan menyesuaikan kebijakan-

kebijakan secara konsisten seiring waktu, yang pada akhirnya membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tantangan dalam menjaga konsistensi kebijakan juga harus dihadapi dengan bijaksana. Negara-negara seperti Argentina dan Venezuela telah mengalami kesulitan dalam mempertahankan konsistensi kebijakan ekonomi, yang mengakibatkan ketidakpastian politik dan ekonomi serta menimbulkan dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial (Economist, 2020). Oleh karena itu, sambil menekankan pentingnya konsistensi, negara-negara juga perlu memperhitungkan fleksibilitas yang diperlukan untuk menanggapi dinamika ekonomi dan sosial yang terus berubah. Pentingnya konsistensi dan kesinambungan kebijakan dalam mengatasi ketimpangan ekonomi tidak dapat dipandang remeh. Melalui komitmen jangka panjang dan adaptabilitas yang bijaksana, negara-negara dapat mencapai hasil yang signifikan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan mempromosikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

2. Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pembangunan

Pengalaman praktis menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat adalah kunci untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. Rwanda menonjol sebagai contoh nyata, mengutamakan keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan ekonomi dan sosial. Melalui partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan, negara dapat memastikan kebijakan yang diadopsi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan ini membangun fondasi yang kuat untuk pembangunan

inklusif dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat juga memperkuat legitimasi kebijakan dan program pemerintah. Ketika masyarakat merasa didengar dan terlibat secara aktif dalam pembangunan, cenderung lebih mendukung kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan dan lebih terlibat dalam proses penyusunannya. Hal ini membantu menciptakan ikatan yang lebih kuat antara pemerintah dan rakyatnya, yang pada gilirannya memperkuat stabilitas politik dan sosial suatu negara (OECD, 2017).

Partisipasi aktif masyarakat juga berkontribusi pada peningkatan kualitas kebijakan. Dengan melibatkan beragam perspektif dan pengalaman masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, negara dapat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif tentang tantangan yang dihadapi oleh berbagai segmen populasi. Hal ini memungkinkan pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan relevan, yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan (UNDP, 2020). Dalam rangka mencapai partisipasi masyarakat yang efektif, pemerintah juga harus menciptakan ruang bagi dialog yang terbuka dan inklusif. Mengadopsi pendekatan yang transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat adalah kunci dalam membangun hubungan yang saling percaya antara pemerintah dan warganya. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat bukan hanya menjadi prinsip yang dianjurkan, tetapi juga merupakan fondasi yang esensial bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Pembangunan Manusia sebagai Fokus Utama

Pembelajaran penting dari berbagai pengalaman adalah bahwa pembangunan manusia harus menjadi fokus utama dalam upaya mengatasi ketimpangan ekonomi. Negara-negara seperti Korea Selatan

dan Singapura menawarkan contoh yang mengilustrasikan betapa pentingnya investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan untuk mencapai hasil yang signifikan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi (*World Bank*, 2019). Dengan memberikan prioritas pada pengembangan sumber daya manusia, negara-negara dapat membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pendidikan berperan sentral dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Investasi dalam pendidikan yang berkualitas, dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi, memberikan akses yang lebih luas ke peluang ekonomi dan meningkatkan kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja yang berubah dengan cepat. Korea Selatan, misalnya, telah berhasil mencapai kemajuan ekonomi yang luar biasa dengan menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunannya (UNESCO, 2018).

Akses yang lebih baik ke layanan kesehatan juga berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif. Negara-negara yang berhasil mengatasi ketimpangan ekonomi seringkali memiliki sistem kesehatan yang inklusif, yang memberikan perlindungan finansial terhadap risiko kesehatan yang tidak terduga dan memastikan bahwa semua warga memiliki akses yang setara ke perawatan kesehatan yang berkualitas (WHO, 2020). Pelatihan keterampilan juga merupakan komponen penting dari pembangunan manusia. Dengan memberikan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, terutama kepada kelompok yang rentan atau terpinggirkan, negara dapat membuka pintu menuju lapangan kerja yang lebih baik dan penghasilan yang lebih tinggi. Singapura, misalnya, telah berhasil menciptakan lingkungan yang kondusif bagi

pengembangan keterampilan dengan memperluas akses ke pelatihan dan pendidikan vokasional (ADB, 2021).

4. Kebijakan yang Berbasis Bukti dan Terukur

Pentingnya implementasi kebijakan yang berbasis bukti dan terukur dalam mengatasi ketimpangan ekonomi merupakan pelajaran yang sangat berharga dari pengalaman praktis berbagai negara. Pendekatan yang didasarkan pada data dan penelitian yang cermat berperan krusial dalam menjamin keberhasilan kebijakan ekonomi dan sosial. Negara-negara yang berhasil mengurangi ketimpangan ekonomi, seperti yang dicatat oleh Ostry *et al.* (2014), seringkali mengadopsi pendekatan ini. Penerapan kebijakan yang berbasis bukti memungkinkan pemerintah untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif. Dengan menggunakan data empiris dan analisis yang solid, kebijakan dapat dirancang untuk mengatasi ketimpangan secara langsung, dengan memprioritaskan program-program yang memberikan dampak terbesar bagi yang terpinggirkan atau rentan secara ekonomi. Misalnya, evaluasi terhadap program redistribusi pendapatan seperti Bolsa Familia di Brazil telah membantu pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas program tersebut secara berkelanjutan, berdasarkan temuan empiris dan bukti empiris.

Kebijakan yang terukur memungkinkan untuk pemantauan dan evaluasi yang sistematis terhadap dampak kebijakan dalam jangka panjang. Dengan memantau indikator kinerja dan mengukur progres secara berkala, pemerintah dapat mengidentifikasi kelemahan dan kesempatan untuk perbaikan yang dapat meningkatkan efektivitas kebijakan. Pendekatan ini memungkinkan adaptasi yang cepat terhadap perubahan kondisi ekonomi dan sosial yang dinamis, sehingga

memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dan berdampak positif bagi masyarakat. Selanjutnya, kebijakan yang didasarkan pada bukti juga membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dengan menyediakan dasar yang kuat dan terukur untuk keputusan kebijakan, pemerintah dapat memperkuat legitimasi kebijakan di mata masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik. Dengan demikian, implementasi kebijakan yang berbasis bukti dan terukur bukan hanya menjadi kunci untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, tetapi juga untuk membangun fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.



BAB VII

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN INTERVENSI PEMERINTAH

Di era globalisasi yang dinamis, peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi semakin menjadi fokus utama. Di Bab VII ini, akan diuraikan tentang strategi dan intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai negara-negara berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pemerintah memiliki peran sentral dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang mendukung tujuan tersebut (Acemoglu & Robinson, 2022). Menurutnya, institusi-institusi yang efektif dan inklusif, ditunjang oleh intervensi pemerintah yang tepat, merupakan kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

A. Peran Kebijakan Fisikal dan Moneter dalam Mengurangi Ketimpangan

Kebijakan fiskal dan moneter berperan krusial dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Kebijakan fiskal, yang mencakup pengeluaran pemerintah dan perpajakan, dapat digunakan untuk mendistribusikan pendapatan secara lebih merata melalui program-program sosial, pendidikan, dan infrastruktur. Menurut penelitian oleh Gupta dan Hasan (2018), peningkatan belanja publik pada sektor-sektor

ini telah terbukti mengurangi kesenjangan ekonomi dengan memberikan akses yang lebih baik kepada layanan dasar dan peluang ekonomi kepada kelompok-kelompok yang kurang mampu secara finansial.

Kebijakan moneter, yang diterapkan oleh bank sentral, dapat mempengaruhi distribusi pendapatan melalui pengaturan suku bunga dan kebijakan kredit. Misalnya, penurunan suku bunga dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, namun dampaknya dapat bervariasi tergantung pada seberapa inklusif akses terhadap kredit di masyarakat. Studi oleh Claessens, Pazarbasioglu, dan Decressin (2018) menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang disertai dengan inisiatif untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi kelompok yang kurang terlayani dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi.

Efektivitas kedua jenis kebijakan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan lainnya, struktur ekonomi, dan keadaan sosial-politik. Oleh karena itu, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter serta integrasi dengan kebijakan lainnya seperti kebijakan ketenagakerjaan dan pendidikan, sangat penting dalam mencapai hasil yang optimal dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Dalam konteks ini, penelitian oleh Agenor dan Montiel (2018) membahas pentingnya pendekatan kebijakan yang holistik dan terkoordinasi dalam menanggapi tantangan ketimpangan ekonomi yang kompleks dan multidimensional. Dengan demikian, hanya melalui pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, negara-negara dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang diinginkan.

1. Kebijakan Fiskal untuk Redistribusi Pendapatan

Kebijakan fiskal memegang peran penting dalam upaya redistribusi pendapatan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih merata di masyarakat. Salah satu instrumen yang sering digunakan adalah sistem pajak progresif, di mana tingkat pajak meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan individu. Dengan demikian, kelompok dengan pendapatan lebih tinggi memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan negara, yang kemudian dapat dialokasikan kembali untuk memberikan bantuan kepada kelompok yang kurang mampu. Penelitian oleh Ostry *et al.* (2014) menunjukkan bahwa pajak progresif efektif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan distribusi kekayaan.

Pemerintah juga dapat menerapkan berbagai program bantuan sosial sebagai bagian dari kebijakan fiskal untuk redistribusi pendapatan. Program seperti tunjangan keluarga dan bantuan langsung tunai telah terbukti efektif dalam memberikan bantuan kepada keluarga yang membutuhkan, membantu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Langkah-langkah ini tidak hanya membantu mengurangi kesenjangan pendapatan, tetapi juga meningkatkan akses terhadap peluang ekonomi bagi kelompok yang kurang mampu secara finansial.

Efektivitas kebijakan fiskal dalam redistribusi pendapatan juga tergantung pada desain dan implementasinya. Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa sistem pajak dan program bantuan sosial dirancang secara tepat, sehingga tidak hanya mengurangi ketimpangan pendapatan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik juga merupakan faktor kunci untuk memastikan bahwa dana tersebut

benar-benar mencapai kelompok yang membutuhkan dan digunakan secara efisien. Dalam konteks globalisasi dan kompleksitas ekonomi modern, kebijakan fiskal untuk redistribusi pendapatan juga perlu memperhitungkan tantangan baru seperti mobilitas modal dan tenaga kerja lintas batas. Oleh karena itu, kerjasama internasional dan koordinasi antarnegara dalam mengembangkan kebijakan fiskal yang inklusif dan berkelanjutan menjadi semakin penting.

2. Kebijakan Moneter untuk Mengendalikan Inflasi dan Mendorong Pertumbuhan

Peran kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sangatlah penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Salah satu instrumen utama dalam kebijakan moneter adalah pengaturan suku bunga oleh bank sentral. Dengan menaikkan suku bunga saat inflasi meningkat, bank sentral dapat meredam tekanan inflasi yang dapat merugikan kelompok masyarakat dengan pendapatan tetap atau rendah. Studi oleh *World Bank* (2019) membahas pentingnya kebijakan moneter dalam menjaga daya beli masyarakat dan mencegah terjadinya inflasi yang berlebihan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kebijakan moneter yang bersifat akomodatif juga dapat memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Penurunan suku bunga dapat merangsang investasi dan konsumsi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Hal ini sangat penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dengan menciptakan lebih banyak peluang bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu secara finansial. Namun, efek dari kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan harus diimbangi

dengan perhatian terhadap stabilitas harga dan risiko-risiko lain yang mungkin muncul.

Kebijakan moneter juga memiliki batasan dalam upaya mengurangi ketimpangan ekonomi. Misalnya, kebijakan suku bunga rendah mungkin tidak memberikan manfaat yang sama bagi semua kelompok masyarakat, terutama bagi yang tidak memiliki akses terhadap kredit atau yang bergantung pada pendapatan tetap. Oleh karena itu, penting bagi bank sentral untuk mempertimbangkan dampak distribusi dari kebijakan moneter dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, kerjasama dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya dalam merancang kebijakan yang komprehensif juga dapat memperkuat dampak positif dari kebijakan moneter terhadap ketimpangan ekonomi. Dalam konteks globalisasi dan interkoneksi ekonomi, kebijakan moneter juga harus mempertimbangkan dampak dari faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar dan krisis keuangan global. Oleh karena itu, fleksibilitas dan responsivitas dalam merespons perubahan ekonomi global menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

3. Kebijakan Fiskal untuk Investasi dalam Pendidikan dan Infrastruktur

Penggunaan kebijakan fiskal untuk mendukung investasi dalam pendidikan dan infrastruktur merupakan strategi yang penting dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan merupakan investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu negara. Melalui pengeluaran publik dalam sektor pendidikan, pemerintah dapat meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi seluruh

lapisan masyarakat, sehingga memperluas peluang ekonomi bagi yang sebelumnya terpinggirkan. Penelitian oleh *World Bank* (2019) menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan dapat membantu mengurangi kesenjangan pendidikan dan meningkatkan mobilitas sosial.

Investasi dalam infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan listrik juga penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Infrastruktur yang baik tidak hanya meningkatkan konektivitas antar wilayah, tetapi juga memberikan akses yang lebih baik terhadap pasar dan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Hal ini dapat membantu mengurangi ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta meningkatkan aksesibilitas bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah dalam infrastruktur dapat menjadi katalisator penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan inklusi sosial. Namun, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa investasi dalam pendidikan dan infrastruktur dilakukan secara efisien dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan perencanaan yang matang, pengelolaan yang transparan, dan evaluasi yang berkala terhadap hasil dan dampak investasi tersebut. Selain itu, kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga keuangan internasional juga dapat memperluas sumber pendanaan untuk investasi-investasi ini dan memastikan kelancaran implementasinya.

4. Koordinasi Antara Kebijakan Fiskal dan Moneter

Pentingnya koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter dalam mengurangi ketimpangan ekonomi tidak dapat dilebih-lebihkan. Kedua jenis kebijakan tersebut memiliki dampak yang saling terkait dan dapat saling memperkuat atau melemahkan efek satu sama lain. Koordinasi

yang baik antara kebijakan fiskal, yang diatur oleh pemerintah, dan kebijakan moneter, yang diatur oleh bank sentral, dapat memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak bertentangan satu sama lain. Penelitian oleh Blanchard *et al.* (2020) menekankan pentingnya keselarasan ini dalam meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi secara keseluruhan. Salah satu aspek penting dari koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter adalah pemahaman bersama tentang tujuan-tujuan kebijakan tersebut. Pemerintah dan bank sentral perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil konsisten dengan tujuan-tujuan jangka panjang dari pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan adanya kesepakatan ini, kebijakan yang diambil dapat lebih terarah dan efektif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi.

Koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter juga memungkinkan adanya respons yang cepat terhadap perubahan kondisi ekonomi. Dengan berkomunikasi secara terbuka dan terus-menerus, pemerintah dan bank sentral dapat menyesuaikan kebijakan sesuai dengan perkembangan ekonomi yang terjadi, seperti perubahan dalam tingkat inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat membantu mencegah terjadinya gejolak ekonomi yang berlebihan dan menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Antara kebijakan fiskal dan moneter juga memiliki tantangan tersendiri. Misalnya, terdapat potensi konflik kepentingan antara pemerintah yang mungkin lebih fokus pada tujuan jangka pendek, seperti pemenuhan janji politik, dan bank sentral yang cenderung lebih memperhatikan stabilitas jangka panjang.

B. Strategi Pengembangan Infrastruktur dan Industri

Pengembangan infrastruktur dan industri telah lama diakui sebagai strategi kunci untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang inklusif di berbagai negara. Sebagaimana dijelaskan oleh Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), investasi dalam infrastruktur yang efisien dan inklusif mampu menciptakan kesempatan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat konektivitas antarwilayah. Misalnya, China telah menunjukkan komitmen yang luar biasa terhadap pengembangan infrastruktur melalui proyek-proyek besar seperti *Belt and Road Initiative* (BRI), yang bertujuan untuk memperluas jaringan transportasi dan konektivitas perdagangan global.

Gambar 8. *Belt and Road Initiative China*



Sumber: *The Jakarta Post*

Pengembangan sektor industri juga merupakan elemen penting dalam upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sebuah laporan oleh Bank Dunia membahas pentingnya diversifikasi industri sebagai langkah krusial dalam mengatasi ketimpangan ekonomi.

Negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan telah berhasil mengadopsi strategi ini dengan mengalokasikan sumber daya untuk sektor-sektor yang memegang potensi pertumbuhan, seperti teknologi tinggi, manufaktur, dan inovasi. Untuk mencapai keberhasilan dalam upaya ini, diperlukan kerjasama lintas sektor dan koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Sebuah studi oleh Badan Pembangunan Internasional Inggris (CDC) menekankan pentingnya investasi sektor swasta dalam mendukung pengembangan infrastruktur dan industri di negara-negara berkembang. Dengan cara ini, strategi yang komprehensif dan terpadu dapat diciptakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat.

1. Investasi dalam Infrastruktur yang Inklusif

Investasi dalam infrastruktur yang inklusif menjadi salah satu strategi utama untuk mengurangi kesenjangan yang ada antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta di antara berbagai kelompok masyarakat. Contoh nyata dalam hal ini dapat ditemukan di China, di mana negara ini telah mengadopsi pendekatan progresif dalam pembangunan infrastruktur. China telah melakukan investasi besar dalam membangun jaringan transportasi yang meliputi pembangunan jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara. Langkah ini bertujuan untuk menghubungkan wilayah perkotaan dan pedesaan, memfasilitasi perdagangan dan investasi, serta membuka aksesibilitas terhadap daerah-daerah yang sebelumnya terpinggirkan (*World Bank*, 2019). Selain meningkatkan konektivitas antar wilayah, investasi infrastruktur ini juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil. Dengan adanya akses yang lebih baik ke pasar dan sumber

daya, para pelaku usaha lokal dapat lebih mudah mengembangkan usaha. Ini berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah pedesaan yang sebelumnya kurang berkembang.

Pentingnya investasi infrastruktur yang inklusif tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Dengan terciptanya akses yang lebih baik terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, masyarakat di pedesaan dapat meningkatkan taraf hidup secara keseluruhan. Hal ini juga dapat membantu mengurangi disparitas dalam akses terhadap layanan publik antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Investasi dalam infrastruktur yang inklusif bukan hanya tentang membangun jalan dan jembatan. Ini merupakan upaya sistematis untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan infrastruktur di seluruh negara, dengan harapan dapat menciptakan masyarakat yang lebih merata dalam hal kesempatan dan kesejahteraan.

2. Pengembangan Industri Berbasis Teknologi dan Inovasi

Pengembangan industri berbasis teknologi dan inovasi merupakan strategi yang krusial dalam meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara serta menciptakan lapangan kerja berkualitas. Contoh yang menginspirasi dapat ditemukan di Korea Selatan, di mana negara ini berhasil melakukan transformasi dari negara berkembang menjadi kekuatan ekonomi global melalui pengembangan industri teknologi tinggi seperti elektronik, otomotif, dan semikonduktor (OECD, 2017). Pemerintah Korea Selatan memberikan dukungan yang kuat untuk riset dan pengembangan, memastikan bahwa inovasi teknologi menjadi fokus utama dalam pembangunan industri. Program-program pelatihan keterampilan teknis juga diberikan secara luas untuk

mempersiapkan tenaga kerja dengan keahlian yang sesuai dengan tuntutan industri modern. Dukungan finansial dan insentif pajak diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor teknologi tinggi, mendorong untuk terus berinovasi dan bersaing di pasar global.

Kerjasama antara sektor publik dan swasta menjadi kunci keberhasilan dalam membangun industri yang inovatif. Melalui kemitraan ini, sumber daya dan pengetahuan dapat disatukan untuk mengatasi tantangan teknis dan meningkatkan kapasitas inovasi dalam skala yang lebih besar. Selain itu, regulasi yang cerdas juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan industri berbasis teknologi. Pengembangan industri berbasis teknologi dan inovasi bukan hanya tentang menciptakan produk baru, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Langkah-langkah ini berperan penting dalam memperkuat fondasi ekonomi suatu negara dan memastikan bahwa negara tersebut tetap relevan dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0.

3. Pemberdayaan Sektor Pertanian dan Pedesaan

Pemberdayaan sektor pertanian dan pedesaan memegang peranan krusial dalam strategi pengembangan ekonomi yang inklusif. India, sebagai contoh, telah mengambil langkah strategis dalam modernisasi pertanian, peningkatan produktivitas, dan diversifikasi ekonomi pedesaan untuk mengatasi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (*World Bank*, 2020). Langkah pertama dalam pemberdayaan sektor pertanian adalah melalui penerapan program subsidi pupuk dan

pengembangan infrastruktur irigasi. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian, memberikan perlindungan terhadap fluktuasi harga, serta meningkatkan pendapatan petani. Selain itu, pelatihan keterampilan pertanian juga menjadi fokus penting, mengajarkan praktik-praktik modern dan teknologi baru kepada petani untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Melalui diversifikasi ekonomi pedesaan, India berupaya mengurangi ketergantungan masyarakat pedesaan pada pertanian sebagai satu-satunya sumber pendapatan. Program-program pengembangan ekonomi lokal, seperti pendirian industri kecil dan menengah serta promosi pariwisata pedesaan, bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan rumah tangga di pedesaan. Hal ini juga membantu mengurangi tekanan urbanisasi yang berlebihan dengan menciptakan peluang ekonomi di wilayah pedesaan. Integrasi teknologi dan inovasi dalam sektor pertanian juga menjadi fokus penting. Penggunaan teknologi informasi untuk akses pasar, pemantauan cuaca, dan manajemen pertanian memberikan keuntungan signifikan bagi petani, memungkinkan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi produksi.

4. Pengembangan Infrastruktur Digital

Pengembangan infrastruktur digital telah menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi tantangan ekonomi global saat ini. Negara-negara seperti Singapura dan Estonia telah menjadi teladan dalam membangun infrastruktur digital yang kokoh, yang mencakup konektivitas internet yang cepat, layanan *e-government* yang efisien, dan ekosistem *start-up* teknologi yang berkembang pesat (UN DESA, 2019).

Infrastruktur digital yang kuat menjadi kunci dalam menciptakan peluang ekonomi baru. Dengan akses internet yang cepat dan luas, pelaku usaha, terutama *start-up* teknologi, dapat dengan mudah mengembangkan produk dan layanan baru, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi digital juga menjadi aset penting dalam menghadapi tantangan ekonomi global, seperti perubahan dalam pola konsumen dan kebutuhan pasar.

Gambar 9. Perkembangan Teknologi dalam Pelayanan



Pengembangan infrastruktur digital juga dapat meningkatkan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat. Melalui layanan *e-government* yang efisien, warga negara dapat dengan cepat dan mudah mengakses berbagai layanan pemerintah, mulai dari pembayaran pajak hingga pendaftaran kependudukan. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah, tetapi juga memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam berurusan dengan berbagai kebutuhan administratif. Pentingnya infrastruktur digital juga terletak pada perannya dalam memperkuat konektivitas global suatu negara. Dengan terhubungnya secara luas ke jaringan internet global, negara

dapat lebih mudah berpartisipasi dalam perdagangan internasional, mengakses sumber daya global, dan menjalin kerjasama lintas batas.

C. Kebijakan Perdagangan dan Intervensi untuk Meningkatkan Inklusivitas Ekonomi

Kebijakan perdagangan dan investasi telah menjadi tonggak penting dalam memperjuangkan inklusivitas ekonomi di berbagai negara. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi tidak hanya terakumulasi pada segelintir, tetapi tersebar merata di seluruh lapisan masyarakat. Banyak negara telah meluncurkan inisiatif kebijakan yang berfokus pada menciptakan lingkungan ekonomi yang mendukung pertumbuhan inklusif. Salah satu strategi yang umum adalah memperkuat aksesibilitas pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Langkah-langkah seperti mengurangi hambatan perdagangan, menyederhanakan prosedur ekspor-impor, dan memberikan dukungan finansial kepada UKM membuka pintu bagi partisipasi ekonomi yang lebih luas. Selain itu, pemerintah seringkali menerapkan insentif investasi untuk mendorong pembangunan di daerah yang terpinggirkan atau kurang berkembang, menciptakan peluang ekonomi yang merata.

Kebijakan perdagangan yang inklusif harus diiringi oleh sistem pendidikan dan pelatihan yang memadai. Ini membantu memastikan bahwa seluruh anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam ekonomi yang berkembang. Dengan demikian, melalui kombinasi kebijakan perdagangan dan investasi yang cermat, bersama dengan investasi dalam sumber daya manusia, masyarakat dapat lebih inklusif dan berdaya saing secara ekonomi.

1. Pengurangan Hambatan Perdagangan

Pengurangan hambatan perdagangan, baik dalam bentuk tarif maupun non-tarif, merupakan langkah kunci untuk meningkatkan inklusivitas ekonomi dengan membuka akses pasar bagi berbagai produk dan pelaku usaha. Melalui perjanjian perdagangan regional dan multilateral seperti Perjanjian Trans-Pasifik dan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN, negara-negara dapat memperluas pasar dan meningkatkan akses bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) serta produsen di wilayah pedesaan (UNCTAD, 2019). Pengurangan hambatan perdagangan juga dapat membantu memperkuat integrasi ekonomi antar negara dan memperluas basis ekspor, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan membuka akses pasar lintas negara, perusahaan-perusahaan dapat mengambil keuntungan dari skala ekonomi yang lebih besar dan mengakses teknologi serta sumber daya yang lebih maju.

Pengurangan hambatan perdagangan dapat memberikan dukungan yang signifikan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dengan memungkinkan untuk bersaing di pasar global. Dengan akses yang lebih mudah ke pasar luar negeri, UKM dapat memperluas jangkauan produk dan menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan dan ekspansi. Lebih jauh lagi, pengurangan hambatan perdagangan juga membuka akses pasar bagi produsen di wilayah pedesaan, yang seringkali memiliki keterbatasan dalam mengakses pasar global. Dengan lebih banyak produk pedesaan yang dapat diperdagangkan secara internasional, produsen di wilayah pedesaan dapat meningkatkan pendapatan dan secara keseluruhan memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

2. Promosi Investasi Asing Langsung (FDI) yang Berkelanjutan

Strategi promosi investasi asing langsung (FDI) yang berkelanjutan menjadi kunci dalam memperkuat kapasitas produktif dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. FDI tidak hanya mendatangkan modal, tetapi juga membawa teknologi, manajemen, dan praktik terbaik yang dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi sektor industri. Negara-negara yang berhasil dalam menarik FDI yang berkelanjutan umumnya memiliki kebijakan investasi yang stabil dan lingkungan bisnis yang kondusif. Kejelasan regulasi dan kepastian hukum adalah faktor kunci yang menentukan dalam menarik minat investor asing untuk berkomitmen jangka panjang.

Insentif fiskal yang menarik juga menjadi faktor penting dalam menarik FDI yang berkelanjutan. Keringanan pajak, kemudahan dalam proses perizinan, dan fasilitas infrastruktur yang memadai dapat menjadi daya tarik tambahan bagi investor asing. Dengan memastikan bahwa FDI yang masuk didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang inklusif, negara dapat meningkatkan potensi FDI dalam menciptakan kesempatan kerja dan transfer teknologi kepada masyarakat setempat. Melalui kerjasama yang terarah antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pembangunan, FDI dapat menjadi salah satu pendorong utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

3. Perlindungan Terhadap Sektor Ekonomi yang Rentan

Perlindungan terhadap sektor ekonomi yang rentan merupakan strategi penting dalam menjaga inklusivitas ekonomi dan menghindari dampak negatif dari liberalisasi perdagangan. Saat negara-negara memasuki pasar global yang semakin terbuka, sektor-sektor tertentu, seperti industri kecil atau pertanian tradisional, rentan terhadap

persaingan yang tidak seimbang. Untuk mengatasi tantangan ini, negara-negara dapat menerapkan kebijakan proteksi selektif, seperti tarif proteksi atau insentif fiskal, yang bertujuan untuk melindungi sektor-sektor yang rentan. Langkah-langkah ini memungkinkan sektor-sektor tersebut untuk berkembang tanpa terlalu terbebani oleh persaingan internasional yang tidak adil.

Perlindungan ekonomi juga dapat memberikan kesempatan bagi sektor-sektor rentan untuk meningkatkan daya saing. Dengan mendapatkan perlindungan sementara, sektor-sektor ini memiliki waktu dan ruang untuk melakukan peningkatan produktivitas, inovasi, dan adaptasi terhadap perubahan pasar global. Selain itu, perlindungan terhadap sektor-sektor rentan juga memberikan waktu bagi negara untuk merancang strategi jangka panjang dalam menghadapi persaingan global.

4. Inklusi Sosial dalam Kebijakan Perdagangan dan Investasi

Inklusi sosial merupakan aspek yang tak boleh diabaikan dalam merancang kebijakan perdagangan dan investasi. Kebijakan ekonomi yang berfokus hanya pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan kesejahteraan sosial dapat menghasilkan ketimpangan yang merugikan bagi masyarakat. Negara-negara perlu memastikan bahwa kebijakan perdagangan dan investasi tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial. Ini mencakup memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, memastikan akses yang adil terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi disparitas ekonomi antar kelompok masyarakat.

Perlindungan tenaga kerja adalah elemen kunci dalam memastikan inklusi sosial dalam kebijakan perdagangan dan investasi.

Hal ini melibatkan pembentukan kebijakan yang mendukung kondisi kerja yang layak, upah yang adil, dan perlindungan terhadap pekerja rentan. Selain itu, akses yang adil terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan juga penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Inklusi sosial juga mencakup pembangunan kapasitas masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Melibatkan masyarakat sipil dalam diskusi dan perumusan kebijakan dapat membantu memastikan bahwa kebijakan perdagangan dan investasi mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir kepentingan tertentu.



BAB VIII

INOVASI DAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Di era globalisasi yang dipenuhi dengan kemajuan teknologi, peran inovasi dan teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi semakin vital. Sebagaimana disorot oleh *World Bank* (2019), inovasi dan teknologi tidak hanya memberikan dorongan terhadap sektor ekonomi tertentu, tetapi juga membuka peluang baru, mengubah paradigma bisnis, dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi, kecerdasan buatan, dan teknologi hijau menjadi pendorong utama dalam menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing di pasar global (OECD, 2019).

Investasi dalam riset dan pengembangan, kerjasama antara sektor publik dan swasta, serta kebijakan yang mendukung inovasi menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan (Katz & Wagner, 2016). Memperkuat kapasitas inovasi dan teknologi menjadi penting bagi negara-negara dalam menghadapi tantangan pembangunan seperti perubahan iklim, ketimpangan, dan kemiskinan (UNDP, 2018). Dengan demikian, mendorong inovasi dan teknologi sebagai strategi integral pembangunan ekonomi menjadi suatu keharusan dalam konteks global yang terus berubah.

A. Peran Inovasi dan Teknologi dalam Mengatasi Ketimpangan

Di era globalisasi yang dipenuhi oleh kemajuan teknologi yang pesat, peran inovasi dan teknologi menjadi semakin penting dalam mengatasi ketimpangan ekonomi. Sebagai alat yang efektif, inovasi dan teknologi telah diakui oleh berbagai negara sebagai kunci untuk menyelesaikan tantangan tersebut dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Melalui adopsi teknologi baru dan pengembangan inovasi, negara-negara dapat memperluas akses ke sumber daya dan peluang ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat, bahkan yang terpinggirkan sekalipun.

Inovasi dan teknologi memungkinkan transformasi struktural yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan memperluas sektor ekonomi yang lebih berdaya saing dan memberikan peluang kepada masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan. Melalui pengembangan infrastruktur teknologi, seperti akses internet yang luas dan layanan digital yang terjangkau, individu dan bisnis di seluruh wilayah dapat terhubung dengan pasar global, menciptakan ruang untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

Inovasi dan teknologi juga memungkinkan pembangunan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar global yang berubah dengan cepat. Program-program pelatihan dan pendidikan yang didukung oleh teknologi memungkinkan masyarakat untuk memperoleh keterampilan baru yang relevan dengan pasar kerja modern, sehingga mengurangi kesenjangan keterampilan dan membuka pintu bagi inklusi ekonomi yang lebih luas. Dengan demikian, investasi dalam inovasi dan teknologi tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga

membantu mengurangi disparitas ekonomi dengan memperluas akses dan kesempatan bagi semua individu dalam masyarakat.

1. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pengetahuan

Inovasi dan teknologi berperan krusial dalam menciptakan ekonomi berbasis pengetahuan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Investasi dalam riset dan pengembangan (R&D) menjadi kunci utama dalam menciptakan lapangan kerja baru di sektor-sektor berbasis teknologi tinggi (UNDP, 2018). Negara-negara yang fokus pada pengembangan R&D cenderung menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, memungkinkan terciptanya sektor-sektor baru yang membutuhkan keterampilan tinggi. Sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) adalah contoh nyata bagaimana inovasi membuka peluang baru bagi masyarakat. TIK telah menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi di banyak negara, memberikan peluang kepada kaum muda dan lapisan masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan untuk terlibat dalam ekonomi digital. Hal ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga memperluas akses terhadap pasar global bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penting untuk mengakses dan membagikan pengetahuan secara merata. Ini dapat dilakukan melalui investasi dalam pendidikan dan pelatihan, sehingga semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan untuk memanfaatkan teknologi secara efektif.

2. Akses Terhadap Pendidikan dan Informasi

Inovasi dan teknologi telah membuka pintu bagi akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan informasi, mengurangi kesenjangan pengetahuan dan keterampilan di antara berbagai kelompok masyarakat.

Program pendidikan *online* dan platform belajar mandiri merupakan contoh nyata bagaimana teknologi telah membantu meningkatkan akses pendidikan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil atau berpenghasilan rendah (*World Bank*, 2019). Melalui teknologi, dapat mengakses materi pelajaran yang sama dengan yang tersedia bagi yang tinggal di perkotaan atau berpenghasilan lebih tinggi. Akses internet yang semakin meluas juga berperan penting dalam menghubungkan individu dengan sumber daya pendidikan dan informasi. Di daerah-daerah terpencil, internet dapat menjadi jembatan untuk mendapatkan informasi terbaru, peluang belajar, dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan demikian, teknologi bukan hanya menjadi alat untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga untuk membuka wawasan dan kesempatan yang sebelumnya tidak terjangkau.

Akses saja tidak cukup. Ketersediaan konten yang relevan dan berkualitas juga menjadi faktor penentu dalam memastikan bahwa akses terhadap pendidikan dan informasi memberikan manfaat yang nyata. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan konten pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan mendukung perkembangan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja saat ini dan masa depan. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah juga harus berperan dalam memastikan bahwa akses terhadap teknologi dan pendidikan merata di seluruh masyarakat. Melalui kerjasama antar lembaga, dapat menciptakan program-program yang menyoal kelompok-kelompok yang paling rentan, sehingga memastikan bahwa potensi transformasional teknologi dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

3. Penciptaan Peluang Kerja Baru

Inovasi dan teknologi telah membuka jalan bagi penciptaan peluang kerja baru dan merangsang pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi besar. Melalui startup teknologi dan ekosistem inovasi, masyarakat kini memiliki kesempatan untuk menjadi pengusaha mandiri dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi (OECD, 2019). Fenomena ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru tetapi juga mengubah paradigma tradisional tentang cara bekerja. Dalam konteks ini, sektor-sektor seperti industri kreatif dan teknologi hijau telah menonjol sebagai sumber peluang kerja yang berkelanjutan dan inklusif bagi berbagai lapisan masyarakat. Bisnis yang berorientasi pada kreativitas tidak hanya memberikan ruang bagi individu untuk mengekspresikan bakat tetapi juga menciptakan lapangan kerja dalam bidang desain, seni, dan hiburan. Di sisi lain, teknologi hijau telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan, membuka peluang bagi pekerjaan di sektor energi terbarukan, manajemen limbah, dan transportasi berkelanjutan.

Untuk memastikan bahwa peluang kerja ini dapat dimanfaatkan secara inklusif, penting untuk memperhatikan aksesibilitas dan kesetaraan dalam pendidikan dan pelatihan. Inisiatif untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan di antara berbagai kelompok masyarakat akan membantu mengurangi kesenjangan dalam partisipasi ekonomi. Selain itu, kebijakan yang mendukung inklusi sosial dan ekonomi perlu diterapkan untuk memastikan bahwa semua orang dapat merasakan manfaat dari kemajuan teknologi dan inovasi dalam menciptakan peluang kerja baru.

4. Pengurangan Biaya dan Peningkatan Efisiensi

Inovasi dan teknologi memiliki peran penting dalam mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi operasional, yang pada akhirnya dapat menghasilkan harga barang dan jasa yang lebih terjangkau bagi masyarakat yang memiliki pendapatan rendah. Dengan memanfaatkan teknologi dalam berbagai tahapan proses produksi dan distribusi, perusahaan dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan kualitas produk secara signifikan (Rodrik, 2018). Proses otomatisasi, penggunaan robotika, dan sistem manajemen rantai pasokan yang canggih adalah beberapa contoh teknologi yang telah membantu perusahaan mengoptimalkan operasional. Dampak positif dari pengurangan biaya produksi ini bukan hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga oleh konsumen. Harga yang lebih terjangkau bagi barang dan jasa memungkinkan akses pasar yang lebih luas bagi masyarakat dengan pendapatan rendah, serta meningkatkan daya beli. Dengan demikian, inovasi teknologi tidak hanya menciptakan efisiensi di tingkat perusahaan tetapi juga menghasilkan dampak sosial yang positif dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Untuk memastikan bahwa manfaat dari pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi ini merata, perlu adanya kebijakan yang mendukung aksesibilitas dan kesetaraan dalam pemanfaatan teknologi. Program pelatihan dan pendidikan yang terfokus pada keterampilan digital dan teknologi bagi masyarakat yang rentan perlu diperkuat. Selain itu, regulasi yang memastikan perlindungan terhadap pekerja dan lingkungan dalam penerapan teknologi juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

B. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Teknologi

Pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan teknologi memiliki peran yang tak terbantahkan dalam menanggapi tantangan global masa kini dan membentuk masyarakat yang inklusif serta berkelanjutan. Seiring dengan laju globalisasi dan revolusi industri 4.0, perlunya tenaga kerja yang memiliki keterampilan teknologi tinggi semakin menjadi kebutuhan mendesak. Dalam era di mana teknologi menjadi tulang punggung ekonomi dan inovasi menjadi kunci keberhasilan, investasi dalam pengembangan sumber daya manusia menjadi krusial. Ini meliputi pendidikan yang mempersiapkan individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja yang terus berubah.

Pendidikan teknologi menjadi pendorong utama dalam membekali individu dengan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi tantangan era digital. Dengan kurikulum yang terkini dan pendekatan pembelajaran yang inovatif, pendidikan teknologi mampu membuka peluang bagi semua lapisan masyarakat, memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam mengikuti kemajuan zaman. Selain itu, pendidikan teknologi juga menciptakan kesempatan untuk inklusi sosial, memungkinkan individu dari berbagai latar belakang dan kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam perkembangan teknologi dan ekonomi.

Pengembangan sumber daya manusia yang efektif juga melibatkan upaya untuk memperkuat *soft skills* seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kepemimpinan. Keterampilan ini penting dalam menghadapi tantangan kompleks yang dihadapi dalam lingkungan global yang berubah dengan cepat. Dengan demikian, melalui

pendidikan teknologi dan pengembangan sumber daya manusia yang berfokus pada keterampilan teknologi tinggi dan *soft skills*, masyarakat dapat membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan yang inklusif dan berkelanjutan.

1. Investasi dalam Pendidikan dan Pelatihan Teknologi

Investasi dalam pendidikan dan pelatihan teknologi merupakan fondasi penting bagi negara-negara yang ingin mempersiapkan tenaga kerja untuk menghadapi tuntutan pasar kerja yang terus berkembang. Program-program pendidikan yang berfokus pada keterampilan teknologi seperti pemrograman komputer, analisis data, dan kecerdasan buatan menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi (*World Bank*, 2019). Negara-negara seperti Singapura dan Finlandia telah menjadi contoh yang mengilhami dalam memperkuat pendidikan STEM (Sains, Teknologi, Rekayasa, dan Matematika) untuk menciptakan tenaga kerja yang adaptif dan inovatif (OECD, 2019), telah meluncurkan program-program inovatif dan merampingkan kurikulum untuk memasukkan lebih banyak materi STEM dalam pendidikan formal.

Investasi dalam pelatihan teknologi untuk tenaga kerja yang sudah ada juga menjadi fokus. Program-program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri membantu memperbarui keterampilan tenaga kerja yang sudah ada agar tetap relevan dalam pasar kerja yang berubah dengan cepat. Melalui kombinasi pendidikan STEM yang diperkuat dan pelatihan teknologi yang disesuaikan, negara-negara dapat memastikan bahwa tenaga kerja siap menghadapi tantangan teknologi masa depan dan merasakan manfaat dari kemajuan teknologi secara merata. Ini adalah langkah penting untuk mencapai pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dalam era digital yang terus berkembang.

2. Penguatan Keterampilan Lunak dan Kemampuan Beradaptasi

Penguatan keterampilan lunak menjadi semakin penting di era di mana adaptasi terhadap perubahan menjadi kunci kesuksesan di tempat kerja. Selain keterampilan teknis, pengembangan sumber daya manusia juga harus memperhatikan aspek-aspek seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kepemimpinan (Katz & Wagner, 2016). Keterampilan ini tidak hanya vital untuk menghadapi dinamika kerja yang terus berubah, tetapi juga untuk memastikan inklusi sosial dalam manfaat dari kemajuan teknologi. Program-program pelatihan holistik dan terintegrasi dapat menjadi solusi untuk memperkuat keterampilan lunak ini sambil meningkatkan keterampilan teknis. Pendekatan ini memungkinkan individu untuk belajar bagaimana mengaplikasikan keterampilan lunak dalam konteks pekerjaan teknis, menciptakan lingkungan kerja yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Kegiatan pengembangan diri yang melibatkan simulasi situasi nyata dan pembelajaran berbasis pengalaman dapat menjadi bagian penting dari program pelatihan. Hal ini memungkinkan individu untuk mengasah keterampilan lunak secara praktis, menghadapi tantangan yang mungkin muncul di tempat kerja, dan belajar dari pengalaman tersebut. Dengan fokus pada penguatan keterampilan lunak yang seimbang dengan keterampilan teknis, negara-negara dapat memastikan bahwa sumber daya manusia tidak hanya siap menghadapi tuntutan teknologi masa depan, tetapi juga mampu mengoptimalkan manfaatnya secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Ini adalah langkah penting

menuju kesuksesan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di era digital yang terus berkembang.

3. Akses Terhadap Pendidikan Teknologi yang Inklusif

Pentingnya akses terhadap pendidikan teknologi yang inklusif membahas kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan keterampilan dalam bidang ini. Negara-negara harus fokus pada upaya untuk memastikan bahwa pendidikan teknologi dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama yang berasal dari latar belakang ekonomi yang rendah atau daerah terpencil. Salah satu langkah penting adalah melalui pembangunan pusat komunitas digital yang dapat menjadi sumber daya penting bagi masyarakat setempat untuk belajar dan mengakses teknologi. Program beasiswa juga menjadi instrumen yang efektif untuk memungkinkan pelajar berprestasi dari keluarga miskin mendapatkan akses ke pendidikan teknologi yang berkualitas tanpa harus terbebani oleh biaya yang tinggi.

Peningkatan akses internet di wilayah pedesaan menjadi prioritas utama. Dengan memperluas infrastruktur internet ke daerah-daerah terpencil, negara-negara dapat memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam perjalanan menuju penguasaan teknologi. Ini akan membuka pintu bagi lebih banyak individu untuk terlibat dalam pendidikan teknologi, mengurangi kesenjangan digital, dan memastikan bahwa manfaat dari kemajuan teknologi dapat dirasakan secara merata di seluruh masyarakat. Melalui langkah-langkah ini, negara-negara akan menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk kesetaraan akses terhadap pendidikan teknologi, sehingga seluruh masyarakat dapat turut merasakan manfaat dari kemajuan teknologi. Ini bukan hanya tentang

mempersiapkan tenaga kerja untuk ekonomi digital, tetapi juga tentang memastikan inklusi sosial dan kesempatan yang adil bagi semua individu dalam menghadapi tantangan teknologi masa depan.

4. Kerjasama antara Pemerintah, Sektor Swasta, dan Perguruan Tinggi

Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan perguruan tinggi memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa pendidikan teknologi memenuhi kebutuhan pasar kerja serta memiliki kualitas tinggi. Ini merupakan fondasi bagi pembaruan dan peningkatan sistem pendidikan yang responsif terhadap dinamika ekonomi dan teknologi saat ini. Program-program kemitraan yang memadukan keahlian akademis dengan kebutuhan praktis industri adalah kunci untuk menciptakan lulusan yang siap kerja. Melalui magang industri dan proyek riset bersama, mahasiswa dapat mendapatkan pengalaman praktis yang relevan dengan kebutuhan industri serta mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam karir. Di samping itu, pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan insentif kepada perusahaan untuk berinvestasi dalam pelatihan karyawan. Inisiatif seperti subsidi pelatihan atau pajak potongan untuk perusahaan yang menyediakan program pelatihan teknologi bagi karyawan dapat mendorong sektor swasta untuk mengambil langkah proaktif dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Dengan meningkatnya keterampilan teknologi di antara karyawan, perusahaan akan menjadi lebih kompetitif di pasar global yang semakin terhubung dan kompetitif.

Kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri juga berpotensi untuk mempercepat inovasi teknologi. Proyek riset bersama antara akademisi dan praktisi industri dapat menghasilkan solusi yang inovatif

untuk tantangan teknis dan bisnis yang dihadapi oleh perusahaan. Ini bukan hanya memberikan manfaat langsung bagi perusahaan tetapi juga mendukung perkembangan ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Pemerintah perlu berperan sebagai pengatur dan fasilitator dalam kerjasama ini. Membangun kerangka kerja yang jelas dan mengkoordinasikan upaya antara pemerintah, sektor swasta, dan perguruan tinggi adalah penting untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan teknologi serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, kerjasama lintas sektor ini merupakan investasi jangka panjang yang krusial bagi kemajuan sosial dan ekonomi.

C. Tantangan Etika dan Sosial dalam Penerapan Teknologi untuk Pembangunan Ekonomi

Penerapan teknologi dalam pembangunan ekonomi telah membawa manfaat besar bagi masyarakat, dengan potensi untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, di tengah dinamika ini, terdapat serangkaian tantangan etika dan sosial yang harus diperhatikan dengan serius. Salah satunya adalah masalah privasi, di mana kemajuan teknologi sering kali berdampak pada pengumpulan data pribadi yang luas, memunculkan kekhawatiran akan penyalahgunaan dan pelanggaran privasi individu. Selain itu, adopsi teknologi juga dapat memperdalam ketidaksetaraan, dengan akses terbatas terhadap infrastruktur digital dan kesenjangan dalam keterampilan teknologi yang berpotensi memperkuat kesenjangan ekonomi dan sosial.

Penggunaan teknologi juga dapat menyebabkan tantangan dalam hal ketenagakerjaan, dengan potensi terjadinya pengangguran struktural

karena otomatisasi dan penggantian pekerjaan manusia oleh mesin dan kecerdasan buatan. Hal ini memicu kebutuhan akan adaptasi masyarakat terhadap perubahan-perubahan dalam dunia kerja serta pemikiran ulang terhadap model-model pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan individu menghadapi pasar kerja yang semakin terdigitalisasi. Selain itu, ada kekhawatiran tentang dampak sosial psikologis dari transformasi ini, termasuk isolasi sosial dan peningkatan gangguan kesehatan mental yang dapat timbul dari perubahan drastis dalam cara hidup dan interaksi manusia.

Untuk menghadapi kemajuan teknologi dalam pembangunan ekonomi, penting bagi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berkolaborasi dalam mengembangkan kebijakan yang memperhitungkan aspek-aspek etika dan sosial ini. Perlu ada pendekatan yang seimbang antara mendorong inovasi dan memastikan bahwa dampak negatifnya diminimalkan atau diatasi. Langkah-langkah seperti pembentukan regulasi yang cermat, investasi dalam literasi digital, dan program-program pelatihan keterampilan dapat membantu menciptakan ekosistem teknologi yang inklusif dan berkelanjutan, yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan.

1. Masalah Privasi dan Penggunaan Data Pribadi

Penggunaan teknologi, terutama dalam ranah internet dan komunikasi, seringkali berdampak pada pengumpulan dan pemanfaatan data pribadi pengguna. Dalam konteks ini, muncul permasalahan serius terkait dengan privasi individu dan potensi penyalahgunaan data oleh entitas seperti perusahaan atau bahkan pemerintah. Adanya ketergantungan yang semakin besar pada teknologi digital telah

meningkatkan kekhawatiran akan kerahasiaan dan keamanan data pribadi. Masyarakat secara luas menjadi sadar akan risiko yang terkait dengan kerentanan data pribadi terhadap akses yang tidak sah atau penyalahgunaan. Tantangan etika yang paling mencolok dalam hal ini adalah menemukan titik keseimbangan yang tepat antara inovasi teknologi yang memajukan dan perlindungan yang memadai terhadap privasi individu. Sementara teknologi terus berkembang dan memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat, perlindungan privasi tidak boleh diabaikan atau dikorbankan. Sudut pandang etis ini menuntut agar setiap inovasi teknologi mempertimbangkan dampaknya terhadap privasi dan kebebasan individu, serta mengakui pentingnya untuk menempatkan kontrol data di tangan pengguna.

Esensi dari tantangan privasi ini adalah upaya untuk memastikan bahwa individu memiliki kendali penuh atas data pribadi. Pengguna harus memiliki kemampuan untuk memahami bagaimana data dikumpulkan, disimpan, dan digunakan, serta memiliki opsi untuk mengontrol akses dan penggunaan data tersebut. Oleh karena itu, transparansi dan kejelasan dalam kebijakan privasi serta mekanisme kontrol yang mudah diakses menjadi krusial dalam menjaga integritas privasi individu dalam era digital ini. Perlindungan privasi dan penggunaan data pribadi merupakan isu krusial yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk perusahaan teknologi, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan. Penting bagi kita semua untuk berupaya menemukan keseimbangan yang tepat antara kemajuan teknologi dan perlindungan privasi, serta memastikan bahwa hak-hak individu untuk memiliki kendali atas data pribadi dihormati dan dilindungi secara efektif.

2. Ketidaksetaraan Akses dan *Digital divide*

Pengembangan teknologi sering kali menjadi pemicu meningkatnya kesenjangan dalam akses dan pemanfaatan teknologi di antara berbagai kelompok masyarakat. Fenomena ini dikenal sebagai *digital divide*, yang menciptakan divisi yang signifikan antara yang memiliki akses yang memadai terhadap teknologi dan yang tidak. Kelompok-kelompok seperti penduduk pedesaan atau keluarga berpenghasilan rendah sering kali menjadi korban utama dari ketidaksetaraan akses ini, yang dapat menghasilkan ketimpangan ekonomi dan sosial yang lebih dalam di masyarakat. Tantangan sosial ini memerlukan respons yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak. Pemerintah, sektor swasta, organisasi nirlaba, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk mengatasi *digital divide* dan memastikan bahwa manfaat teknologi dapat diakses secara merata oleh semua orang. Langkah-langkah seperti penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang terjangkau, pelatihan keterampilan digital, dan subsidi perangkat teknologi dapat membantu mengurangi kesenjangan akses dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat yang terpinggirkan untuk terlibat dalam ekonomi digital.

Digital divide bukan hanya masalah akses fisik terhadap teknologi, tetapi juga melibatkan masalah literasi digital dan kecakapan teknologi yang merata di antara masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan akses harus diimbangi dengan investasi dalam pendidikan digital yang inklusif dan berkelanjutan. Program-program pelatihan dan pendidikan yang menargetkan kelompok-kelompok yang rentan dapat membantu memperkuat kapasitas untuk menggunakan teknologi secara efektif, sehingga membantu mengurangi divisi digital. Dengan menghadapi tantangan ini secara bersama-sama,

kita dapat membuka peluang bagi lebih banyak orang untuk mengakses peluang ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan yang disediakan oleh teknologi. Melalui kerjasama lintas sektor dan komitmen untuk menciptakan inklusivitas digital, kita dapat memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak meninggalkan siapa pun di belakang, melainkan menjadi alat untuk memperkuat kesetaraan dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

3. Pengangguran Struktural dan Ketidakpastian Pekerjaan

Penerapan teknologi dalam berbagai sektor ekonomi seringkali mengubah struktur pasar kerja secara signifikan. Perubahan ini tidak hanya mencakup kemunculan lapangan kerja baru tetapi juga meningkatkan ketidakpastian pekerjaan bagi individu. Otomatisasi dan robotisasi, sebagai contoh, telah menggantikan tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh pekerja manusia (Autor, 2015). Dampaknya terasa dalam bentuk pengangguran struktural yang mungkin terjadi ketika pekerjaan tradisional menjadi tidak relevan atau tergantikan oleh teknologi. Perubahan struktural ini dapat menyebabkan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus menjadi lebih berharga, sementara pekerjaan rutin atau yang memerlukan keterampilan rendah cenderung mengalami penurunan permintaan. Dalam konteks ini, pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan teknologi baru menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing individu di pasar kerja yang berubah ini.

Ketidakpastian pekerjaan juga menciptakan ketidakpastian ekonomi bagi individu dan masyarakat secara luas. Ini dapat mengganggu stabilitas finansial dan kesejahteraan sosial, meningkatkan risiko kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan sektor swasta untuk berkolaborasi dalam

mengembangkan kebijakan yang mendukung transisi pekerjaan, memberikan pelatihan, dan menciptakan peluang kerja baru. Meskipun tantangan pengangguran struktural dan ketidakpastian pekerjaan signifikan, ada juga peluang untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Ini termasuk investasi dalam pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja masa depan, serta mempromosikan kewirausahaan dan inovasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Dengan pendekatan yang holistik dan adaptif, masyarakat dapat menghadapi tantangan ini dengan lebih baik sambil memastikan inklusi dan keadilan dalam era transformasi teknologi.

4. Tantangan Etika dalam Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI)

Penerapan kecerdasan buatan (AI) telah membawa sejumlah tantangan etika yang perlu dipertimbangkan dengan serius. Salah satu masalah utamanya adalah keputusan yang diambil oleh algoritma AI, yang sering kali menjadi titik fokus perdebatan. Algoritma AI cenderung beroperasi berdasarkan data pelatihan, dan jika data tersebut tidak seimbang atau tidak representatif secara etis, maka hasilnya dapat menciptakan bias yang signifikan. Misalnya, dalam bidang kesehatan atau keuangan, keputusan yang dipengaruhi oleh bias dalam data pelatihan dapat memiliki konsekuensi serius bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Keputusan yang diambil oleh sistem AI juga bisa memiliki implikasi sosial yang luas. Misalnya, dalam pengaturan kesehatan, algoritma yang tidak dipertimbangkan secara etis dapat mempengaruhi diagnosa atau rekomendasi pengobatan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi hidup dan kesehatan individu secara signifikan. Begitu pula dalam konteks keuangan, keputusan AI dalam

pengelolaan investasi atau pemberian pinjaman dapat mempengaruhi stabilitas keuangan individu dan keluarga.

Sangat penting untuk mempertimbangkan implikasi etika dalam setiap tahap pengembangan dan implementasi AI. Hal ini meliputi pengumpulan data yang etis, perancangan algoritma yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta pengujian yang cermat untuk mengidentifikasi dan mengurangi bias yang mungkin terjadi. Selain itu, mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan yang kuat juga perlu diterapkan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh sistem AI selaras dengan nilai-nilai etika dan kemanusiaan. Kolaborasi antara pengembang AI, ahli etika, pemerintah, dan masyarakat sipil juga diperlukan untuk menangani tantangan etika ini secara efektif. Dengan pendekatan yang holistik dan proaktif, kita dapat memastikan bahwa perkembangan AI tidak hanya membawa manfaat teknis tetapi juga beroperasi dalam kerangka nilai yang memperhatikan kepentingan dan martabat manusia secara menyeluruh.



BAB IX

HUBUNGAN ANTAR-NEGARA DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL

Di era globalisasi yang semakin terintegrasi, kerja sama internasional menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ekonomi global yang kompleks. Persaingan perdagangan mendorong negara-negara untuk merumuskan kebijakan perdagangan yang adil. Selain itu, kerja sama dalam investasi, teknologi, dan bantuan pembangunan mempercepat pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Pembangunan infrastruktur lintas batas meningkatkan konektivitas dan integrasi regional. Dalam menghadapi tantangan-tantangan global seperti perubahan iklim, krisis kemanusiaan, dan penanggulangan kemiskinan, kerja sama internasional juga berperan penting. Negara-negara secara bersama-sama berusaha untuk merumuskan solusi-solusi yang efektif dan berkelanjutan melalui lembaga-lembaga multilateral seperti PBB dan IMF (UNDP, 2020). Contoh kerja sama internasional dalam bidang lingkungan termasuk kesepakatan Paris Agreement untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan kerja sama lintas batas dalam penanggulangan bencana alam (Stern, 2019). Dengan demikian, kerja sama internasional tidak hanya memperkuat kesejahteraan ekonomi masyarakat, tetapi juga merupakan kunci untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan global.

A. Peran organisasi Internasional dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Global

Organisasi internasional berperan kunci dalam menangani ketimpangan ekonomi global yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh dunia. Melalui kerangka kerja yang kuat dan cakupan yang luas, organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia mampu merumuskan kebijakan yang mempromosikan pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Misalnya, menyusun program-program pembangunan dan strategi global yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara negara-negara kaya dan miskin serta memperkuat inklusi ekonomi.

Organisasi internasional juga memberikan bantuan finansial yang penting bagi negara-negara yang menghadapi kesulitan ekonomi atau bencana alam. Bantuan ini dapat berupa pinjaman dengan syarat-syarat yang memadai atau bantuan langsung untuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan. Dengan memfasilitasi akses terhadap sumber daya finansial ini, organisasi internasional dapat membantu negara-negara dalam mengatasi hambatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Yang tidak kalah pentingnya, organisasi internasional juga memfasilitasi kerja sama antar negara dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Melalui forum-forum seperti G20 atau WTO, negara-negara dapat berdiskusi dan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Kerja sama ini memungkinkan adopsi kebijakan yang saling mendukung, pertukaran pengetahuan dan teknologi, serta pengurangan hambatan perdagangan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

di seluruh dunia. Dengan demikian, peran organisasi internasional sangat penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua negara dan masyarakat di dunia.

1. Pengembangan Kebijakan dan Standar Internasional

Pengembangan kebijakan dan standar internasional menjadi fokus utama bagi organisasi internasional dalam menangani ketimpangan ekonomi global. Salah satu contohnya adalah peran yang dimainkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). WTO berperan penting dalam merumuskan kebijakan perdagangan yang bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan antar negara, yang sering menjadi penyebab utama ketimpangan ekonomi (WTO, 2020). Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih adil dan inklusif bagi semua anggota, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang seimbang di seluruh dunia. Selain WTO, Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (*Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD*) juga memegang peran vital dalam mengatasi ketimpangan ekonomi. OECD berfokus pada mempromosikan kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan di antara negara-negara anggotanya (OECD, 2021). Melalui berbagai inisiatif, OECD berusaha untuk mengurangi kesenjangan antara negara maju dan berkembang serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.

Kerja sama antara negara-negara anggota dan organisasi internasional menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan dan standar yang efektif. Dialog terbuka dan koordinasi antara berbagai pihak

diperlukan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang mendasari ketimpangan ekonomi dan merancang solusi yang sesuai. Dengan demikian, kerja sama ini akan memastikan implementasi kebijakan yang lebih efektif dan menyeluruh, yang dapat mengarah pada peningkatan kesetaraan ekonomi di seluruh dunia.

2. Pemberian Bantuan dan Dukungan Finansial

Organisasi internasional berperan penting dalam memberikan bantuan dan dukungan finansial kepada negara-negara yang terkendala oleh ketimpangan ekonomi. Salah satu contoh terkemuka adalah peran yang dimainkan oleh Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund/IMF*). IMF menyediakan pinjaman dan dukungan finansial kepada negara-negara yang mengalami krisis ekonomi atau kesulitan keuangan yang berpotensi memperburuk ketimpangan ekonomi (IMF, 2021). Melalui program-program bantuan ini, IMF bertujuan untuk membantu negara-negara tersebut mengatasi tantangan ekonomi dan memulihkan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Dukungan finansial dari organisasi seperti IMF memberikan dorongan penting bagi negara-negara yang sedang berjuang dengan ketimpangan ekonomi. Pinjaman dan bantuan finansial ini dapat digunakan untuk memperkuat infrastruktur ekonomi, meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta mendukung reformasi struktural yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih inklusif.

Bantuan finansial saja tidak cukup untuk mengatasi ketimpangan ekonomi secara menyeluruh. Diperlukan juga langkah-langkah kebijakan yang holistik dan terkoordinasi, termasuk reformasi struktural, perbaikan tata kelola ekonomi, dan upaya untuk meningkatkan inklusi

sosial dan kesetaraan. IMF dan organisasi internasional lainnya juga perlu bekerja sama dengan negara-negara penerima bantuan untuk memastikan bahwa dana yang disediakan digunakan secara efektif dan transparan, serta untuk membangun kapasitas dan keberlanjutan jangka panjang. Dengan demikian, bantuan finansial dapat menjadi alat yang efektif dalam upaya global untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

3. Pengembangan Kapasitas dan Pendidikan

Organisasi internasional memiliki peran penting dalam upaya pengembangan kapasitas dan pendidikan di negara-negara berkembang untuk mereduksi ketimpangan ekonomi. Salah satu pelaku utama dalam hal ini adalah Bank Dunia (*World Bank*), yang aktif menyelenggarakan program-program pengembangan kapasitas dan pendidikan di berbagai negara. Tujuan utama dari program-program ini adalah untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam berbagai bidang yang relevan dengan pembangunan ekonomi (*World Bank, 2021*). Dengan meningkatkan kapasitas individu dan institusi di negara-negara berkembang, diharapkan dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang inklusif. Program pengembangan kapasitas dan pendidikan yang diselenggarakan oleh Bank Dunia mencakup berbagai aspek, mulai dari pelatihan keterampilan teknis hingga penguatan sistem pendidikan dan pelatihan kerja. Melalui upaya ini, Bank Dunia berusaha untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara berkembang di pasar global dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat mengakses kesempatan pendidikan dan pengembangan yang setara.

Pengembangan kapasitas dan pendidikan bukanlah solusi instan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. Diperlukan juga langkah-langkah yang mendalam untuk memperbaiki struktur ekonomi, meningkatkan akses terhadap sumber daya, dan mempromosikan inklusi sosial. Oleh karena itu, Bank Dunia dan organisasi internasional lainnya perlu bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lokal untuk merancang strategi yang holistik dan berkelanjutan dalam mengatasi ketimpangan ekonomi. Kerja sama antar negara-negara dan organisasi internasional juga penting dalam memastikan efektivitas program-program pengembangan kapasitas dan pendidikan ini. Melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman, serta koordinasi dalam alokasi sumber daya, dapat meningkatkan dampak positif dari upaya-upaya ini dan mempercepat kemajuan menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di seluruh dunia.

4. Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Ekonomi Lokal

Partisipasi organisasi internasional dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi lokal di negara-negara berkembang merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam hal ini adalah Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB). ADB telah aktif menyelenggarakan proyek-proyek infrastruktur di berbagai negara dengan tujuan meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti listrik, air bersih, dan transportasi (ADB, 2021). Melalui program-program ini, ADB berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi. Proyek-proyek

infrastruktur yang diselenggarakan oleh ADB memiliki dampak yang luas dalam pembangunan ekonomi lokal. Misalnya, pembangunan jaringan transportasi yang lebih baik dapat membuka akses ke pasar bagi produk-produk lokal dan memfasilitasi pertumbuhan sektor ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal. Demikian pula, penyediaan akses yang lebih baik terhadap listrik dan air bersih dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah.

Pembangunan infrastruktur dan ekonomi lokal tidak boleh dilakukan tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan dan dampak lingkungan. Penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk perlindungan lingkungan, penggunaan sumber daya yang efisien, dan keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kerja sama antara ADB, pemerintah lokal, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting dalam memastikan bahwa pembangunan infrastruktur berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi lokal yang dikelola dengan baik, organisasi internasional seperti ADB dapat berperan sebagai katalisator dalam mengurangi ketimpangan ekonomi antara negara-negara berkembang dan negara maju, serta di antara wilayah dalam sebuah negara. Dengan mengutamakan partisipasi masyarakat lokal dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, langkah-langkah ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mempercepat kemajuan menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di seluruh dunia.

B. Program Bantuan dan Kerja Sama Pembangunan

Program bantuan dan kerja sama pembangunan berperan sentral dalam menanggulangi ketimpangan ekonomi global. Dengan menyediakan bantuan finansial, teknis, dan kebijakan kepada negara-negara berkembang, program-program ini berusaha mempercepat pertumbuhan ekonomi secara merata. Melalui pendekatan ini, tidak hanya memberikan dorongan keuangan yang diperlukan, tetapi juga mengalirkan pengetahuan dan keterampilan teknis yang memungkinkan negara-negara tersebut untuk mengembangkan infrastruktur, industri, dan sumber daya manusia. Tujuan utama dari berbagai program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang. Dengan memberikan akses terhadap sumber daya dan pelatihan yang diperlukan, program-program ini membantu dalam meningkatkan taraf hidup penduduk setempat. Dengan demikian, tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh bagi penduduk yang kurang beruntung.

Program bantuan dan kerja sama pembangunan bertujuan untuk memperkuat kapasitas pembangunan di tingkat lokal. Dengan bekerja bersama pemerintah dan organisasi lokal, memfasilitasi pembangunan berkelanjutan yang diarahkan oleh komunitas itu sendiri. Ini tidak hanya menciptakan hasil yang lebih berkelanjutan dalam jangka panjang, tetapi juga memastikan bahwa solusi-solusi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Dengan demikian, program-program ini menjadi instrumen penting dalam upaya mengurangi ketimpangan ekonomi global dan memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif.

1. Bantuan Pembangunan Berbasis Kebutuhan dan Prioritas Lokal

Program-program bantuan pembangunan yang efektif membutuhkan pendekatan yang berpusat pada kebutuhan dan prioritas lokal. Dengan memahami konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat penerima, bantuan yang diberikan dapat menjadi lebih relevan dan memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Sebagai contoh, Program PBB untuk Pengembangan (UNDP) telah mengadopsi pendekatan pembangunan berbasis hak asasi manusia yang menempatkan inklusivitas, keadilan, dan partisipasi masyarakat sebagai prinsip utama (UNDP, 2021). Pendekatan ini memastikan bahwa masyarakat lokal memiliki peran aktif dalam proses pembangunan, sehingga bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi.

Salah satu keuntungan utama dari pendekatan berbasis kebutuhan dan prioritas lokal adalah kemampuannya untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika lokal dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan mengadopsi pendekatan ini, program-program bantuan dapat merancang solusi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, yang berpotensi memberikan dampak yang jauh lebih besar dalam mengatasi ketimpangan ekonomi.

Dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, pendekatan ini juga memperkuat kapasitas lokal dan meningkatkan kepemilikan terhadap inisiatif pembangunan. Hal ini membantu memastikan keberlanjutan dari proyek-proyek pembangunan dan membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif di masa mendatang. Dalam konteks global yang kompleks dan beragam, penting bagi lembaga-lembaga pembangunan seperti UNDP

untuk terus mengembangkan dan mengimplementasikan pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan lokal. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga membantu membangun kapasitas lokal dan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi ketimpangan ekonomi secara berkelanjutan.

2. Penguatan Kapasitas dan Institusi Pembangunan

Penguatan kapasitas dan institusi pembangunan merupakan pilar utama dalam program bantuan pembangunan di negara-negara penerima. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kemampuan negara-negara berkembang dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan pembangunan. Ini dilakukan melalui berbagai cara, termasuk penyediaan bantuan teknis, pelatihan, dan dukungan kelembagaan. Sebagai contoh, Bank Dunia (*World Bank*) telah aktif menyelenggarakan program bantuan teknis di berbagai sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemerintahan (*World Bank, 2021*). Melalui upaya ini, negara-negara penerima dapat meningkatkan kapasitas dalam mengelola sumber daya dan merumuskan kebijakan yang efektif untuk memajukan pembangunan ekonomi. Bantuan teknis dan pelatihan yang disediakan oleh lembaga pembangunan seperti Bank Dunia memungkinkan negara-negara berkembang untuk memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada dengan lebih efisien. Ini termasuk pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola proyek-proyek pembangunan dengan baik, meningkatkan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat infrastruktur dasar.

Penguatan institusi pembangunan merupakan faktor kunci dalam memastikan kelangsungan dan keberlanjutan pembangunan ekonomi di tingkat lokal. Dengan memperkuat institusi-institusi seperti pemerintah lokal, lembaga keuangan, dan badan regulasi, negara-negara berkembang dapat meningkatkan kemampuan dalam mengimplementasikan kebijakan dan program pembangunan secara efektif. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan dapat diprediksi bagi investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan sosial di masa depan. Penguatan kapasitas dan institusi pembangunan menjadi langkah penting dalam mempercepat kemajuan menuju pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di negara-negara berkembang. Melalui kerja sama yang erat antara lembaga pembangunan internasional dan pemerintah lokal, upaya ini dapat membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat dan memperkuat fondasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Lokal

Pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat lokal merupakan fokus utama dalam program bantuan dan kerja sama pembangunan. Terutama di daerah-daerah terpinggirkan atau rentan, berbagai program telah dirancang untuk memberdayakan masyarakat lokal melalui pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), pelatihan keterampilan, dan penyediaan akses ke pasar. Tujuan dari program-program ini adalah untuk meningkatkan penghasilan, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat setempat (OECD, 2020). Pendekatan ini bertujuan untuk membuat masyarakat lokal menjadi agen perubahan dalam mengatasi ketimpangan ekonomi serta memperkuat daya saing dan ketahanan ekonomi di tingkat lokal.

Program-program pemberdayaan ekonomi sering kali melibatkan berbagai inisiatif, seperti pelatihan kewirausahaan, pendampingan bisnis, dan akses ke modal usaha. Melalui dukungan ini, masyarakat lokal diberikan kesempatan untuk mengembangkan dan mengelola usaha sendiri, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan lapangan kerja di sekitarnya. Selain itu, pelatihan keterampilan juga berperan penting dalam mempersiapkan angkatan kerja lokal untuk menanggapi permintaan pasar yang terus berkembang. Selain aspek ekonomi, pemberdayaan sosial juga menjadi fokus dalam upaya ini. Program-program tersebut mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, memperkuat jaringan sosial dan kohesi komunitas, serta mempromosikan kesetaraan gender dan inklusi sosial. Dengan memperkuat kapasitas sosial masyarakat, program-program ini tidak hanya membantu mengatasi ketimpangan ekonomi, tetapi juga memperkuat fondasi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

4. Kerja Sama Internasional dan Regional

Kerja sama internasional dan regional berperan krusial dalam program bantuan dan kerja sama pembangunan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi global. Kolaborasi ini memungkinkan negara-negara donor dan penerima untuk berbagi pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman, sehingga menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Sebagai contoh, Uni Eropa (UE) telah memimpin upaya kerja sama internasional dengan memberikan bantuan pembangunan kepada negara-negara berkembang di Afrika, Karibia, dan Pasifik (*European Commission, 2021*). Melalui inisiatif ini, UE bekerja sama

dengan negara-negara mitra untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas dan merancang program bantuan yang sesuai dengan konteks lokal.

Kerja sama regional juga memegang peran penting dalam memfasilitasi integrasi ekonomi dan pertukaran antar negara-negara di suatu kawasan. Di banyak bagian dunia, negara-negara telah membentuk organisasi regional dan mengadopsi kerangka kerja kerja sama ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan dan memperkuat ketahanan ekonomi. Misalnya, Uni Eropa mendorong integrasi ekonomi di antara negara-negara anggotanya melalui pembentukan pasar tunggal dan serikat moneter, yang memungkinkan aliran barang, jasa, dan modal yang lebih bebas di seluruh kawasan tersebut.

Kerja sama regional juga memberikan platform bagi negara-negara untuk berkolaborasi dalam mengatasi masalah bersama yang melekat pada wilayahnya. Contohnya adalah ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*), yang berfungsi sebagai forum bagi negara-negara Asia Tenggara untuk bekerja sama dalam berbagai bidang, termasuk pembangunan ekonomi, peningkatan infrastruktur, dan peningkatan akses pasar. Kerja sama internasional dan regional merupakan instrumen penting dalam upaya global untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Dengan mempromosikan pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman antar negara, kerja sama ini memungkinkan penciptaan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan pembangunan di tingkat lokal, regional, dan global.

C. Tantangan Diplomasi Ekonomi dalam Menghadapi Ketimpangan

Diplomasi ekonomi telah menjadi salah satu instrumen utama dalam upaya mengatasi ketimpangan ekonomi global. Dengan mempromosikan kerja sama internasional, negara-negara dapat saling membantu dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Kolaborasi lintas batas dalam hal perdagangan dan investasi memungkinkan transfer teknologi, pengetahuan, dan sumber daya yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Melalui diplomasi ekonomi, negara-negara juga dapat merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat yang rentan dan mengarahkan upaya menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam melakukan diplomasi ekonomi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi global. Pertama, perbedaan kepentingan dan prioritas antara negara-negara dapat menghambat tercapainya kesepakatan dan kerja sama yang efektif. Kedua, ketidakstabilan politik dan konflik di beberapa wilayah dapat mengganggu upaya diplomasi ekonomi dan menghambat perdagangan serta investasi lintas batas. Ketiga, adanya praktik proteksionisme dan ketidakadilan dalam sistem perdagangan global juga menjadi tantangan besar yang menghambat terciptanya kesetaraan ekonomi antarnegara.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk berkolaborasi secara efektif. Negara-negara perlu memperkuat kerja sama internasional dan membangun hubungan yang saling menguntungkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Selain itu, diperlukan upaya bersama untuk memperbaiki

sistem perdagangan global agar lebih inklusif dan adil bagi semua pihak. Dengan demikian, diplomasi ekonomi dapat menjadi alat yang efektif dalam mengatasi ketimpangan ekonomi global dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh dunia.

1. Polarisasi dan Ketidaksetaraan Kekuatan Ekonomi

Polarisasi dan ketidaksetaraan kekuatan ekonomi telah menjadi landasan yang menantang bagi diplomasi ekonomi global saat ini. Dalam lanskap internasional yang didominasi oleh negara-negara maju, kesenjangan ekonomi dan negara-negara berkembang seringkali menciptakan ketidakseimbangan dalam kekuatan negosiasi. Sebagaimana disorot oleh Drezner (2018), kekuatan ekonomi yang lebih besar dari negara-negara maju memberi keunggulan dalam menentukan arah percakapan dalam forum-forum internasional. Hal ini menyulitkan negara-negara berkembang untuk memperjuangkan kepentingan dan prioritas ekonomi dengan efektif. Negara-negara berkembang, dengan kebutuhan dan aspirasi ekonomi yang unik, sering kali harus berjuang keras untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan yang setara di arena global. Dengan begitu banyak aspek kehidupan global yang terkait erat dengan faktor ekonomi, ketimpangan ekonomi menjadi hambatan besar bagi negara-negara berkembang dalam mencapai pertumbuhan dan kemajuan yang berkelanjutan. Baldwin (2019) menggarisbawahi bahwa ketidaksetaraan ini juga meningkatkan tingkat ketidakpastian politik dan keamanan global.

Peningkatan ketidakpastian politik dan keamanan global menjadi dampak langsung dari polarisasi ekonomi yang semakin meluas. Fluktuasi ekonomi yang tidak terduga dapat menimbulkan ketegangan antarnegara dan mengganggu stabilitas perdagangan internasional.

Dalam situasi ini, negara-negara berkembang sering kali menjadi korban yang paling terpuak, dengan ketergantungan ekonomi yang besar pada perdagangan global. Mengatasi tantangan polarisasi dan ketidaksetaraan ekonomi membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan semua pihak. Negara-negara maju perlu mengakui tanggung jawab untuk memperjuangkan inklusivitas dan kesetaraan dalam sistem ekonomi global, sementara negara-negara berkembang harus memperkuat kapasitas dan berperan yang lebih aktif dalam forum-forum internasional. Hanya dengan kerja sama yang kokoh dan komitmen bersama, polarisasi dan ketidaksetaraan ekonomi dapat diatasi untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan secara ekonomi.

2. Perdagangan dan Investasi Proteksionisme

Perdagangan dan investasi proteksionisme telah menjadi pemandangan yang semakin umum dalam diplomasi ekonomi saat ini, menciptakan tantangan signifikan bagi stabilitas perdagangan global. Peningkatan kecenderungan proteksionisme, sebagaimana yang dikemukakan oleh Rodrik (2018), membahas kekhawatiran akan perlindungan industri domestik sebagai alasan utama di balik kebijakan proteksionis yang diadopsi oleh banyak negara. Namun, tindakan ini sering kali memiliki dampak yang merugikan, seperti membatasi akses pasar bagi negara lain dan memicu pertumpahan ketidakpastian dalam perdagangan global. Keberlangsungan kebijakan proteksionis juga dapat merugikan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, baik di tingkat domestik maupun internasional. Meskipun mungkin memberikan perlindungan sementara bagi industri dalam negeri, dalam jangka panjang, hal tersebut dapat membatasi inovasi, memperlambat pertumbuhan, dan menyebabkan peningkatan ketidaksetaraan ekonomi.

Tantangan ini semakin diperparah oleh peningkatan ketidakpastian dalam hubungan perdagangan internasional, terutama dalam konteks perselisihan dagang antara negara-negara besar. Dampak perang dagang, seperti tarif yang dinaikkan dan hambatan perdagangan yang diberlakukan, tidak hanya memberikan ketidakpastian bagi pelaku pasar, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara-negara yang terlibat dan bahkan bagi ekonomi global secara keseluruhan. Untuk mengatasi tantangan perdagangan dan investasi proteksionisme, diperlukan kerjasama internasional yang kuat dan komitmen untuk menjaga sistem perdagangan yang terbuka dan adil. Upaya kolaboratif dalam rangka memperkuat kerangka kerja perdagangan multilateral, serta mempromosikan dialog konstruktif antara negara-negara dalam menyelesaikan perselisihan perdagangan, menjadi kunci untuk meredakan ketidakpastian dan membangun fondasi yang lebih stabil bagi perdagangan internasional yang berkelanjutan.

3. Krisis Lingkungan dan Perubahan Iklim

Krisis lingkungan dan perubahan iklim adalah tantangan serius yang tidak bisa diabaikan dalam diplomasi ekonomi saat ini. Menurut Sachs (2015), dampaknya dapat memperbesar ketimpangan ekonomi global jika tidak ditangani dengan serius. Negara-negara berkembang, khususnya yang rentan terhadap bencana alam dan krisis lingkungan, menjadi pihak yang paling merasakan kerugian ekonomi yang besar akibat perubahan iklim (IPCC, 2018). Oleh karena itu, diplomasi ekonomi harus aktif dalam merumuskan kebijakan internasional yang mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan (Ostrom & Janssen, 2015). Langkah-langkah strategis dan kerjasama internasional dalam diplomasi ekonomi sangat penting

untuk mengatasi krisis lingkungan dan perubahan iklim. Dengan mengintegrasikan kebijakan lingkungan ke dalam kerangka kerja perdagangan dan investasi internasional, negara-negara dapat mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan dan praktik ekonomi berkelanjutan. Selain itu, dukungan finansial dan teknis dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim juga merupakan bagian penting dari diplomasi ekonomi yang berkelanjutan (Sachs, 2015).

Pentingnya diplomasi ekonomi dalam mengatasi krisis lingkungan dan perubahan iklim juga terlihat dari upaya pembentukan kerangka kerja internasional seperti Kesepakatan Paris. Melalui kesepakatan ini, negara-negara bersedia untuk bekerja sama dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Diplomasi ekonomi berperan penting dalam menjaga momentum kesepakatan tersebut dan mendorong implementasi komitmen yang diambil oleh negara-negara peserta (IPCC, 2018). Diplomasi ekonomi memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa tantangan lingkungan dan perubahan iklim dihadapi secara efektif dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi internasional, pengintegrasian kebijakan lingkungan, dan implementasi kesepakatan internasional yang kuat, diplomasi ekonomi dapat menjadi kekuatan utama dalam merespons tantangan global ini untuk mencapai ekonomi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan bagi semua negara dan generasi mendatang.

4. Tantangan Teknologi dan Transformasi Digital

Tantangan teknologi dan transformasi digital memperumit diplomasi ekonomi di era revolusi industri 4.0. Meskipun perkembangan

seperti kecerdasan buatan (AI), *Internet of Things* (IoT), dan *blockchain* menjanjikan peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, potensi untuk memperdalam ketimpangan ekonomi juga sangat nyata (Brynjolfsson & McAfee, 2014). Oleh karena itu, diplomasi ekonomi harus secara proaktif beradaptasi dengan perubahan teknologi ini untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh semua negara dan masyarakat. Salah satu langkah penting dalam menghadapi tantangan ini adalah dengan membangun kerangka kerja regulasi yang responsif terhadap perubahan teknologi. Diplomasi ekonomi perlu bekerja sama dengan para pemangku kepentingan, termasuk industri dan akademisi, untuk mengembangkan kebijakan yang memfasilitasi inovasi teknologi sekaligus melindungi kepentingan ekonomi yang lebih luas. Selain itu, kerjasama internasional dalam pengembangan standar teknologi dan perlindungan kekayaan intelektual juga menjadi kunci dalam memastikan akses yang adil dan seimbang terhadap teknologi (Brynjolfsson & McAfee, 2014).

Diplomasi ekonomi juga harus memperkuat investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk menghadapi tantangan teknologi ini. Mengembangkan sumber daya manusia yang terampil dan terlatih dalam bidang teknologi baru adalah kunci untuk meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara di era digital. Dengan demikian, diplomasi ekonomi dapat memfasilitasi kerjasama internasional dalam pertukaran pengetahuan dan teknologi, serta mendukung program-program pelatihan lintas-batas yang memperkuat kapasitas tenaga kerja global (Brynjolfsson & McAfee, 2014). Diplomasi ekonomi juga harus memperhatikan dampak sosial dari transformasi digital ini. Tantangan seperti pengangguran struktural dan perubahan dalam struktur pasar

tenaga kerja perlu ditangani secara hati-hati melalui kebijakan inklusif yang memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam era digital ini.



BAB X

KESIMPULAN

Ekonomi Pembangunan: Teori dan Praktik dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Global adalah sebuah buku yang menggambarkan kompleksitas dan tantangan dalam menghadapi ketimpangan ekonomi global serta upaya untuk mengatasi masalah tersebut melalui pendekatan teori dan praktik dalam bidang ekonomi pembangunan. Melalui penjelasan yang komprehensif, buku ini membahas peran berbagai aktor seperti negara-negara, organisasi internasional, dan sektor swasta dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk memperbaiki ketimpangan ekonomi yang ada. Salah satu kesimpulan utama dari buku ini adalah bahwa ketimpangan ekonomi global merupakan tantangan yang kompleks dan multidimensional yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan hak asasi manusia. Ketimpangan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan disparitas pendapatan antara individu dan kelompok, tetapi juga meliputi disparitas akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan hak-hak dasar.

Buku ini juga menekankan pentingnya pemahaman tentang teori dan praktik ekonomi pembangunan dalam mengatasi ketimpangan ekonomi global. Melalui pemaparan berbagai konsep dasar ekonomi pembangunan, teori pertumbuhan ekonomi, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, dan model pembangunan ekonomi yang efektif, pembaca diberikan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas dan dinamika pembangunan ekonomi di tingkat

global. Selain itu, buku ini menggambarkan peran penting yang dimainkan oleh organisasi internasional dalam mengatasi ketimpangan ekonomi global melalui berbagai program bantuan, kerja sama pembangunan, dan diplomasi ekonomi. Organisasi internasional seperti PBB, Bank Dunia, IMF, dan WTO memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan, memberikan bantuan finansial, dan memfasilitasi kerja sama antar negara untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Buku ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi dalam mengatasi ketimpangan ekonomi global, termasuk polarisasi kekuatan ekonomi, perdagangan proteksionisme, krisis lingkungan, dan tantangan teknologi. Tantangan-tantangan ini menunjukkan perlunya upaya bersama dari semua pihak untuk menciptakan solusi yang inklusif dan berkelanjutan dalam mengatasi ketimpangan ekonomi global. Dengan demikian, *Ekonomi Pembangunan: Teori dan Praktik dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Global* memberikan pandangan yang komprehensif dan mendalam tentang masalah ketimpangan ekonomi global serta upaya untuk mengatasi tantangan tersebut melalui pendekatan teori dan praktik dalam bidang ekonomi pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D. & Robinson, J. A., 2022. Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty. Crown Business.
- Alvaredo, F., Chancel, L., Piketty, T., Saez, E. & Zucman, G., 2018. World inequality report 2018. Belknap Press.
- Anand, S. & Segal, P., 2014. Globalization, inequality and the rich-poor divide. Edward Elgar Publishing.
- Asian Development Bank., 2019. Asia's Journey to Prosperity: Policy, Market, and Technology Over 50 Years. Asian Development Bank.
- Asian Development Bank., 2021. About ADB. Asian Development Bank.
- Autor, D. H., 2015. Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation. Journal of Economic Perspectives, 29(3), 3-30.
- Baldwin, R., 2016. The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization. Harvard University Press.
- Baldwin, R., 2019. The Globotics Upheaval: Globalization, Robotics, and the Future of Work. Oxford University Press.
- Barro, R. J. & Sala-i-Martin, X., 2014. Economic growth. MIT Press.
- Blanchard, O. J., Amighini, A. & Giavazzi, F., 2020. Macroeconomics: A European perspective. Pearson Education.
- Blanchard, O., Amighini, A. & Giavazzi, F., 2023. Macroeconomics: A European perspective. Pearson.

- Bostrom, N. & Yudkowsky, E., 2014. The Ethics of Artificial Intelligence. *The Cambridge Handbook of Artificial Intelligence*, 316-334.
- Bown, C. P., 2018. Trade wars: What do they mean? Why are they happening now? What are the costs?. Centre for Economic Policy Research.
- Brynjolfsson, E. & McAfee, A., 2014. *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. WW Norton & Company.
- Deaton, A., 2023. *The great escape: Health, wealth, and the origins of inequality*. Princeton University Press.
- Drezner, D. W., 2018. *The Ideas Industry: How Pessimists, Partisans, and Plutocrats are Transforming the Marketplace of Ideas*. Oxford University Press.
- European Commission., 2021. *Development Cooperation Instrument (DCI)*. European Commission.
- Evenett, S. J. & Fritz, J., 2018. *Reinvigorating Trade and Inclusive Growth*.
- Fiszbein, A. & Schady, N., 2019. *Conditional cash transfers: Reducing present and future poverty*. *World Bank Publications*.
- Floridi, L., 2019. *The Ethics of Information*. Oxford University Press.
- Gai, A. M., Sir, M. M., Harsono, I. & Poerwati, T., 2023. Analysis of the Influence of Educational Background, Life Expectancy and Infrastructure Maturity on Poverty Growth in Indonesia Using Quantile Regression Method. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), pp.2586-2593.
- Gai, A. M., Sir, M. M. & Maulida, R. R., 2022. Influence Analysis of Regional Loans on Basic Infrastructure Establishment to Recover

- Economy during the Covid-19 Pandemic in Sikka Regency, East Nusa Tenggara, Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1015(1), pp.012022
- Hirschman, A. O., 2018. The strategy of economic development. Yale University Press.
- International Monetary Fund.*, 2021. About the IMF. *International Monetary Fund.*
- IPCC., 2014. Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press.
- IPCC., 2018. Global Warming of 1.5°C: An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change. IPCC.
- Katz, J. & Wagner, R., 2016. The Rise of Innovation Districts: A New Geography of Innovation in America. Brookings Institution Press.
- Keohane, R. O. & Nye, J. S., 2022. Power and Interdependence: World Politics in Transition. Little, Brown and Company.
- Lustig, N., 2019. Fiscal policy, income redistribution, and poverty reduction in low and middle-income countries. *Journal of Globalization and Development*, 10(1), 55-93.
- Milanovic, B., 2016. Global inequality: A new approach for the age of globalization. Harvard University Press.
- North, D. C., 2020. Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press.

- OECD., 2017. Economic Survey of Korea 2017. OECD Publishing.
- OECD., 2019. OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2019. OECD Publishing.
- OECD., 2020. The Future of Development Co-operation: Development Co-operation Report 2020. OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development., 2021. About OECD. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Ostrom, E. & Janssen, M. A., 2015. A Behavioral Approach to the Rational Choice Theory of Collective Action: Presidential Address, American Political Science Association, 1997. *American Political Science Review*, 109(4), 665-683.
- Ostry, J. D., Berg, A. & Tsangarides, C. G., 2014. Redistribution, inequality, and growth. *IMF Staff Discussion Note*, 14(02), 1-35.
- Piketty, T., 2014. *Capital in the twenty-first century*. Harvard University Press.
- Ravallion, M., 2015. Inequality is bad for the poor. *World Bank Policy Research Working Paper*, (3677).
- Ray, D., 2018. *Development economics*. Princeton University Press.
- Reinhart, C. M. & Rogoff, K. S., 2019. *This time is different: Eight centuries of financial folly*. Princeton University Press.
- Rodrik, D., 2018. New technologies, global value chains, and the developing economies. *Global Policy*, 9(1), 9-15.
- Sachs, J., 2015. *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press.
- Sen, A., 2019. *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Stern, N., 2017. *The economics of climate change: The Stern review*. Cambridge University Press.

- Stern, N., 2019. Building on Success and Learning from Experience: An Independent Review of the UK's International Climate Finance. UK Government.
- Stiglitz, J. E., 2022. Globalization and its discontents. WW Norton & Company.
- Stiglitz, J. E., 2022. The price of inequality: How today's divided society endangers our future. WW Norton & Company.
- Syafara, M. C., Imaduddina, A. H. & Gai., 2023. Pengembangan Kawasan Pariwisata Coban Ciblungan Kabupaten Malang: Indonesia. Jurnal Plano Buana, 4(1), pp.22-34.
- Todaro, M. P. & Smith, S. C., 2015. Economic development. Pearson.
- UN DESA., 2019. World Economic Situation and Prospects 2019. United Nations Publications.
- UNCTAD., 2019. Trade and Development Report 2019: Financing a Global Green New Deal. United Nations Publications.
- UNCTAD., 2020. World Investment Report 2020: International Production Beyond the Pandemic. United Nations Publications.
- UNDP., 2018. Harnessing Frontier Technologies for Sustainable Development. United Nations Development Programme.
- UNDP., 2019. Human Development Report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today – inequalities in human development in the 21st century. United Nations Development Programme.
- UNDP., 2020. Human Development Report 2020: The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene. United Nations Development Programme.
- UNDP., 2021. About Us. United Nations Development Programme. Diakses pada 1 Februari 2022, dari <https://www.undp.org/about>

- UNESCO., 2019. Future of Learning: UNESCO Education and Technology Foresight. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Warschauer, M., 2023. Technology and Social Inclusion: Rethinking the *Digital divide*. MIT Press.
- Wilkinson, R. G. & Pickett, K. E., 2019. The spirit level: Why greater equality makes societies stronger. Bloomsbury Press.
- World Bank.*, 2014. World development report 2014: Risk and opportunity—managing risk for development. *World Bank Publications*.
- World Bank.*, 2018. World Development Report 2018: Learning to Realize Education’s Promise. *World Bank Publications*.
- World Bank.*, 2019. World Development Indicators 2019. *World Bank Publications*.
- World Bank.*, 2019. World Development Report 2019: The Changing Nature of Work. *World Bank Publications*.
- World Bank.*, 2020. World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains. *World Bank Publications*.

GLOSARIUM

Analisis	Proses penguraian suatu masalah atau situasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil untuk dipelajari secara mendalam guna mendapatkan pemahaman yang lebih baik.
Berkelanjutan	Bertahan atau berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi sekarang dan masa depan tanpa merusak lingkungan atau sumber daya alam.
Dinamika	Perubahan atau pergeseran yang terjadi dalam suatu sistem atau fenomena dari waktu ke waktu.
Ekonomi	Studi tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa serta interaksi antara agen-agen ekonomi dalam suatu sistem.
Global	Mengacu pada fenomena atau proses yang terjadi di seluruh dunia dan memiliki dampak secara universal atau melintasi batas-batas nasional.
Ketimpangan	Merujuk pada perbedaan yang signifikan dalam distribusi sumber daya, peluang, dan akses terhadap kekayaan materi antara individu, kelompok, atau wilayah tertentu dalam suatu masyarakat.
Kompleksitas	Karakteristik dari suatu situasi, masalah, atau sistem yang melibatkan banyak variabel, interaksi, atau elemen yang saling terkait.

Kontribusi	Sumbangan atau partisipasi aktif seseorang atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama atau hasil yang diinginkan.
Pembangunan	Merupakan proses lintas sektoral yang berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, termasuk peningkatan pendapatan, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta pengurangan ketimpangan ekonomi dan sosial.

INDEKS

A

adaptabilitas · 121
aksesibilitas · 27, 69, 115, 133,
137, 141, 142, 152, 153

B

blockchain · 189

D

disparitas · 1, 2, 5, 8, 9, 23, 31, 34,
43, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 66,
78, 93, 137, 146, 149, 191
distribusi · 1, 2, 6, 7, 9, 10, 12, 13,
22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 44, 45, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 72,
77, 78, 79, 88, 89, 94, 96, 105,
111, 128, 129, 131, 152, 201
domestik · 5, 63, 66, 86, 92, 93,
103, 118, 132, 186, 187

E

ekonomi · i, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 130, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 140,
142, 143, 144, 145, 146, 147,
148, 149, 150, 151, 152, 153,
154, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 163, 164, 165, 169, 170,
171, 172, 173, 174, 175, 176,
177, 178, 179, 180, 181, 182,
183, 184, 185, 186, 187, 188,

189, 190, 191, 192, 201, 202,
209
ekspansi · 143
emisi · 94, 103, 169, 189
empiris · 101, 125
entitas · 161

F

finansial · 50, 55, 82, 95, 98, 99,
112, 113, 118, 124, 128, 130,
131, 138, 142, 165, 170, 172,
173, 177, 188, 192
fiskal · 31, 35, 36, 66, 67, 68, 127,
128, 129, 130, 132, 133, 134,
144, 145
fleksibilitas · 15, 121, 132
fluktuasi · 48, 81, 90, 91, 92, 93,
132, 139
fundamental · 16, 27

G

geografis · 36
globalisasi · 43, 49, 50, 70, 74, 80,
85, 93, 94, 96, 97, 107, 127, 130,
132, 139, 147, 148, 154, 169

I

implikasi · 6, 100, 166
inflasi · 36, 66, 67, 68, 130, 134

infrastruktur · 1, 7, 8, 13, 23, 27, 29,
30, 31, 36, 37, 38, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 55, 60, 66, 68, 69,
79, 80, 88, 93, 95, 97, 98, 99,
108, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 120, 128, 132, 133, 135,
136, 137, 139, 140, 141, 144,
148, 158, 160, 163, 169, 170,
173, 175, 176, 177, 180, 183

inklusif · 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15,
23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 52,
54, 57, 59, 62, 69, 73, 75, 78, 79,
80, 83, 84, 85, 88, 89, 95, 97, 98,
99, 102, 105, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 117,
119, 120, 121, 122, 123, 124,
126, 127, 128, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 137,
139, 142, 144, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 153, 154, 155,
156, 157, 159, 161, 164, 170,
171, 172, 173, 174, 175, 176,
178, 179, 180, 182, 184, 185,
190, 192

inovatif · 19, 65, 66, 75, 102, 138,
154, 155, 159

integritas · 162

investasi · 1, 7, 10, 21, 22, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 44, 45, 48, 50, 52,

53, 55, 56, 58, 59, 63, 65, 66, 67,
68, 72, 76, 79, 80, 86, 87, 89, 91,
92, 97, 98, 102, 105, 108, 112,
115, 116, 117, 119, 120, 123,
128, 131, 132, 133, 135, 136,
137, 142, 144, 146, 149, 150,
154, 160, 161, 164, 165, 166,
169, 180, 184, 186, 187, 188,
190

investor · 33, 35, 37, 41, 63, 66, 70,
87, 120, 144

K

kolaborasi · 14, 15, 102, 189

komoditas · 90, 91

komprehensif · 5, 14, 16, 17, 19,
52, 79, 101, 112, 122, 129, 132,
136, 163, 191, 192

konkret · 1, 13, 14, 18, 23, 83

konsistensi · 37, 120, 121

kredit · 12, 128, 131

M

manajerial · 118, 119

manufaktur · 31, 66, 112, 136

metodologi · 14

moneter · 35, 36, 66, 67, 127, 128,
130, 131, 132, 133, 134, 183

N

negosiasi · 185

non-tarif · 143

O

otoritas · 36

output · 23, 73

P

politik · 2, 3, 4, 21, 24, 25, 33, 35,
40, 41, 43, 44, 51, 52, 53, 56, 57,
59, 60, 61, 63, 85, 86, 87, 88,
121, 122, 128, 134, 169, 184,
185, 186

populasi · 46, 50, 51, 53, 56, 61,
105, 122

R

regulasi · 10, 40, 54, 66, 68, 69, 70,
79, 106, 119, 138, 144, 153, 161,
180, 190

revolusi · 5, 85, 139, 154, 189

robotika · 152

S

stabilitas · 2, 3, 4, 24, 34, 35, 36,
40, 41, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57,

59, 62, 63, 64, 66, 67, 70, 86, 88,
105, 106, 109, 120, 121, 122,
130, 131, 132, 134, 165, 166,
169, 186
suku bunga · 36, 67, 68, 128, 130,
131

T

tarif · 101, 143, 145, 187
teoretis · 18

transformasi · 111, 138, 148, 161,
165, 189, 190
transparansi · 125, 130, 162

U

universal · 108, 109, 111, 120, 201

V

varietas · 95

BIOGRAFI PENULIS



Ardiyanto Maksimilianus Gai, ST., M.Si.

Lahir di Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 16 Januari 1988. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Teknik Planologi/Perencanaan Wilayah dan Kota ITN Malang dan melanjutkan S2 pada Magister Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan Universitas Brawijaya Malang. Penulis pernah menempuh pendidikan non-gelar pada *Credit Earning Program* (CEP) di Universitas Indonesia pada Program Kajian Pengembangan Perkotaan. Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan Doktoral (S3) pada Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, pada IPB University. Penulis merupakan anggota dan pengurus Ikatan Ahli Perencana (IAP) Jawa Timur dan merupakan tenaga ahli tersertifikasi ahli utama. Saat ini mengampu mata kuliah Pengantar Proses Perencanaan, Analisa Sumberdaya dan Lingkungan, Perencanaan Desa, Perencanaan Pesisir, Geologi Lingkungan dan Ekonomi Wilayah dan Kota



Ir. Titik Poerwati, MT

Lahir di Probolinggo, 04 Juni 1966. Lulus S 1 Teknik Planologi (Sekarang Perencanaan Wilayah dan Kota) di Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang pada tahun 1992, kemudian lulus S2 di Program Magister Teknik Sipil Konsentrasi Manajemen Konstruksi Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang tahun 2012. Menjadi dosen tetap di ITN Malang yang mengampu mata kuliah Ekonomi Wilayah dan Kota, Sistem Sosial dan Kependudukan, Pembiayaan Pembangunan, serta Hukum dan Administrasi Perencanaan.



Dr. Yunada Arpan, S.E.,M.M.

Dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras Bandar Lampung. Dosen luar biasa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis IBI Darmajaya. Sarjana Strata-1 dari Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta, Strata-2 dari STIE Widya Jayakarta, Jakarta. Strata-3 dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



Monsar Marito Sir. ST. ME.

Lahir di Kupang, 14 Maret 1993. Lulus S2 di Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya tahun 2023. Dan S1 Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota di ITN Malang tahun 2017. Saat ini aktif sebagai tenaga ahli bersertifikat ahli Muda Perencana Wilayah dan Kota di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) ITN Malang. Aktif dalam penelitian yang berhubungan dengan Tata Ruang.

EKONOMI PEMBANGUNAN

TEORI DAN PRAKTIK DALAM MENGATASI
KETIMPANGAN EKONOMI GLOBAL

Buku referensi "Ekonomi Pembangunan: Teori dan Praktik dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Global" membahas teori dan aplikasi praktis dalam menangani ketidaksetaraan ekonomi global. Buku ini membahas beragam konsep, mulai dari dasar-dasar ekonomi pembangunan hingga strategi terbaru untuk mengatasi ketimpangan. Melalui analisis mendalam dan contoh kasus dari berbagai negara, pembaca dibimbing untuk memahami akar permasalahan dan solusi yang efektif. Penekanan pada tanggung jawab bersama dalam mengatasi ketimpangan ekonomi menjadi inti buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca yang tertarik memahami dan berkontribusi dalam menciptakan masyarakat global yang lebih adil dan berkelanjutan.



 mediapenerbitindonesia.com
 +6281362150605
 Penerbit Idn
 @pt.mediapenerbitdn

